SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan adanya dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2025

Pasal 4

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025, meliputi:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2024 dan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
BAB III	Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI Penutup.

2. Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Juni 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Juni 2025

Plh. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

IRWAN RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Dokumen RPD ini akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. RPD dan Renstra PD Kabupaten/Kota tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan perkada.

RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mempunyai Tema

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah **"Memperkokoh Kemandirian Masyarakat"**, yang dijabarkan ke dalam tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. Sebagai penjabaran RPD Kota Bogor 2025-2026, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pemerintah Kota Bogor wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025.

RKPD Kota Bogor Tahun 2025 merupakan RKPD tahun ke 1 (satu) dari periode RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Selain berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, penyusunan Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Strategis RPD Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung tema **Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas** sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 didasari oleh permasalahan dan tantangan terkait sektor **Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pengangguran, Infrastruktur dan implementasi Reformasi Birokrasi**. Dari beberapa permasalahan tersebut maka ditetapkanlah **isu strategis** Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 yaitu Pembangunan Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Akuntabilitas, pelayanan publik, dan Inovasi sebagai langkah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada tanggal 20 Februari 2025 dilantik Wali Kota Bogor periode 2025-2030, dengan Visi "Bogor Beres, Bogor Lancar" untuk menjadi arah Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2025-2029.

Pada awal Januari 2025 terbit Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan untuk merealokasi APBD 2025 ke 7 (tujuh) prioritas terkait Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan Cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Adapun lingkup perubahan meliputi: penambangan/pengurangan sub kegiatan; perubahan target kinerja baik IKU RPD/RPJMD, IKU Renstra, IKK outcome atau output; Perubahan Struktur Anggaran Belanja dan Kegiatan; Penyesuaian output pada sub kegiatan yang terkait dengan DAK, Dana Insentif Fisikal, DBHCHT, dan sebagainya; Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru yang medukung sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi.

Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan penyusunan rancangan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1.2. MAKSUD PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, sesuai dengan hal-hal yang melatarbelakangi adanya Perubahan RKPD 2025, agar pelaksanaan APBD 2025 efisien dan efektif.

Perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2025 disusun guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan berdasarkan urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bogor tahun anggaran 2024 dan capaian kinerja pelaksanaan APBD Kota Bogor tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD tahun 2025;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian target sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, dengan mempertimbangkan hasil dari refocusing APBD Tahun 2024;
4. Terdapat arah kebijakan pada tingkat pusat dan provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024;
6. Penambahan/pengurangan/pergeseran rincian subkegiatan karena adanya efisiensi dan penuntasan prioritas pembangunan;
7. Perubahan Pagu Program/kegiatan/subkegiatan seiring dengan penambahan/pengurangan/ pergeseran sub kegiatan.

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2025);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
40. Peraturan Dareah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
48. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangungan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
50. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
51. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
52. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.103-BKAD/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.100-Bkad/2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
53. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.12.1/Kep.134-Bkad/2025 Tentang Pengalihan Dan Penggunaan Anggaran Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1.6. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA BOGOR TAHUN 2025

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD, dasar hukum dan sistematika dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2024 DAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2025, Perubahan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi daerah 2025 dan perubahan kerangka keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan perubahan sasaran prioritas pembangunan daerah, penyesuaian target indicator kinerja utama daerah.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Pada bab ini dijelaskan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun Kota Bogor Tahun 2025 serta perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

BAB VI. PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Tahun 2024 merupakan tahapan jangka jangka menengah ke 5 yaitu pada periode RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Bogor kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota sampai dengan triwulan II. Evaluasi tersebut merupakan feedback bagi penyusunan dokumen perencanaan yang memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Indikator Makro dalam RPJMD Kota Bogor menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

(*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.1**
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,31	79,03
2	Jumlah Penduduk	dalam Ribu Jiwa	1.200	1.078
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1,44	1,27
4	Angka Kemiskinan (%)	%	6,21	6,53
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,37	8,13
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,04	5,15
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0,34	0,47
8	Tingkat Inflasi	%	1,5-3,5	1.75
9	PDRB per Kapita (AdhB)	Juta Rupiah	50,41	56,62

Sumber: Bappeda Kota Bogor, diolah 2025

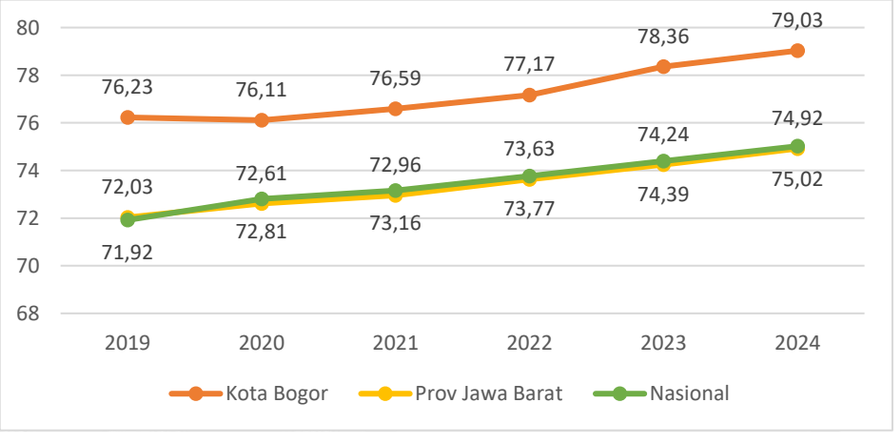
Dari sembilan indikator makro RPJMD Kota Bogor terdapat tiga indikator yang belum tercapai, yaitu angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks gini ratio. Namun demikian, rata-rata ketercapaian indikator makro RPJMD Kota Bogor pada Tahun 2023 menunjukkan 97,41 persen atau hampir mencapai target dengan predikat sangat tinggi.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Grafik Error! No text of specified style in document.**.1**
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kota Bogor diolah oleh Bapperida, 2025

Ada empat indikator utama yang menjadi komponen perhitungan IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita. IPM Kota Bogor terus menunjukkan peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2024 IPM Kota Bogor adalah sebesar 79,03, naik dari tahun sebelumnya yaitu 78,36. Capaian ini juga lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

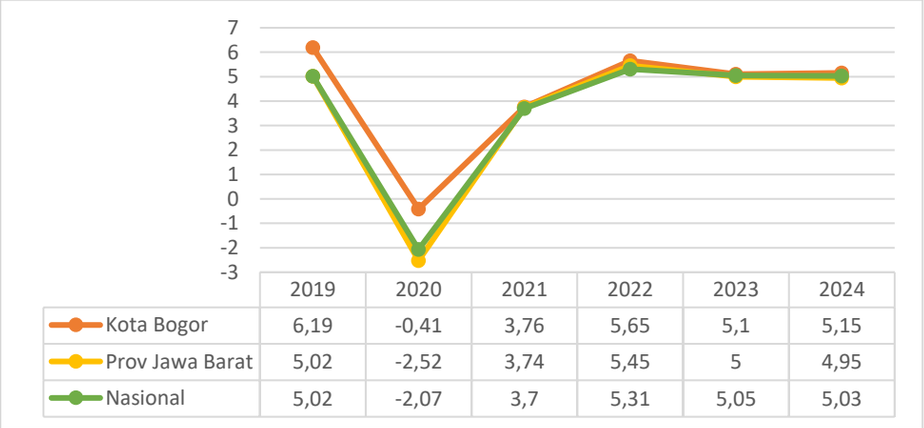
Jumlah penduduk Kota Bogor naik sedikit dari 1.070.719 pada tahun 2023 menjadi 1.078.351 di tahun 2024. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor tahun 2024 adalah sebesar 1,27, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,96.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi di suatu wilayah. LPE mencerminkan perubahan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. LPE Kota Bogor pada tahun naik sedikit dari 5,1 tahun 2023 menjadi 5,15 di tahun 2024. Angka ini masih belum mencapai angka LPE Kota Bogor sebelum pandemi Covid-19.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Grafik Error! No text of specified style in document.**.2**
LPE Kota Bogor, Prov Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,1	5,15
Prov Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	5	4,95
Nasional	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Kota Bogor diolah oleh Bapperida, 2025

Dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional, angka LPE Kota Bogor masih lebih besar dari keduanya. Dilihat dari grafik diatas bahwa dari tahun 2022 ke 2024 LPE Nasional dan Jawa Barat mengalami perlambatan. Sedangkan Kota Bogor sempat melambat di tahun 2023 namun kemudian kembali membaik di tahun 2024.

4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan dan melemahkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah kurang menarik bagi para investor/produsen untuk berinvestasi sehingga berdampak juga pada laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024 inflasi Kota Bogor (year on year) sebesar 1,75, turun 1,61 poin dari tahun sebelumnya. Turunnya angka inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga terjadi di level provinsi dan nasional. Inflasi sebesar 1,75 poin ini masih ada dalam range target inflasi kota Bogor yaitu 1,5-3,5. Dapat dilihat di atas bahwa nilai inflasi tahun 2024 adalah angka terrendah yang pernah dicapai Kota Bogor sejak tahun 2019.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,37 persen dan terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen.

5. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

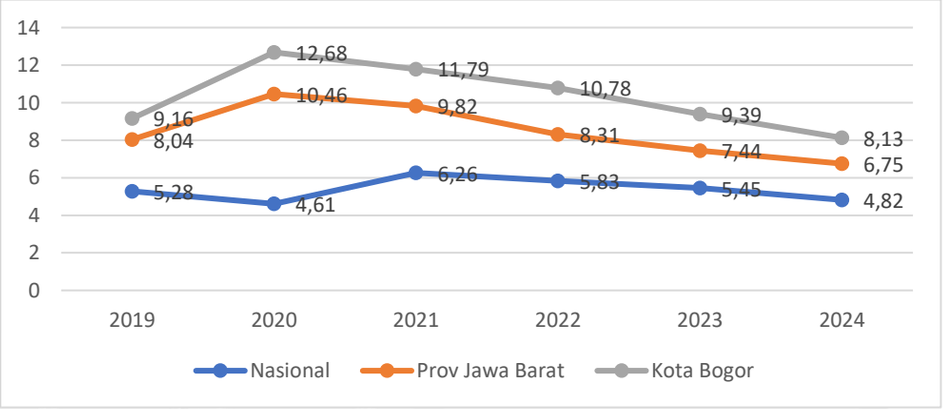
Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebesar 0,477, artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Memperhatikan grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks gini Kota Bogor cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 rasio gini Kota Bogor adalah yang tertinggi di Jawa Barat.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Besaran TPT didapatkan dengan menghitung persentase angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri mencakup penduduk usia 15-65 tahun yang mampu dan bersedia bekerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Grafik Error! No text of specified style in document.**.3**
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor, Prov Jawa Barat dan Nasional 2019-2024



Sumber: BPS Kota Bogor diolah oleh Bapperida, 2025

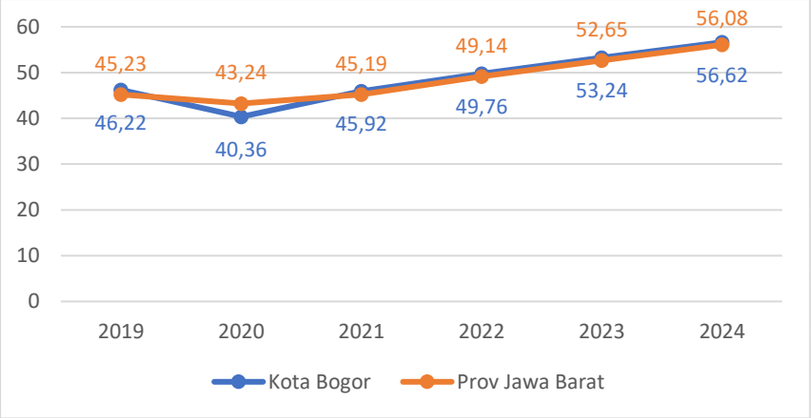
Grafik diatas menggambarkan angka TPT Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional. TPT Kota Bogor sempat naik dari tahun 2019 ke 2020 dikarenakan oleh pandemi yang terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun demikian setelah tahun 2020, TPT Kota Bogor terus turun sampai di tahun 2024 TPT Kota Bogor adalah sebesar 8,13%. Angka tersebut masih lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Barat dan angka nasional, namun sudah lebih rendah dari proyeksi tahun 2024.

7. PDRB Per Kapita (ADHB)

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. PDRB Per Kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Secara sederhana, PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Grafik Error! No text of specified style in document.**.4**
PDRB Kota Bogor dan Prov Jawa Barat Tahun 2019-2024



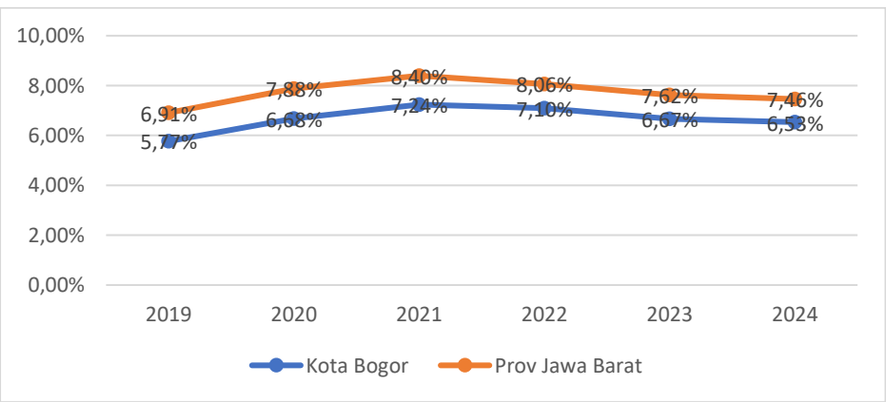
Sumber: BPS Kota Bogor diolah oleh Bapperida, 2025

Nilai PDRB per kapita Kota Bogor tahun 2024 adalah 56,62 juta rupiah angka ini lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yaitu 58,24 juta rupiah. PDRB per kapita tahun 2024 juga lebih tinggi dari capaian Jawa Barat yaitu 56,08.

8. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2024 garis kemiskinan Kota Bogor berada di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bogor masih berada di atas tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Nasional secara umum. Dengan demikian masyarakat Kota Bogor masih memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas garis kemiskinan.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.5**
Angka Kemiskinan Kota Bogor



Sumber: BPS Kota Bogor diolah oleh Bapperida, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Angka kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 6,53% atau sebanyak 73,93 ribu orang penduduk Kota Bogor berada dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan 0,14% dari tahun 2023 yaitu sebesar 6,67%.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA BOGOR TAHUN 2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 selain menetapkan Indikator Makro Daerah juga ditetapkan indikator sasaran pembangunan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ingin dicapai. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 juga telah ditetapkan target sasaran pembangunan/ IKU yang ingin dicapai. Namun, karena dokumen perubahan ini disusun pada triwulan I tahun 2024, IKU yang ditetapkan dalam dokumen RPD tersebut belum dapat dilihat realisasinya pada triwulan I.

Data yang disajikan dalam tabel di bawah ini adalah capaian IKU Kota Bogor Tahun 2024 yang masih mengacu pada dokumen RPJMD. Beberapa dari indikator IKU dalam RPJMD tersebut masih digunakan pada dokumen RPD.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.2**
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024

NO	Indikator	Satuan	2023		Evaluasi
			Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,18	75,80	Tercapai
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	72,00	73,11	Tercapai
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	58	69,60	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak	%	88,76	98,04	Tercapai
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	72,42	72,33	Tidak tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	Indikator	Satuan	2023		Evaluasi
			Target	Realisasi	
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	75,10	79,43	Tercapai
7	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	8,55	6,07	Tidak tercapai
8	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	1,77	1,72	Tercapai
9	Persentase Reduksi Sampah	%	7,90	7,98	Tercapai
10	Indeks Kualitas Air	Angka	38,17	50,89	Tercapai
11	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,814	86,51	Tercapai
12	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,25	4,26	Tercapai
13	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,87	10,71	Tidak tercapai
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,03	13,51	Tidak tercapai
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	67,05	NA	
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka			
		Kategori	Inovatif	Inovatif	Tercapai
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,50	75,60	Tercapai
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,26	79,98	Tercapai
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A	Tercapai
20	Level Kematangan Smart City	Level	integrative	Smart	Tercapai
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,37	8,13	Tercapai
22	Angka Kemiskinan	%	6,21	6,53	Tidak tercapai
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	85,20	85,20	Tercapai
24	PDRB (Atas dasar harga konstan)	Milyar Rp	39.181	38.964,67	Tidak tercapai
25	PDRB Per Kapita (Atas dasar harga berlaku)	Juta Rp	50,41	56,62	Tercapai
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12290	13154	Tercapai
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	25,00	15,94	Tidak tercapai
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	100	51,47	Tidak tercapai
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	100	62,5	Tidak tercapai

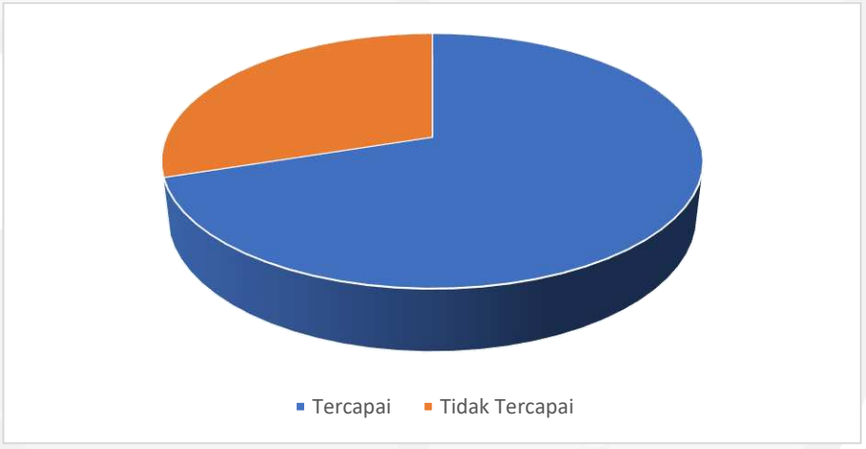
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	Indikator	Satuan	2023		Evaluasi
			Target	Realisasi	
30	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%			
	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%	90,00	90,03	Tercapai
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	44	60,07	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Bogior , diolah 2025

Bila dilihat pada tabel diatas, walaupun masih terdapat 10 (sepuluh) indikator yang belum mencapai targetnya, namun hampir seluruhnya memiliki tingkat capaian diatas 80 persen bahkan ada yang hampir mencapai 100 persen. Dengan demikian, bila menggunakan standar predikat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka capaiannya masuk predikat **Tinggi.** (78 persen ≤ 90 persen).

Grafik Error! No text of specified style in document.**.6**
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Bogor diolah oleh Bapperida, 2025

Adapun penjelasan mengenai tidak tercapainya indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.3**
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor Tahun 2024 yang Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN TIDAK TERCAPAI
1	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	Masih banyak rumah tangga yang belum terlayani air minum perpipaan yang bersumber dari PDAM.
2	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	Masih minimnya sistem pengolahan air limbah yang aman (disedot dari tangki septik komunal kemudian diangkut ke IPAL/IPLT dan diolah air limbahnya), sehingga perlu peningkatan program LLTT (layanan lumpur tinja terjadwal, tangki septik yang blm sesuai standar teknis)
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1. Faktor Ekonomi: kemiskinan dan biaya pendidikan 2. Infrastruktur Pendidikan: kekurangan sekolah dan fasilitas dan aksesibilitas ke sekolah
4	Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Faktor Ekonomi: kemiskinan dan biaya pendidikan 2. Infrastruktur Pendidikan: kekurangan sekolah dan aksesibilitas ke sekolah
5	Angka Kemiskinan	Belum optimalnya upaya meningkatkan pendapatan masyarakat
6	PDRB (Atas dasar harga konstan)	Terjadinya perlambatan ekonomi global berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah.
7	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Pertumbuhan kredit Non UMKM lebih besar dibandingkan kredit UMKM.
8	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	Tidak tercapainya pelaksanaan indikasi program oleh perangkat daerah yang ada di Kota Bogor.
9	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	

Sumber: Bapperida Kota Bogor, diolah 2024

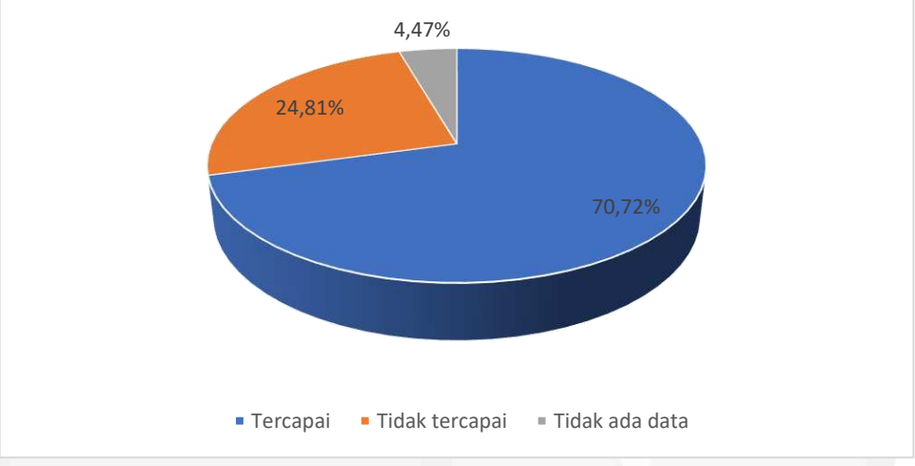
3.3. CAPAIAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau yang lebih dikenal dengan *key*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi. Target capaian indikator kinerja kunci menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.7**
Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024



Sumber: Bapperida Kota Bogor, data diolah 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi IKK yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tingkat dampak (*impact*) Tahun 2024 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 403 IKK tingkat *impact* Tahun 2024, yang memiliki capaian kinerja Tercapai sebanyak 285 indikator atau 70,72%, Tidak Tercapai sebanyak 100 indikator atau 24,81%, dan Tidak Tersedia Data sebanyak 18 indikator atau 4,47%. Rincian ketercapaian indikator kinerja kunci tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.4**
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Laju Inflasi	%	1,5-3,5	1.75	Tercapai	Bapperida
2	PDRB per kapita	Juta Rp	50,41	56,62	Tercapai	Bapperida
3	Indeks gini	Point	0,34	0,47	Tidak tercapai	Bapperida
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,79	93,47	Tidak tercapai	Bapperida
5	indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	78,89	79,03	Tercapai	Bapperida
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.200.202	1.078.351	Tercapai	Bapperida
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,44	1,27	Tercapai	Bapperida
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,04	5,15	Tidak tercapai	Bapperida
9	angka melek huruf	Persen	99,98	99,98	Tercapai	Disdik
10	rata rata lama sekolah	Tahun	10,86	10,71	Tidak tercapai	Disdik
11	harapan lama sekolah	Tahun	14,83	13,51	Tidak tercapai	Disdik
12	angka usia harapan hidup	Tahun	74,18	75,8	Tercapai	Dinkes
13	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	Persen	9,70	2,32	Tercapai	Dinkes
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	Persen	3,98	2	Tercapai	Dinkes
15	cakupan desa siaga aktif	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
16	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	69,28	67,35	Tidak tercapai	Disnaker
17	tingkat pengangguran terbuka	opini	10,37	8,13	Tercapai	Bapperida
18	rasio penduduk yang bekerja	Persen	65,65	45,41	Tidak tercapai	Disnaker
19	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Persen	90,91	91,87	Tercapai	Disnaker

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
20	keluarga pra sejahtera	Persen	5,00	NA		DPPKB
21	indeks kepuasan masyarakat	angka	3,55	3,64	Tercapai	Setda
22	persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	45,00	46,01	Tercapai	Bapenda
23	opini BPK	opini	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
24	pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	83,70	89,80	Tercapai	DKPP
25	penguatan cadangan pangan	Ton	10	22,24	Tercapai	DKPP
26	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,636	0,68	Tercapai	DKPP
27	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	persen	0,66	0,71	Tercapai	DKPP
28	produksi Pertanian (Padi)	ton	3424,40	2966,40	Tidak tercapai	DKPP
29	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,03	18,39	Tercapai	Dinkukmdagin
30	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	20,85	19,09	Tidak tercapai	Dinkukmdagin
31	kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	18,03	18,39	Tercapai	Dinkukmdagin
32	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,208	19,09	Tercapai	Dinkukmdagin
33	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,214	18,45	Tercapai	Dinkukmdagin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
34	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,75	14,04	Tercapai	Dishub
35	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persen	12,75	13,66	Tercapai	Dishub
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	12.290	11.716	Tidak tercapai	Bapperida
2	Angka kriminalitas	Angka	0,00043			Satpol PP
3	Rasio ketergantungan	Persen	43,5	43,5	Tercapai	Disdukcapil
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,50			DP3A
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	69,28	67,35	Tidak tercapai	Disnaker
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
A	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**					
1	**PENDIDIKAN**					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	52,00	53,80	Tercapai	Disdik
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	99,23	Tidak tercapai	Disdik
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
4	Angka Partisipasi Murni					Disdik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	100,00	97,50	Tidak tercapai	Disdik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,00	80,00	Tidak tercapai	Disdik
5	Angka Partisipasi Kasar					Disdik
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	114,30	108,60	Tidak tercapai	Disdik
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	106,00	127,40	Tercapai	Disdik
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	100,00	99,98	Tidak tercapai	Disdik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	98,50	91,66	Tidak tercapai	Disdik
7	Angka Putus Sekolah					Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,02	0,02	Tercapai	Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,02	0,02	Tercapai	Disdik
8	Angka kelulusan					Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
9	Angka Melanjutkan (AM):					Disdik
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
10	Fasilitas Pendidikan:					Disdik
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	99,00	99,12	Tercapai	Disdik
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	98,00	99,00	Tercapai	Disdik
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	44,00	44,00	Tercapai	Disdik
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	30,00	32,00	Tercapai	Disdik
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1 : 32	01:33	Tercapai	Disdik
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	1 : 24	1:24	Tercapai	Disdik
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00	100,00	Tercapai	Disdik
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98	99,98	Tercapai	Disdik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	98,00	98,00	Tercapai	Disdik
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90,50	93,00	Tercapai	Disdik
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Angka	50,50	70,04	Tercapai	Disdik
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	107,90	99,98	Tidak tercapai	Disdik
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	94,50	91,66	Tidak tercapai	Disdik
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka	75,50	81,80	Tercapai	Disdik
2	**KESEHATAN**					
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	55	92,02	Tidak tercapai	Dinkes
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	2,80	6,99	Tidak tercapai	Dinkes
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	3,00	7,73	Tidak tercapai	Dinkes
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	Tercapai	Dinkes
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2,97	1,67	Tidak tercapai	Dinkes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
8	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,72	0,67	Tidak tercapai	Dinkes
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	99,00	101,82	Tercapai	Dinkes
12	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	17,54	Tercapai	Dinkes
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
15	Prevalensi Hipertensi	%	8,40	10,27	Tercapai	Dinkes
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,05	2,5	Tercapai	Dinkes
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	87,5	43,44	Tidak tercapai	Dinkes
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	60,00	276,47	Tidak tercapai	Dinkes
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	96,00	94,48	Tidak tercapai	Dinkes
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100	392,45	Tidak tercapai	Dinkes
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	<0,5	0,48	Tercapai	Dinkes
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	100	100	Tercapai	Dinkes
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	100	100	Tercapai	Dinkes
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	96,3	100,97	Tercapai	Dinkes
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	100	100	Tercapai	Dinkes
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	81	105,04	Tercapai	Dinkes
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
35	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
39	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	persen	0,29	0,3	Tercapai	Dinkes
40	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	persen	100	100	Tercapai	Dinkes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	persen	100	100,44	Tercapai	Dinkes
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	persen	100	100,66	Tercapai	Dinkes
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	persen	100	104,59	Tercapai	Dinkes
44	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	PEKERJAAN UMUM					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	90	90,05	Tercapai	PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,875	0,1942	Tidak tercapai	PUPR
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	90,00	90,05	Tercapai	PUPR
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	523,377	96,321	Tidak tercapai	PUPR
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	8,55	6,07	Tidak tercapai	PUPR
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	65,00	67,86	Tercapai	PUPR
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	85	0,82	Tidak tercapai	PUPR
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	1,345	1295	Tercapai	PUPR
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	53,79	54,65	Tercapai	PUPR
	Rasio jaringan irigasi	Point	0,3574	0,3720	Tercapai	PUPR
10	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	97,62	85,73	Tidak tercapai	PUPR
11	persentase penduduk berakses air minum	Persen	100	84,10	Tidak tercapai	PUPR
12	proporsi rumah tangga dengan akses	persen	100	84,10	Tidak tercapai	PUPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan					
13	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	1,77	1,72	Tercapai	Perumkim
14	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	25,00	30,00	Tercapai	DLH
15	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	14,00	14,70	Tercapai	Perumkim
16	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0,0350	1,54	Tercapai	Bagian Kesra SETDA
	PENATAAN RUANG					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	4.26*	Tidak tercapai	PUPR
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	0,0073	0,0055	Tidak tercapai	PUPR
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	90	88,59	Tidak tercapai	PUPR
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
1	rasio rumah layak huni	persen	23,52	21,41	Tidak tercapai	Perumkim
2	rasio pemukiman layak huni	persen	96,78	90,56	Tidak tercapai	Perumkim
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	96,78	94,57	Tidak tercapai	Perumkim
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	1,77	1,72	Tercapai	Perumkim
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	1,73	3,05	Tidak tercapai	Perumkim
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	0,99	0,76	Tercapai	Perumkim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	98,50	99,86	Tercapai	Perumkim
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	95	100	Tercapai	Perumkim
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	100	100	Tercapai	Perumkim
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	67,57	61,68	Tercapai	Perumkim
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	17,26	5,43	Tercapai	Perumkim
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	14,29	12,71	Tidak tercapai	Perumkim
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	3739	1049	Tidak tercapai	Satpol PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	100	50	Tidak tercapai	Damkar
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	100	50	Tidak tercapai	Damkar
6	Tingkat waktu tanggap (response	Menit	≤15	≤15	Tercapai	Damkar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	492.202	65.608	65608	BPBD
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jiwa	492.202	35.658	35658	BPBD
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	3.000	4.830	Tercapai	BPBD
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Tercapai	DPKP
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	persen	95	95	Tercapai	DPKP
6	**SOSIAL**					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
4	Persentase panti sosial yang	Persen	38,00	38,00	Tercapai	Dinsos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social					
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	100	100	Tercapai	Dinsos
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	persen	100	100	Tercapai	Dinsos
B	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**					
1	**TENAGA KERJA**					
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	92,81	91,87	Tidak tercapai	Disnaker

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2500	5632	Tercapai	Disnaker
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	339.564	303.941	Tidak tercapai	Disnaker
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	4.659.429	5.126.897	Tercapai	Disnaker
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	Tercapai	Disnaker
6	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%)	Juta/Pekerja/Tahun	77,76	75,47	Tidak tercapai	Disnaker
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	150	100	Tidak tercapai	Disnaker
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	50	50	Tercapai	Disnaker
9	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	73	84,62	Tercapai	Disnaker
10	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	29,49	18,81	Tidak tercapai	Disnaker
11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	71,5	75,47	Tercapai	Disnaker
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	100	73,62	Tidak tercapai	Disnaker
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	65,60	94,45	Tercapai	Disnaker

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,70	2,42	Tidak tercapai	Dp3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	22	26	Tercapai	Dp3A
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	14,22	NA		Dp3A
4	Rasio KDRT	Persen	0,00011	0,93	Tidak tercapai	Dp3A
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,10	50,69	Tercapai	Dp3A
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	Tercapai	Dp3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	Tercapai	Dp3A
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	Tercapai	Dp3A
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus	Persen	1,7	25	Tercapai	Dp3A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	kekerasan terhadap perempuan dan anak					
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	persen	100	100	Tercapai	Dp3A
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	23,30	1,16	Tercapai	Dp3A
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	97,82	100,00	Tercapai	Dp3A
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,98	101,05	Tercapai	Dp3A
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	93	80,6	Tercapai	Dp3A
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	98,01	kewenangan provinsi		Dp3A
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen				Dp3A
17	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	poin	25,0	10,3	Tidak tercapai	Dp3A
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota	poin	0,0098	0,0267	Tidak tercapai	Dp3A
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	poin	0,0086	0,0116	Tidak tercapai	Dp3A
3	**PANGAN**					
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/tahun	251,81			DKPP
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	2.400	2.460	Tercapai	DKPP
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	63	81,87	Tercapai	DKPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	95,30	92,39	Tidak tercapai	DKPP
4	**PERTANAHAN**					
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	Tercapai	SETDA
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	persen	100	100	Tercapai	DPMPTSP
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	90	90	Tercapai	DPMPTSP
5	**LINGKUNGAN HIDUP**					
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	38,17	50,89	Tercapai	DLH
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	79,814	86,510	Tercapai	DLH
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	55	58	Tercapai	DLH
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	ada	ada	Tercapai	DLH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	DLH
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	100	100	Tercapai	DLH
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	81,40	81,40	Tercapai	DLH
11	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	7,90	7,98	Tercapai	DLH
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	89,95	89,38	Tercapai	DLH
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	54,532	59,340	Tercapai	DLH
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	81,40	81,40	Tercapai	DLH
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen	12	58	Tercapai	DLH
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	Disdukcapil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	Sudah	Tercapai	Disdukcapil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	100	Tercapai	Disdukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	99	99	Tercapai	Disdukcapil
8	Kepemilikan KTP	Persen	100	100	Tercapai	Disdukcapil
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	100	100	Tercapai	Disdukcapil
10	Cakupan pasangan nonmuslim berakte kawin	Persen	60	62,34	Tercapai	Disdukcapil
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	Tercapai	DP3A
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	Tercapai	DP3A
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,44	0,96	Tercapai	DPPKB
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,135	1,89	Tercapai	DPPKB
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	51,35	52,78	Tercapai	DPPKB
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	40,54	50,00	Tercapai	DPPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	15	15	Tercapai	DPPKB
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	1	1	Tercapai	DPPKB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	1		DPPKB
8	Ratio Akseptor KB	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	14,50	9,9	Tercapai	DPPKB
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,12	0,12	Tercapai	DPPKB
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,38	13,88	Tercapai	DPPKB
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	20,45	20,01	Tidak tercapai	DPPKB
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	95,45	95,73	Tercapai	DPPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,78	71,91	Tercapai	DPPKB
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,80	75,95	Tercapai	DPPKB
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	1	Tercapai	DPPKB
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	50,25	87,34	Tercapai	DPPKB
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,96	73,02	Tercapai	DPPKB
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan	persen	100	100	Tercapai	DPPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	0	0		DPPKB
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	36,00	58,09	Tercapai	DPPKB
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	Tercapai	DPPKB
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	11,38	13,88	Tercapai	DPPKB
9	**PERHUBUNGAN**					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	25.564.066	113.953.567	Tercapai	Dishub
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,000189	0,000189	Tercapai	Dishub
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5662	5662	Tercapai	Dishub
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	2	2	Tercapai	Dishub
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	0,94	0,94	Tercapai	Dishub
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	Tercapai	Dishub

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	100	100	Tercapai	Dishub
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1,64	1,64	Tercapai	Dishub
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	33.580.638	33.580.638	Tercapai	Dishub
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpang	7.160.900	7.160.900	Tercapai	Dishub
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	rasio	1	0,8	Tidak tercapai	Dishub
12	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	rasio	0,63	0,63	Tercapai	Dishub
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100	94	Tidak tercapai	Diskominfo
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,99	4,08	Tercapai	Diskominfo
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	41	43	Tercapai	Diskominfo
4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan	persen	74,7	100	Tercapai	Diskominfo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota					
11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	21,45	23,1	Tercapai	DinKUKMdagin
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	10,15	10,73	Tercapai	DinKUKMdagin
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	371	536	Tercapai	DinKUKMdagin
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	194,2	164	Tidak tercapai	DinKUKMdagin
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	683	689	Tercapai	DinKUKMdagin
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	88	175	Tercapai	DinKUKMdagin
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	50	175	Tercapai	Disparbud
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	90	-		DinKUKMdagin
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	96	96	Tercapai	DinKUKMdagin
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	180	399	Tercapai	DinKUKMdagin
12	**PENANAMAN MODAL**					
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	2,6	1,650,561,582,215 (s.d. Triw III)	Tidak tercapai	DPMPTSP
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	1,54	NA		DPMPTSP
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	persen	100	NA		DPMPTSP
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**					
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna	Persen	5	NA		Dispora

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras					
2	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	30	0	Tidak tercapai	Dispora
3	Wirausaha muda	orang	300	120	Tidak tercapai	Dispora
4	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	83,33	50	Tidak tercapai	Dispora
5	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Rasio	0,003264: 2,08	0,00348:2,08	Tercapai	Dispora
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,0148	2,895	Tercapai	Dispora
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	6,06	30,22	Tercapai	Dispora
8	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	15	141	Tercapai	Dispora
14	**STATISTIK**					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
3	Buku “Kota Bogor Dalam Angka”	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
4	Buku “PDRB”	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
6	Persentase OPD yang menggunakan data	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
15	**PERSANDIAN**					
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	90	100	Tercapai	Diskominfo
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	83	84,2	Tercapai	Diskominfo
16	**KEBUDAYAAN**					
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persen	10	97,59	Tercapai	Disparbud
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	25	32	Tercapai	Disparbud
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	39	54	Tercapai	Disparbud
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	0	0		Disparbud
17	**PERPUSTAKAAN**					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustakaan	144.000	105.234	Tidak tercapai	Diskarpus
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	87370	81584	Tidak tercapai	Diskarpus
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	8,40	0,57	Tidak tercapai	Diskarpus
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	pemustaka	144.000	105.234	Tidak tercapai	Diskarpus
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	49.517	40.023	Tidak tercapai	Diskarpus
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan	orang	15	33	Tercapai	Diskarpus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	penilai yang memiliki sertifikat					
18	**KEARSIPAN**					**Diskarpus**
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	100	77,14	Tidak tercapai	Diskarpus
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	100	100	Tercapai	Diskarpus
C	**FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**					
1	**PARIWISATA**					
1	Kunjungan wisata	Orang	6.399.090	8.093.203	Tercapai	Disparbud
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2-3 hari	1-2 hari	Tidak tercapai	Disparbud
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	312.500.000.000	361.077.093.168	Tercapai	Disparbud
2	**PERTANIAN**					
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7,38	7,20	Tidak tercapai	DKPP
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	90,46	93,28	Tercapai	DKPP
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-2,24	-3,14	Tercapai	DKPP
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	13,94	13	Tidak tercapai	DKPP
3	**PERDAGANGAN**					
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	16,00 77,17	-30,27 79,78	Tidak tercapai Tercapai	DinKUKMdagin
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan)	persen	99,93	70,3	Tidak tercapai	DinKUKMdagin
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	39,32	52,73	Tercapai	DinKUKMdagin
4	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan	persen	16,00	-30,27	Tidak tercapai	DinKUKMdagin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	nya (UTTP) Bertanda terasah yang berlaku					
4	**PERINDUSTRIAN**					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	100	100	Tercapai	DinKUKMdagin
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	persen	52,38	25,6	Tidak tercapai	DinKUKMdagin
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	12,2	Tercapai	DinKUKMdagin
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	Tercapai	DinKUKMdagin
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0	0		DinKUKMdagin
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	persen	0	0		DinKUKMdagin
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	70	70	Tercapai	DinKUKMdagin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	5.353,50	1.685,90	Tidak tercapai	DKPP
2	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	32.378.540	32.359.519	Tidak tercapai	DKPP
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	Ton	4.264	1.686	Tidak tercapai	DKPP
D	**FOKUS PENUNJANG URUSAN**					
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	93	Tidak tercapai	Bapperida
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	Tercapai	Bapperida
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	64,69	Tidak tercapai	Bapperida
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah	dokumen	-	1	Tercapai	Bapperida

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	ditetapkan dengan PERDA					
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-	-		Bapperida
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	2	Tercapai	Bapperida
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-	-		Bapperida
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	93	Tidak tercapai	Bapperida
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	Tercapai	Bapperida
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	64,69	Tidak tercapai	Bapperida
	Inspektorat Daerah (Perencanaan dan Keuangan)					
15	Maturitas SPIP	predikat	Level 3	Level 3	Tercapai	Inspektorat
16	Peningkatan kapabilitas APIP	predikat	Level 3	Level 3	Tercapai	Inspektorat
2	**KEUANGAN**					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
2	Persentase SILPA	persen	8	2,67	Tercapai	BKAD
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	8	2,67	Tercapai	BKAD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	Tercapai	BKAD
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	≥20	23,85	Tercapai	BKAD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	≥10	22,17	Tercapai	BKAD
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tercapai	BKAD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	78,70	80,14	Tercapai	BKAD
9	Opini Laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	10	2	Tercapai	BKAD
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	prersen	10	3	Tercapai	BKAD
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	0	1	Tidak tercapai	BKAD
13	Manajemen Aset					BKAD
14	Adanya Daftar Aset Tetap	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
15	Penyusunan Manual daftar aset tetap	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
16	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
17	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
3	**KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	47	Tercapai	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	96	153,3	Tercapai	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	85	36,68	Tidak tercapai	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35	31	Tidak tercapai	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	142	Tidak tercapai	BKPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3740	5583	Tercapai	BKPSDM
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	58,00	60,34	Tidak tercapai	BKPSDM
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	25,96	22,98	Tidak tercapai	BKPSDM
9	Rasiopegawai fungsional bersetifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	100	56,28	Tidak tercapai	BKPSDM
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	Tercapai	Bapperida
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	90	100	Tidak tercapai	Bapperida
	Penerapan SIDa:					Bapperida
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	100	100	Tidak tercapai	Bapperida
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	96,50	98,00	Tercapai	Bapperida
5	**PENGAWASAN**					
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0,200	0,004	Tercapai	Inspektorat
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	94,5	87,74	Tidak tercapai	Inspektorat
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	92,7	88,99	Tidak tercapai	Inspektorat
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	86,50	90,00	Tercapai	Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
6	**SEKRETARIAT DPRD**					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Setwan
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Setwan

Sumber: Bapperida Kota Bogor, data diolah 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3.4. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Ringkasan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document..**5**
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4			5		
A		**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		**11,23**		**214.618.414.333**	**12,68**	
1	**1.01**	**Pendidikan**	**601.185.186.712**	**16,80**	**Sangat Rendah**	**100.972.933.485**	**16,80**	**Sangat Rendah**
		Dinas Pendidikan	601.185.186.712	16,80	Sangat Rendah	100.972.933.485	**16,80**	Sangat Rendah
2	**1.02**	**Kesehatan**	**619.756.627.468**	**8,54**	**Sangat Rendah**	**52.932.273.491**	**8,54**	Sangat Rendah
		Dinas Kesehatan	619.756.627.468	8,54	Sangat Rendah	52.932.273.491	**8,54**	Sangat Rendah
3	**1.03**	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**152.052.093.171**	**16,63**	**Sangat Rendah**	**25.292.365.019**	**16,63**	**Sangat Rendah**
		Dinas PUPR	152.052.093.171	16,63	Sangat Rendah	25.292.365.019	16.63	Sangat Rendah
4	**1.04**	**Perumahan dan Permukiman**	**171.761.025.947**	**9,61**	**Sangat Rendah**	**16.514.622.214**	**9,61**	Sangat Rendah
		Dinas Perumkim	171.761.025.947	9,61	Sangat Rendah	16.514.622.214	9,61	Sangat Rendah
5	**1.05**	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	**77.166.340.977**	**15,81**	**Sangat Rendah**	**18.906.220.124**	**24,50**	Sangat Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Satpol PP	47.153.334.534	24,50	Sangat Rendah	12.029.884.780	24,50	Sangat Rendah
		BPBD	9.720.132.310	16,01	Sangat Rendah	1.537.814.419	16,01	Sangat Rendah
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.292.874.133	6,92	Sangat Rendah	5.338.520.925	6,92	Sangat Rendah
6	**1.06**	**Sosial**	**18.248.461.784**	**0**	**Sangat Rendah**	**-**	**-**	
		Dinas Sosial	18.248.461.784	0	Sangat Rendah			
B		**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**529.194.487.602**	**16,31**	**Sangat Rendah**	**107.917.458.238**	**16,78**	**Sangat Rendah**
7	**2.07**	**Tenaga Kerja**	**17.626.214.913**	**16,50**	**Sangat Rendah**	**2.909.090.843**	**16,50**	Sangat Rendah
		Dinas Tenaga Kerja	17.626.214.913	16,50	Sangat Rendah	2.909.090.843	16,50	Sangat Rendah
8	**2.08**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**13.968.956.821**	**26,00**	**Sangat Rendah**	**3.180.448.520**	**22,77**	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.968.956.821	26,00	Sangat Rendah	3.180.448.520	22,8%	Sangat Rendah
9	**2.09**	**Pangan**	**28.765.461.299**	**0**	**Sangat Rendah**	**-**	**-**	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.765.461.299	0	Sangat Rendah			
10	**2.10**	**Pertanahan**					**#DIV/0!**	
		Bagian Pemerintahan Setda		**0**	**Sangat Rendah**		**#DIV/0!**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
11	**2.11**	**Lingkungan Hidup**	**129.372.896.549**	**20,35**	**Sangat Rendah**	**26.323.857.830**	**20,35**	**Sangat Rendah**
		Dinas Lingkungan Hidup	129.372.896.549	20,35	Sangat Rendah	26.323.857.830	20,35	Sangat Rendah
12	**2.12**	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**16.930.103.872**	**19,51**	**Sangat Rendah**	**3.302.961.176**	**19,51**	**Sangat Rendah**
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.930.103.872	19,51	Sangat Rendah	3.302.961.176	19,51	Sangat Rendah
13	**2.13**	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**#DIV/0!**	Sangat Rendah
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda		**0**	**Sangat Rendah**		**#DIV/0!**	Sangat Rendah
		Bagian Pemerintahan Setda		**0**	**Sangat Rendah**		**#DIV/0!**	Sangat Rendah
14	**2.14**	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**13.404.995.381**	**9,42**	**Sangat Rendah**	**2.200.772.537**	**16,42**	**Sangat Rendah**
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.404.995.381	9,42	Sangat Rendah	2.200.772.537	16,42	Sangat Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
15	**2.15**	**Perhubungan**	**142.232.344.377**	**16,42**	**Sangat Rendah**	**23.584.531.126**	**16,58**	**Sangat Rendah**
		Dinas Perhubungan	142.232.344.377	16,42	Sangat Rendah	23.584.531.126	16,58	Sangat Rendah
16	**2.16**	**Komunikasi dan Informatika**	**24.774.571.988**	**23,34**	**Sangat Rendah**	**5.782.974.357**	**23,34**	**Sangat Rendah**
		Dinas Komunikasi dan Informatika	24.774.571.988	23,34	Sangat Rendah	5.782.974.357	23,34	Sangat Rendah
17		Statistik	**21.697.071.988**	**26,60**	**Sangat Rendah**	**5.770.608.257**	**26,60**	**Sangat Rendah**
		Dinas Komunikasi dan Informatika	21.697.071.988	26,60	Sangat Rendah	**5.770.608.257**	26,60	Sangat Rendah
18		**Persandian**	**3.077.500.000**	**0,40**	**Sangat Rendah**	**12.366.100**	**0,40**	**Sangat Rendah**
		Dinas Komunikasi dan Informatika	3.077.500.000	0,40	Sangat Rendah	12.366.100	0,40	Sangat Rendah
19	**2.17**	**Koperasi dan UKM**	**1.293.996.200**	**0,50**	**Sangat Rendah**	**6.450.000**	**0,50**	**Sangat Rendah**
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.293.996.200	0,50	Sangat Rendah	6.450.000,00	0,5	Sangat Rendah
20	**2.18**	**Penanaman Modal**	**17.131.717.191**	**17,31**	**Sangat Rendah**	**2.965.120.598**	**17,31**	**Sangat Rendah**
		DPMPTSP	17.131.717.191	17,31	Sangat Rendah	2.965.120.598	17,31	Sangat Rendah
21	**2.19**	**Kepemudaan dan Olah Raga**	**75.972.458.191**	**34,54**	**Sangat Rendah**	**26.240.454.787**	**34,54**	**Sangat Rendah**
		Dinas Pemuda dan Olahraga	75.972.458.191	34,54	Sangat Rendah	26.240.454.787	34,54	Sangat Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
22	**2.22**	**Kebudayaan**	**12.618.012.689**	**17,67**	**Sangat Rendah**	**2.678.482.440**	**21,23**	**Sangat Rendah**
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.618.012.689	17,67	Sangat Rendah	**2.678.482.440**	17,67	Sangat Rendah
23	**2.23**	**Perpustakaan**	**500.000.000**	**2,42**	**Sangat Rendah**	**12.112.500**	**2,42**	**Sangat Rendah**
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	500.000.000	2,42	Sangat Rendah	12.112.500	2,42	Sangat Rendah
24	**2.24**	**Kearsipan**	**9.828.186.143**	**29,99**	**Sangat Rendah**	**2.947.227.167**	**29,99**	**Sangat Rendah**
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.828.186.143	29,99	Sangat Rendah	2.947.227.167	29,99	Sangat Rendah
C		**Urusan Pilihan**	**48.523.500.015**	**12,58**	**Sangat Rendah**	**3.974.905.284**	**#DIV/0!**	
25	**3.25**	**Kelautan dan Perikanan**	**28.765.461.299**	**0**		**-**	**-**	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.765.461.299	0				
26	**3.26**	**Pariwisata**	**2.541.624.530**	**0,36**	**Sangat Rendah**	**9.098.000**	**0,36**	**Sangat Rendah**
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.541.624.530	0,36	Sangat Rendah	9.098.000	0.36	Sangat Rendah
27	**3.27**	**Pertanian**	**-**	**0**		**-**	**#DIV/0!**	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0				
28	**3.30**	**Perdagangan**	**566.658.308**	**40,08**	**Sangat Rendah**	**227.139.691**	**40,08**	**Sangat Rendah**
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	566.658.308	40,08	Sangat Rendah	227.139.691,00	40,08	Sangat Rendah
29	**3.31**	**Perindustrian**	**16.649.755.878**	**22,45**	**Sangat Rendah**	**3.738.667.593**	**22,45**	**Sangat Rendah**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	16.649.755.878	22,45	Sangat Rendah	3.738.667.593,00	22,45	Sangat Rendah
D		**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**282.746.602.429**	**10,17**	**Sangat Rendah**	**60.947.619.524**	**21,74**	**Sangat Rendah**
30	**4.01**	**Sekretariat Daerah**	**124.640.421.504**	**0,17**	**Sangat Rendah**	**29.041.835.977**	**23,30**	**Sangat Rendah**
		Bagian Administrasi Pembangunan	306.404.600	21,24%	Sangat Rendah	43.900.248	14,33%	Sangat Rendah
		Bagian Umum	86.716.213.608	11,93%	Sangat Rendah	20.034.994.841	23,10%	Sangat Rendah
		Bagian Organisasi	602.711.900	20,08%	Sangat Rendah	96.718.030	16,05%	Sangat Rendah
		Bagian Perekonomian	422.231.700	6,97%	Sangat Rendah	30.498.600	7,22%	Sangat Rendah
		Bagian Prokompim	2.062.470.400	22,32%	Sangat Rendah	420.666.804	20,40%	Sangat Rendah
		Bagian PBJ	983.019.589	11,65%	Sangat Rendah	109.304.230	11,12%	Sangat Rendah
		Bagian Hukum dan HAM	2.425.119.800	32,06%	Sangat Rendah	672.564.002	27,73%	Sangat Rendah
		Bagian Pemerintahan Setda	1.789.639.203	10,26%	Sangat Rendah	266.186.798	14,87%	Sangat Rendah
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	29.332.610.704	14,70%	Sangat Rendah	7.367.002.424	25,12%	Sangat Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
31	**4.02**	**Sekretariat DPRD**	**158.106.180.925**	**20,18**	**Sangat Rendah**	**31.905.783.547**	**20,18**	**Sangat Rendah**
		Sekretariat DPRD	158.106.180.925	20,18	Sangat Rendah	31.905.783.547	20.18	Sangat Rendah
E		**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**181.151.945.440**	**18,68**	**Sangat Rendah**	**18.936.097.952**	**11,68**	**Sangat Rendah**
32	**5.01**	**Perencanaan**	**17.706.634.299**	**22**	**Sangat Rendah**	**3.898.641.512**	**22,02**	**Sangat Rendah**
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.706.634.299	22,02	Sangat Rendah	**3.898.641.512**	22,02	Sangat Rendah
33	**5.02**	**Keuangan**	**134.596.021.701**	**20,41**	**Sangat Rendah**	**10.777.038.586**	**8,01**	**Sangat Rendah**
		Badan Pendapatan Daerah	51.573.857.351	8,01	Sangat Rendah	3.683.491.750	8,01	Sangat Rendah
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	83.022.164.350	32,8	Sangat Rendah	7.093.546.836	8,54	Sangat Rendah
34	**5.03**	**Kepegawaian**	**27.412.853.840**	**15,48**	**Sangat Rendah**	**4.243.176.854**	**15,48**	**Sangat Rendah**
		BKPSDM	27.412.853.840	15,48	Sangat Rendah	4.243.176.854	15,48	Sangat Rendah
35	**5.05**	**Penelitian dan Pengembangan**	**1.436.435.600**	**17**	**Sangat Rendah**	**17.241.000**	**1,20**	**Sangat Rendah**
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.436.435.600	17	Sangat Rendah	17.241.000	16,81	Sangat Rendah
F		**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**		**23,48**	**Sangat Rendah**		**23,48**	**Sangat Rendah**
36	**6.01**	**Pengawasan**		**23,48**	**Sangat Rendah**		**23,48**	**Sangat Rendah**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Inspektorat	26.602.770.936	23,48	Sangat Rendah	6.247.068.434	23,48	Sangat Rendah
G		**Unsur Kewilayahan**	**236.541.932.516**	**19,03**	**Sangat Rendah**	**50.339.015.007**	**21,28**	**Sangat Rendah**
37	**7.01**	**Kecamatan**	**236.541.932.516**	**19,03**	**Sangat Rendah**	**50.339.015.007**	**21,28**	**Sangat Rendah**
		Kecamatan Bogor Utara	29.916.540.054	5,40	Sangat Rendah	7.712.685.768	5,40	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Selatan	54.120.033.897	19,00	Sangat Rendah	10.355.722.521	19,00	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Timur	25.559.068.168	19,79	Sangat Rendah	5.058.408.956	19,79	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Barat	51.639.193.827	24,96	Sangat Rendah	10.364.643.141	20,07	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Tengah	35.321.105.620	24,00	Sangat Rendah	8.532.885.279	24,00	Sangat Rendah
		Kecamatan Tanah Sareal	39.985.990.950	21,00	Sangat Rendah	8.314.669.342	21,00	Sangat Rendah
H		**Unsur Pemerintahan Umum**	**47.544.182.076**	**37,5**	**Sangat Rendah**	**17.828.685.622**	**37,50**	**Sangat Rendah**
38		**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**47.544.182.076**	**37,5**	**Sangat Rendah**	**17.828.685.622**	**37,50**	**Sangat Rendah**
		Badan Kesbangpol	47.544.182.076	37,5	Sangat Rendah	17.828.685.622	37,50	Sangat Rendah

Sumber: Bapperida Kota Bogor, diolah 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kota Bogor, capaian kinerja sebesar 18,62% dan capaian keuangan sebesar 19,71% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp480.809.264.394. Capaian kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 11,23% dan capaian keuangan sebesar 12,68% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp214.618.414.333, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 16,31% dan capaian keuangan sebesar 16,78% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp107.917/458.238, Urusan Pilihan sebesar 12,58% dan capaian keuangan sebesar 12,58% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.974.905.284, Unsur Pendukung Urusan Pemerintah sebesar 10,17% dan capaian keuangan sebesar 21,74% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp60.947.619.524, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 18,68% dan capaian keuangan sebesar 11,68% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp18.936.097.952, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar 23,48% dan capaian keuangan sebesar 23,48% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.247.068.434, Unsur Kewilayahan sebesar 19,03% dan capaian keuangan sebesar 21,28% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 50.339.015.007, dan Unsur Pemerintahan Umum sebesar 37,5% dan capaian keuangan sebesar 37,50% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.828.685.662.

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan I tahun 2025, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaaan program dan kegiatan/sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan
2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik

3. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan

B. Faktor Penghambat

1. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
2. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu
3. Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan
4. Pada triwulan I, baru sebagian kecil kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan sebagian yang lain baru pada tahap persiapan, atau tahap awal pengerjaan.
5. Dalam pengisian form evaluasi, masih ada perangkat daerah yang kurang memahami detail pengisian form evaluasi yang tepat.

C. Tindak Lanjut

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan I tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada triwulan atau RKPD berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
2. Melakukan FGD monev di Bidang-Bidang Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

4. Diklat teknis terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
5. Melakukan perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa di awal tahun.

Memanfaatkan sistem informasi yang memudahkan perangkat daerah mengisi evaluasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Pada bagian ini menyajikan capaian, tantangan dan proyeksi baik perekonomian maupun keuangan daerah. Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2025, capaian dan tantangan perekonomian dan keuangan merupakan pencapaian sampai tahun 2024 dan triwulan I Tahun 2025, sedangkan proyeksi perekonomian dan keuangan daerah merupakan hasil penyesuaian terhadap target RKPD 2025 berdasarkan capaian baik tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2025.

3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor untuk tahun 2024, mempertimbangkan amanat Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 serta kondisi perekonomian tahun 2024 dan awal tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bogor tahun 2025 memperhatikan pula kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Global.

3.1.1. KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BOGOR

Pembangunan ekonomi Kota Bogor dapat ditentukan melalui berbagai macam aspek daya saing ekonomi masyarakat yang dapat diukur melalui indikator makro ekonomi yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor.
2. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor.
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita) Kota Bogor.
4. Tingkat Inflasi daerah Kota Bogor.
5. Pemerataaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini rasio).
6. Penurunan Angka Kemiskinan Kota Bogor.
7. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Bogor.

Berikut ini adalah capaian kinerja indikator ekonomi Kota Bogor selama kurun waktu 2018-2023.

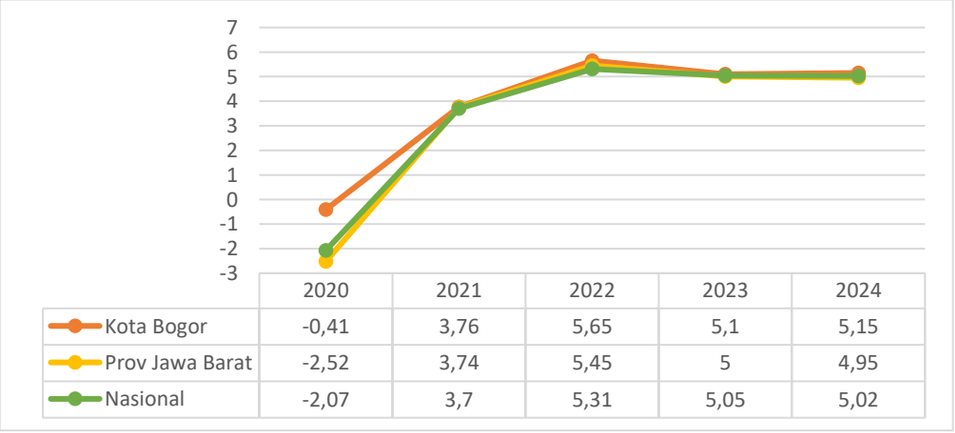
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bogor tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 38,96 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1,91 triliun dari 37,05 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,10 persen.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.8**
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	-0,41	3,76	5,65	5,1	5,15
Prov Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45	5	4,95
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Dari grafik 3.1 diatas dapat dilihat bahwa petumbuhan LPE Kota Bogor lebih baik dari LPE Nasional maupun Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Besarnya peranan berbagailapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB Atas Dasar Harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2019-2024 diperlihatkan pada Tabel 3.1.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.6**
PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp) Tahun 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	245,16	258,71	267,41	275,95	279,23
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	6.015,39	6.283,63	6.603,00	6.864,58	7.032,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	725,41	813,13	893,01	869,60	844,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36,05	39,77	42,44	47,06	51,13
F	Konstruksi	3.604,70	3.659,26	3.672,50	4.094.47	4.142,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.210,45	6.379,30	6.722,52	6.973,02	7.191,20
H	Transportasi dan Pergudangan	3.850,16	3.961,62	4.352,35	4.744,10	5.322,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.530,33	1.550,68	1.734,17	1.825,36	1.960,93
J	Informasi dan Komunikasi	3.047,81	3.182,27	3.344,93	3.563,35	3.951,15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.214,26	2.245,47	2.223,68	2.246,72	2.327,49
L	Real Estat	719,17	821,06	877,63	896,5	957,85
M,N	Jasa Perusahaan	617,58	598,73	666,39	673,10	693,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	721,13	746,40	730,75	745,61	807,29
P	Jasa Pendidikan	1.041,70	1.096,42	1.195,60	1.241,04	1.265,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	485,70	540,88	595,55	606,70	621,83
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.097,74	1.195,11	1.336,93	1.388,12	1.514,21
Produk Domestik Regional Bruto		32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67

**Angka Sementara/ Preliminary Figures*
***Angka sangat sementara/ Very preliminary figures*
Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Dari tabel 3.1 diatas terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 38,96 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 1,9 triliun dari tahun 2023, lebih baik dibandingkatan kenaikan tahun sebelumnya yaitu 1,8 triliun. Dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tersebutlah didapat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yaitu sebesar 5,15 persen, angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,10 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhair (2020-2024) struktur perekonomian Kota Bogor didominiasi oleh 5(lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi danPergudangan; Konstruksi; serta JasaKeuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 19,09 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,39 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,04 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,18 persen serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,75 persen. Sementara peranan lapangan usaha lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 6 (enam) persen.

Dari lima kategori lapangan usaha tersebut yang terus meningkat peranannya terhadap perekonomian Kota Bogor dalam kurun waktu lima tahun terahir adalah pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Peranan Beberapa lapangan usaha berubah dikarenakan adanya wabah Covid-19 sepanjang tahun2020. Namun tetap tidak merubah distribusi perekonomian secara signifikan. Peranan program penguatan sektor UMKM terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal tersebut menjadikan sektor industri pengolahan tetap menjadi urutan kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Jika dilihat dari nilai PDRB masing-masing sektor usaha, maka hampir semua sektor usaha mengalami kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Hanya satu sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Pengadaan listrik & gas. Laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor ADHK dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.7**
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	5,53	3,36	3,20	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	-0,83	4,46	5,08	3,96	2,45
D	Pengadaan listrik dan gas	-5,99	12,09	9,82	-2,62	-2,86
E	Pengadaan air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,16	10,32	6,72	10,87	8,65
F	Kontruksi	-5,86	1,51	0,36	11,49	1.17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,92	2,72	5,38	3,73	3,13
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,12	2,90	9,86	9,00	12,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	1,33	11,83	5,26	7,43
J	Informasi dan Komunikasi	35,23	4,41	5,11	6,53	10,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,22	1,41	-0,97	1,04	3,59
L	Real Estate	-2,36	14,17	6,89	2,16	6,84
M, N	Jasa Perusahaan	-10,63	-3,05	11,30	1,01	3,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,79	3,50	-2,10	2,03	8,27

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
P	Jada Pendidikan	7,63	5,25	9,05	3,80	2,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	11,36	10,11	1,87	2,49
R, S, T, U	Jasa lainnya	-3,01	8,87	11,87	3,83	9,08
Produk Domestik Regional Bruto		**-0,41**	**3,76**	**5,65**	**5,10**	**5,15**

*Angka sementara /Preliminary Figures
**Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures
Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,86 persen, lebih menurun dari tahun sebelumnya. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan, tumbuh 12,20%, yang diikuti oleh sektor komunikasi dan informasi, jasa lainnya, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sedangkan sektor konstruksi yang tumbuh terbesar dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sektor yang selalu stabil mengalami pertumbuhan adalah sektor informasi dan komunikasi.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.8**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta)
Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022*	2023**	2024
Konsumsi Rumah Tangga	45.013,83	47.301,11	52.212,39	56.362,06	61.788,67
Konsumsi LNPRT	765,21	788,75	860,78	958,04	1.090,26
Konsumsi Pemerintah	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01	5.607,49
PMTB	14.605,10	16.435,04	17.441,68	19.739,33	21.076,37
Perubahan Inventori	855,79	-529,40	-18,40	7,44	23,68
Net (Expor Impor)	(20.280,18)	(20.613,76)	(22.578,58)	(25.584,13)	(28.534,78)
Total PDRB	**45.911,86**	**48.325,64**	**52.914,60**	**57.003,76**	**61.051,67**

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

PDRB Harga Berlaku Menurut Pengeluaran adalah pendekatan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan total pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

wilayah dalam periode tertentu (biasanya setahun), dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan (belum disesuaikan inflasi). Komponen PDRB menurut Pengeluaran:

a. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga: Jika daya beli masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga akan tumbuh, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.
b. Kebijakan Fiskal Pemerintah: Peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
c. Investasi dan Modal: Jika tingkat investasi tinggi, maka kapasitas produksi meningkat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
d. Perdagangan Antarwilayah dan Ekspor: Kinerja ekspor daerah, baik dalam bentuk barang maupun jasa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota Bogor tahun 2020–2024, dapat dilihat bahwa struktur pengeluaran masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, yang terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp45.013,83 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp61.788,67 miliar pada tahun 2024. Komponen ini menjadi motor utama penggerak perekonomian Kota Bogor.

Konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT) dan konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan stabil, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp14.605,10 miliar di 2020 menjadi Rp21.475,37 miliar di 2024, menandakan geliat investasi di sektor-sektor produktif. Sebaliknya, Sebaliknya, Net Ekspor Barang dan Jasa terus mencatat nilai negatif dan cenderung semakin dalam, dari Rp-20.280,18 miliar di 2020 menjadi Rp-28.534,78 miliar di 2024. Ini menunjukkan ketergantungan Kota Bogor terhadap barang dan jasa dari luar wilayahnya, yang menjadi tantangan besar dalam memperkuat sektor produksi lokal.

Secara umum, PDRB Kota Bogor tahun 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kenaikan terbesar masih ditopang oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

konsumsi rumah tangga yang stabil dan kuat, serta peningkatan investasi (PMTB) yang cukup signifikan. Namun, adanya kontribusi negatif dari net ekspor mengindikasikan ketergantungan ekonomi Kota Bogor terhadap pasokan dari luar daerah, yang bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Oleh karena itu, selain menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi, diperlukan strategi untuk menguatkan sektor produksi lokal agar ketergantungan impor bisa ditekan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Selain atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.9**
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar) Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	29.733,52	30.659,69	32.438,61	33.546,74	34.788,98
Konsumsi LNPRT	552,89	563,21	589,91	626,92	701,69
Konsumsi Pemerintah	3.094,63	3.011,38	2.983,11	3.274,02	3.191,92
PMTB	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00	12.852,69
Perubahan Inventori	519,63	-300,58	-10,40	4,05	12,6
Net (Expor Impor)	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53	-12.777,35	-12.583,20
PDRB	**32.162,74**	**33.372,48**	**35.258,87**	**37.055,36**	**38.964,67**

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas mengenai PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB dengan tren yang terus meningkat dari Rp29.733,52 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp34.788,96 miliar pada tahun 2024. Komponen lain yang menunjukkan pertumbuhan stabil adalah konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT) dan konsumsi pemerintah, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

tangga. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan investasi yang lebih aktif dalam perekonomian. Namun, net ekspor barang dan jasa terus mengalami deficit sepanjang periode tersebut, tercermin dari nilai negatif yang semakin besar, yang mengindikasikan bahwa Kota Bogor lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor.

Tabel 3.4 di atas juga memperjelas pola ini dengan menunjukkan dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur PDRB, sedangkan sektor net ekspor selalu berada di area negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor masih sangat bergantung pada permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, sementara kontribusi sektor eksternal (perdagangan luar negeri) masih menjadi tantangan.

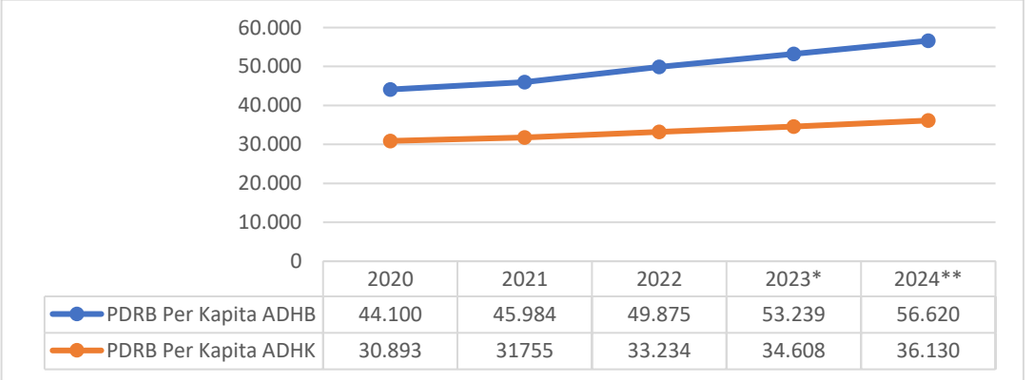
Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB Kota Bogor memperlihatkan arah pertumbuhan yang stabil berbasis konsumsi domestic dan investasi, namun memerlukan perhatian terhadap penguatan ekspor untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

3.1.1.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlahpenduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantungpada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Grafik Error! No text of specified style in document.**.9**
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHB dan ADHK Kota Bogor Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB Per Kapita ADHB	44.100	45.984	49.875	53.239	56.620
PDRB Per Kapita ADHK	30.893	31755	33.234	34.608	36.130

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 PDRB per kapita tercatat sebesar 56.62 juta rupiah. Perubahan angka PDRB per kapita yang lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran.

3.1.1.4. Pemerataaan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 9,6%, diperlihatkan di tabel 3.5.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.10**
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah) Kota Bogor Tahun 2021-2024

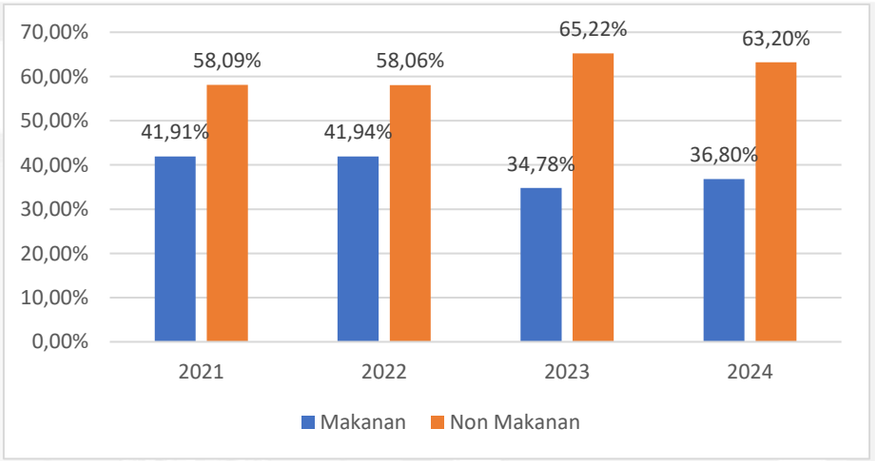
Kelompok Komoditas	2021	2022	2023	2024
Makanan	821.693	751.435	950.587	909.166
Non Makanan	1.138.861	1.040.157	1.782.683	1.561.391
Jumlah pengeluaran	**1.960.500**	**1.791.592**	**2.733.270**	**2.470.557**

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Persentase pengeluaran perkapita sebulan tahun dapat dilihat pada Grafik 3.3. dibawah ini:

Grafik Error! No text of specified style in document.**.10**
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Bogor Tahun 2021-2024

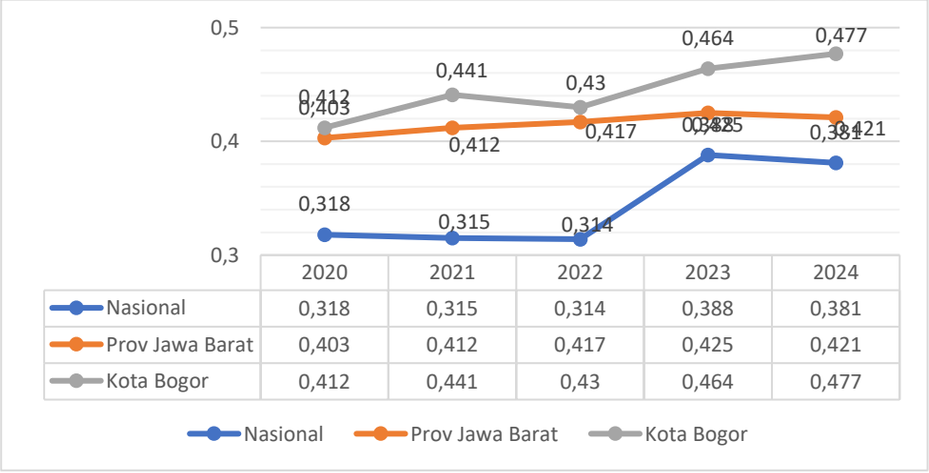


Sumber: Diolah dari data BPS, 2025

Pengeluaran makanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dapat dilihat dari angka gini rasio pada daerah tersebut. Gini rasio menggambarkan Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Nilai gini rasio Kota Bogor tergambar pada Grafik 3.4 dibawah ini.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.11**
Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,318	0,315	0,314	0,388	0,381
Prov Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421
Kota Bogor	0,412	0,441	0,43	0,464	0,477

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Gini rasio Kota Bogor kembali naik di tahun 2024 yaitu menjadi 0,477. Hal ini berarti bahwa ketimpangan di Kota Bogor kembali naik, sebagaimana juga yang terjadi pada ketimpangan di level Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang juga mengalami kenaikan di tahun 2023. Angka gini rasio Kota Bogor juga masih lebih tinggi dibandingkan nilai gini rasio Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini berarti isu mengenai ketimpangan di Kota Bogor masih perlu menjadi perhatian.

Penyebab gini rasio mengalami kenaikan:

a. **Kesenjangan Pendapatan antara Kelompok Atas dan Bawah.** Peningkatan pendapatan yang signifikan pada kelompok masyarakat atas tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin lebar.
b. **Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok.** Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali membuat kelompok masyarakat bawah semakin terhimpit, sementara kelompok atas masih mampu bertahan. Hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan.
c. **Pengurangan atau Penarikan Bantuan Sosial.** Penarikan atau pengurangan bantuan sosial pasca pandemi COVID-19 mengurangi daya beli kelompok masyarakat bawah, sementara kelompok atas tidak merasakan dampak signifikan. Hal ini memperlebar jurang ketimpangan.
d. **Urbanisasi yang Tidak Terkendali.** Tingginya arus urbanisasi ke Kota Bogor menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, namun tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan fasilitas yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian penduduk terjebak dalam kemiskinan dan memperburuk ketimpangan.

3.1.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil

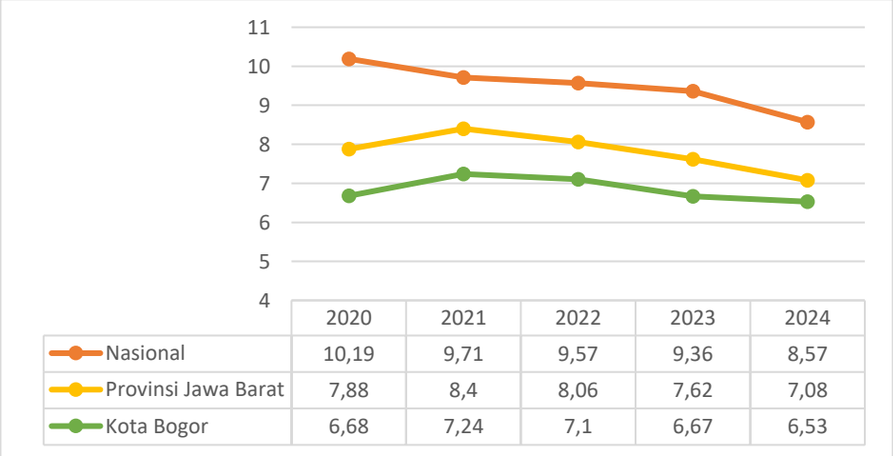
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2024 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,14 persen menjadi 6,53 persen dari tahun 2023 sebesar 6,67 persen. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2020-2024:

Grafik Error! No text of specified style in document.**.12**
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Provinsi Jawa Barat	7,88	8,4	8,06	7,62	7,08
Kota Bogor	6,68	7,24	7,1	6,67	6,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

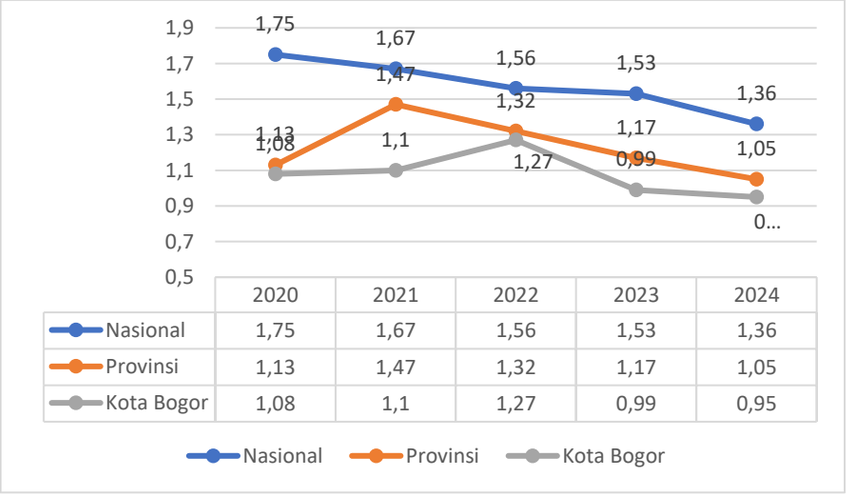
Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan Kota Bogor masih lebih baik pada tahun 2024.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambaran mengenai Tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Bogor dapat dilihat pada Grafik 3.6 dibawah ini:

Grafik Error! No text of specified style in document.**.13**
Persentase indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2020 – 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa tingkat kedalaman kemiskinan Kota Bogor tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dari 0,99 di tahun 2023 menjadi 0,95 di tahun 2024. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung mendekati garis kemiskinan.

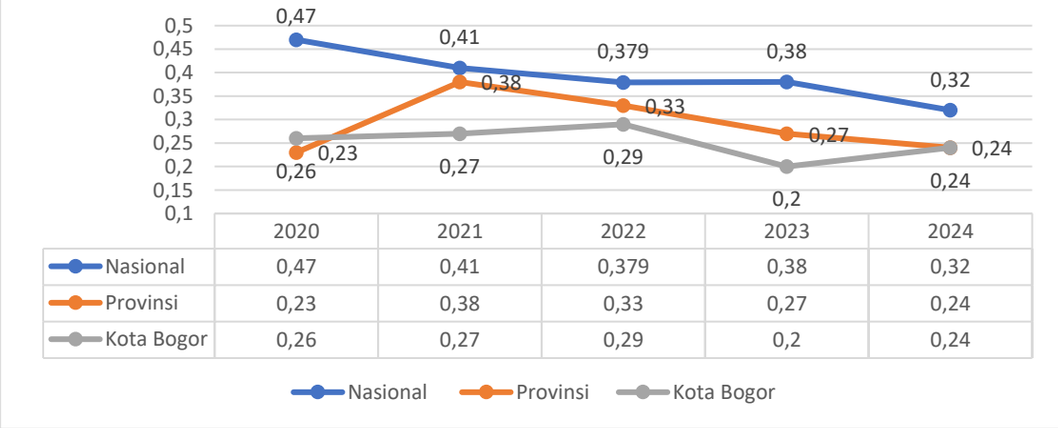
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota bogor mencapai 0,24, setelah turun di tahun sebelumnya. Perkembangan P2 Kota Bogor bersifat fluktuatif

Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, Sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Indeks Keparahan kemiskinan Kota Bogor dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik Error! No text of specified style in document.**.14**
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020 – 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,47	0,41	0,379	0,38	0,32
Provinsi	0,23	0,38	0,33	0,27	0,24
Kota Bogor	0,26	0,27	0,29	0,2	0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik diatas menggambarkan mengindikasikan bahwa rata-rata penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Bogor cenderung makin mendekati garis. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2023 masih berada di bawah indeks kedalaman kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat.

3.1.1.6. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang-barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisilain.

Indeks Harga Konsumen (IHK) indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman/restoran dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berikut laju inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.11**
IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d), dan *Year on Year* (y-on-y) Kota Bogor menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100) Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi mtm Desember 2024 [1] (%)	Tingkat Inflasi ytd Desember 2024 [2] (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2024 [3] (%)	Andil Infasi mtm Desember 2024 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2024 (%)
Umum (Headline)	**105,56**	**107,41**	**0,49**	**1,75**	**1,75**	**0,49**	**1,75**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	108,46	111,01	1,49	2,35	2,35	0,40	0,62
Pakaian dan Alas Kaki	108,72	110,35	0,01	1,50	1,50	~0	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,37	104,75	-0,01	0,36	0,36	~0	0,08
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,22	103,45	-0,03	0,22	0,22	~0	0,01
Kesehatan	101,97	104,76	0,76	2,74	2,74	0,02	0,008
Transportasi	109,12	109,81	0,01	0,63	0,63	~0	0,07
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,12	101,50	~0	0,38	0,38	~0	0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,38	102,75	0,17	1,35	1,35	~0	0,02
Pendidikan	102,38	107,08	~0	4,59	4,59	~0	0,24
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,15	103,37	0,27	1,19	1,19	0,03	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,49	116,49	0,76	8,37	8,37	0,04	0,42

Keterangan:
[1] Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024.
[2] Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
[3] Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
~0 = Data sangat kecil/mendekati nol

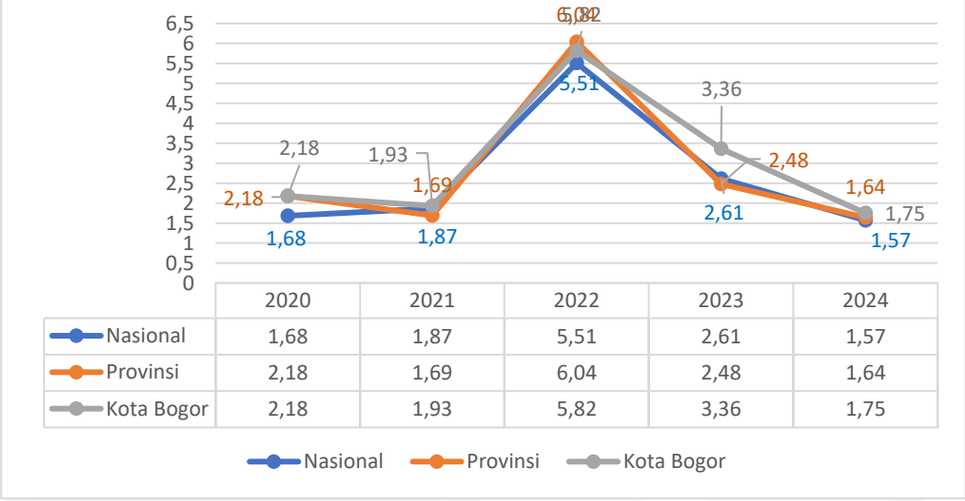
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Pada tahun 2024, Kota Bogor mengalami Inflasi *year on year* (YoY) Desember 2024 sebesar 1,75 persen, menurun dari tahun 2023, dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 119,42 pada Desember 2023 menjadi 107,41 pada Desember 2024. Tingkat inflasi *Month to Month* (mtm) April 2025 sebesar 1,07 persen.

Inflasi tertinggi YoY Desember 2024 dialami oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yaitu sebesar 8,37 persen, diikuti oleh pendidikan sebesar 4,59 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terkecil 0,22 persen. Perkembangan tingkat inflasi Kota Bogor tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik Error! No text of specified style in document.**.15**
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Provinsi	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64
Kota Bogor	2,18	1,93	5,82	3,36	1,75

Nasional Provinsi Kota Bogor

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021, angka inflasi cenderung turun baik di tingkat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan juga Nasional. Kemudian di tahun 2022, ketiganya sempat mengalami kenaikan yang signifikan hingga di tahun tersebut, inflasi di Kota Bogor mencapai angka 5,82 persen. Di tahun 2023, inflasi Kota Bogor dapat dikendalikan hingga kembali turun di angka 3,36 persen. Demikian juga dengan inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang juga mengalami penurunan. Namun demikian, angka inflasi Kota Bogor pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

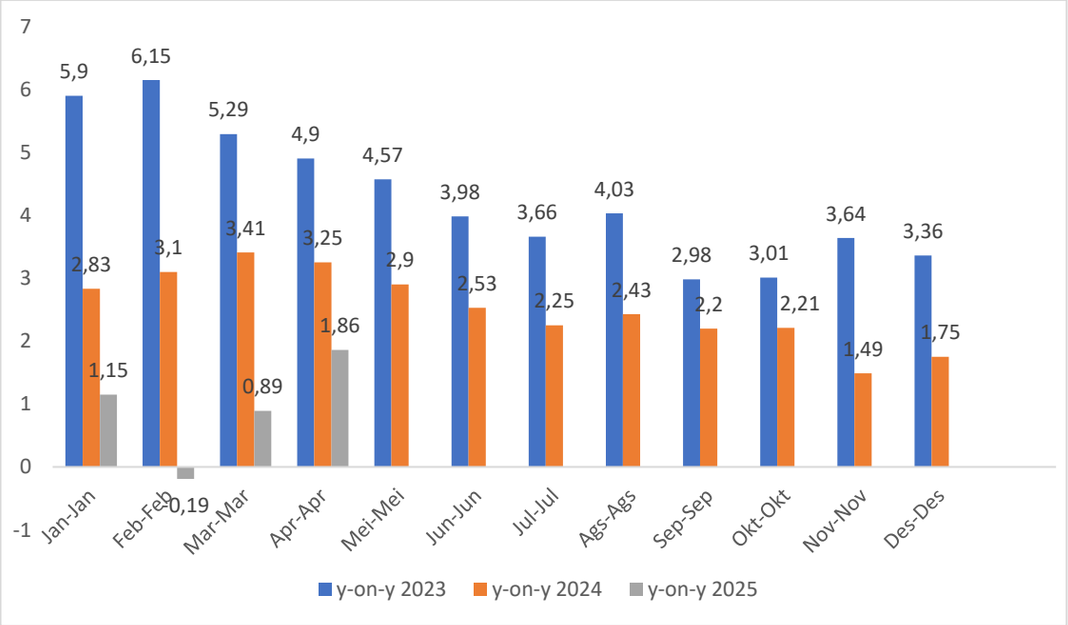
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pada bulan Februari 2025 terjadi deflasi sebesar -0,19 persen. Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan harga yang cukup signifikan pada Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami deflasi sebesar 9,09 persen. Namun sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi y-on-y, yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,99 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,67 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,73 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 2,12 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,87 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,26 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,34 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 4,61 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,31 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesar 10,43 persen.

Pada Februari 2025, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil deflasi y-on-y terdalam, yaitu sebesar 2,03 persen. Namun sebagian besar kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y dengan andil terbesar oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,53 persen diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,25 persen.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.16**
Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Kota Bogor 2023-2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id



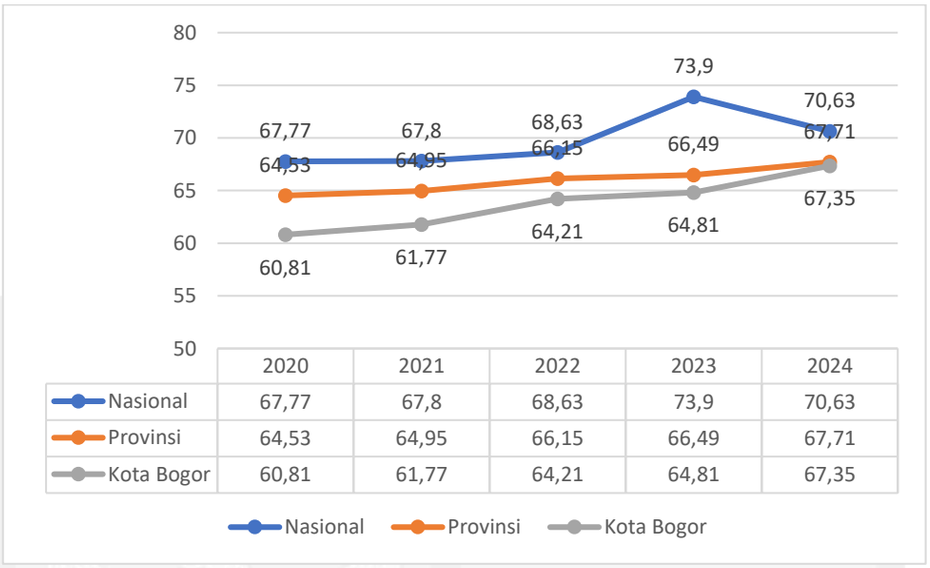
Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

3.1.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nilai TPAK di Kota Bogor pada Agustus 2024 mencapai 67,35 persen. Artinya, 67 sampai 68 orang dari 100 penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Dikatakan aktif secara ekonomi jika mereka bekerja atau termasuk dalam kategori pengangguran. TPAK Kota Bogor secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, pada tahun 2023 meningkat 0,6 persen poin dan tahun 2024 secara signifikan meningkat 2,54 persen poin.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.17**
TPAK Kota Bogor Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

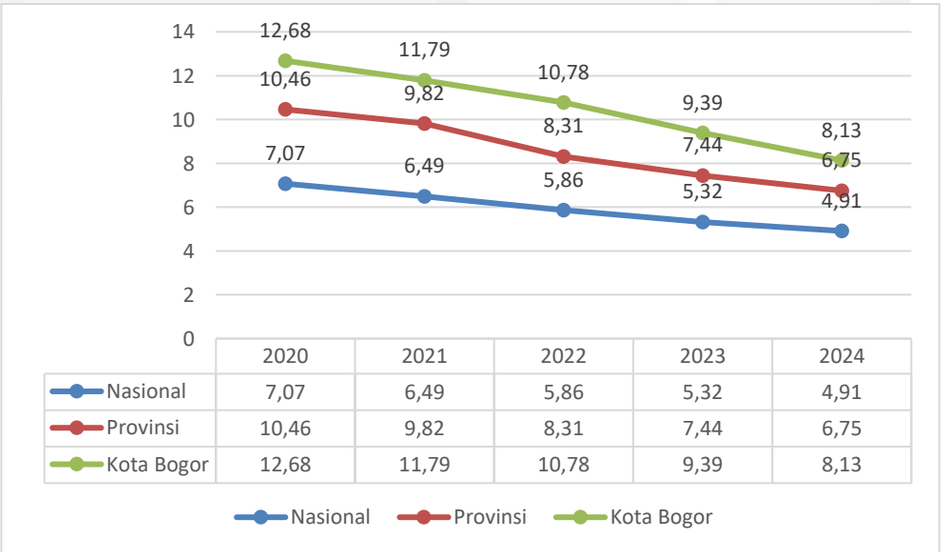


	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	67,77	67,8	68,63	73,9	70,63
Provinsi	64,53	64,95	66,15	66,49	67,71
Kota Bogor	60,81	61,77	64,21	64,81	67,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Hal lain yang dilihat dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka merupakan jumlah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.18**
TPT Kota Bogor Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Provinsi	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pada kurun waktu 2020 – 2024, ekonomi Kota Bogor rata – rata tumbuh di atas 5 persen. Seiring semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi dan kondisi sudah kembali normal, tingkat pengangguran terbuka 2023 terus menurun ke angka 9,39 persen dan menjadi 8,13 persen pada tahun 2024.

Data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat memiliki korelasi dengan di Kota Bogor, hal ini karena kenaikan dan penurunannya selaras. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor salah satunya disebabkan oleh pengaruh kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kota Bogor. Karakteristik Kota Bogor yang tidak memungkin untuk adanya pengembangan industri-industri besar yang padat modal seperti daerah kawasan industri besar lain yaitu Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi juga menjadi faktor adanya pengangguran terbuka di Kota Bogor. Kondisi ini menjadikan penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas investasi menjadi terbatas, apalagi jika jenis investasinya adalah investasi yang padat modal dan bukan padat karya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan industri padat karya yang mampu memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, serta perlunya mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainya seperti peningkatan agrobisnis dan agro industri karena potensi geografi Kota Bogor yang cukup baik dalam pengembangan pertanian. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menjadi penggerak perkembangan pembangunan daerah, yang juga membuka peluang perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024

3.1.2.1. Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Saat ini kondisi ekonomi global sedang diuji dengan adanya kebijakan baru dan perubahan mendasar yang mempengaruhi geopolitik dunia. Isu terbaru yang membuat guncangan dalam ekonomi global adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperkenalkan *tarif trump* atau tarif resiprokal. Tarif resiprokal atau timbal balik ini merupakan kebijakan perdagangan di mana suatu negara menetapkan bea masuk terhadap negara lain yang setara atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

sebanding dengan tarif yang ditetapkan oleh negara tersebut terhadap negara pertama. Atau dengan kata lain kondisi suatu negara yang menerapkan suatu tarif impor terhadap barang dari negeri lain dengan tingkat yang sama seperti tarif yang dikenakan oleh negara tersebut pada barang ekspornya.

Berdasarkan laporan IMF dalam (*World Economic Forum*) proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan pada angka 3,2% walaupun sedikit meningkat dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 3,1%. Pelemahan ekonomi global dipengaruhi oleh kondisi ekonomi China dan Amerika, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, dampak dari perubahan iklim serta ketidakpastian suku bunga global. Kondisi ini kemungkinan akan diperburuk dengan kebijakan Trump yang menerapkan kebijakan perdanganan dengan tarif resiprokal.

Perekonomian Indonesia yang diprediksi tumbuh pada 5,2% pada tahun 2025 sesuai asumsi makro APBN, walaupun berdasarkan proyeksi *World Bank* ada pada 5,1%, bisa terkoreksi lebih rendah jika kondisi ekonomi global semakin kacau dengan adanya kebijakan tarif Trump tersebut.

Kondisi Geopolitik Dunia

Kondisi dunia saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Ada tendensi pengaruh dari lembaga multilateral semakin melemah sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memperbaiki tatanan dunia. Lembaga multilateral seperti *Group of Twenty* (G20), *United Nations, World Trade Organization, The World Bank* serta *International Monetary Fund* (IMF), tidak berperan optimal sehingga kebijakan yang tadinya melalui sistem multilateral kemudian mengarah kepada unilateral. Padahal lembaga multilateral diharapkan mampu untuk menstabilkan keuangan global, membantu mengatasi tantangan transnasional, memfasilitasi kerjasama internasional dan juga menguatkan bantuan kemanusiaan.

Kemunduran kerjasama ekonomi ditandai dengan pertarungan dua kelompok negara besar yang tergabung dalam G7 dan BRICS. G7 bertujuan untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan berbasis aturan, sementara BRICS diprakarsai untuk meningkatkan peran negara berkembang dalam lembaga keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

global. Pertarungan pengaruh dua kelompok ini menyebabkan tidak adanya konsensus dalam kebijakan ekonomi global. Selain itu, saat ini yang terjadi di dunia internasional adalah kebijakan *inward looking* dalam rangka proteksionsime yaitu kebijakan ekonomi yang membatasi impor dan melindungi industri dalam negeri yang bertujuan untuk melindungi bisnis dalam negeri dari persaingan asing, mempertahankan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

Melemahnya sistem multilateral juga berakibat pada runtuhnya *rulesbased trading system.* Kebijakan yang berkembang bertumpu pada praktik *friendshoring* dan *nearshoring* yaitu strategi perdagangan yang mengalihkan rantai pasokan ke negara-negara sekutu atau mitra dagang yang dianggap sebagai "teman", kemudian munculnya blok perdagangan berbasis kawasan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara yang jadi anggotanya, serta kebijakan unilateral yang pada akhirnya memunculkan retaliasi dari negara pesaing.

Kebijakan ekonomi Trump dan tindakan responsif Indonesia

Pada periode kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dilantik pada tanggal 20 Januari 2025, Trump langsung membuat gebrakan yang sepertinya lebih tepat sebagai 'ancaman' bagi negara-negara lain. Trump mengeluarkan *executive order* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di dunia Internasional. Salah satu *executive order* yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2025 yaitu *Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits*. Perintah eksekutif ini mengatur impor dengan tarif timbal balik untuk memperbaiki praktek perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan barang Amerika Serikat yang besar dan berkelanjutan. Perintah eksekutif ini menyatakan keadaan darurat nasional akibat defisit perdagangan barang AS yang terus menerus dan menekankan defisit yang telah melemahkan manufaktur AS, merusak rantai pasokan dan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi ini, Trump akan mengenakan tarif timbak balik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

pada impor untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan dan mendorong manufaktur dalam negeri AS.

Kebijakan Trump menimbulkan gejolak dari berbagai negara, sehingga muncul retaliasi. Trump sendiri menyatakan bahwa tanggal 2 April 2025 sebagai *Liberation Day* sebagai tanda hari penetapan serangkaian tarif impor baru.

Gambar Error! No text of specified style in document.**.1**
Timeline Kebijakan Tarif AS dan Retalisasi Tahun 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

Trump menerapkan tarif baru yang berbeda-beda pada tiap negara mitra yang didasarkan pada angka defisit neraca perdagangan dengan setiap negara mitra. Indonesia sendiri dikenai kenaikan tarif bea masuk impor (BMI) baru sebesar 32 persen. Pengenaan tarif ini menimbulkan beragam reaksi dari berbagai negara. Terdapat berbagai gejolak yang terjadi misalnya pasar global yang anjlok sehingga mendorong alih investasi ke *safe haven assets*, adanya tekanan di pasar uang karena investor khawatir dengan perang dagang yang terjadi dan tekanan harga berbagai komoditas.

Akibat dari kebijakan tarif Trump ini, terdapat beberapa negara yang merespon dengan kebjakan retaliasi (misalnya Tiongkok, Uni Eropa dan Kanada), sedangkan negara lainnya misal India, Jepang, Malaysia, Singapura merespon dengan pendekatan diplomasi atau negoisasi. Indonesia sendiri merespon tarif Trump dengan kebijakan negoisasi untuk penurunan tarif.

Pemerintah kemudian menyusun strategi untuk merespon tarif Trump dengan negosiasi agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih buruk di dalam negeri dan mempengaruhi pertumbuhuhan ekonomi. Dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (dimuat dalam harian Kompas), langkah yang diambil antara lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

mengedepankan diplomasi dan tidak mengambil langkah retaliasi, perlindungan pada industri padat karya, melakukan diversifikasi pasar ekspor, menjaga stabilitas fiskal, pelibatan pelaku usaha domestik untuk penyusunan kebijakan inklusif dan responsif serta pemetaan produk terdampak dan yang dikecualikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengamankan posisi Indonesia dalam neraca perdagangan dengan AS.

Dari informasi terakhir, tim negoisasi Indonesia yang diwakili oleh Menko Perekonomian, menghasilkan beberapa kesepakatan. Terdapat 10 kesepatakan hasil negoisasi Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai dampak dari tarif Trump yang dikenakan ke Indonesia. Diantara hasil negoisasi yaitu peningkatan impor beberapa komoditas dari AS seperti LPG, minyak mentah (*crude oil*) dan gasoline, kemudian memberikan fasilitas kemudahan perizinan serta insentif bagi Perusahaan AS di Indonesia, menawarkan peluang Kerjasama terkait mineral strategis, mempermudah prosedur Impor untuk produk-produk impor dari AS termasuk holtikultura, penetapan tarif yang seimbang atas 20 produk unggulan yang diekspor ke AS agar tidak lebih tinggi daripada negara-negara pesaing serta penyiapan tim satuan tugas deregulasi perdagangan.

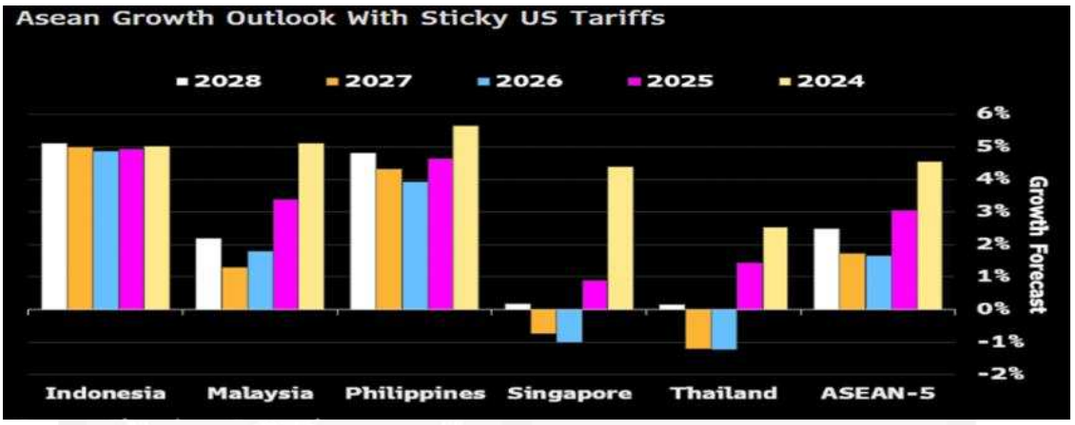
Tentunya finalisasi negoisasi atas beberapa poin tersebut di atas diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak untuk Indonesia dan Amerika Serikat, dapat menciptakan perdagangan kondusif, kestabilan ekonomi dan hubungan ekomoni yang semakin kuat.

3.1.2.2. Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Berdasarkan analisis dari *Bloomberg Economics,* perekonomian Indonesia, dan juga negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN-5) yaitu Malaysia, Thailand, Filipina serta Singapura diprediksi akan terus melemah dan lesu sebagai dampak dari pengenaan tatif Trump dan akan dirasakan sampai tahun 2028. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang dominan mengandalkan konsumsi domestik sebagai motor pertumbuhan ekonomi, dampak perang dagang bisa diimbangi dengan membangkitkan kelesuan belanja masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Gambar Error! No text of specified style in document..**2**
Outlook Pertumbuhan ASEAN dampak Tarif Amerika Serikat



Sumber : Bloomberg Economics

Bloomberg Economics memprediksi pertumbuhan. ekonomi negara-negara ASEAN-5 akan melambat di kisaran rata-rata 3% tahun 2025 ini, turun dari tahun 2024 sebesar 4,5%. Bahkan tahun depan bisa terperosok menjadi rata-rata 1,6% dengan asumsi tarif resiprokal yang diumumkan Trump pada 2 April lalu tidak berubah. Untuk Indonesia sendiri, *Bloomberg Economics* memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan akan terkoreksi, dengan kenaikan hanya 4,9%. Revisi proyeksi pertumbuhan ini mencerminkan prospek investasi dan ekspor yang semakin melemah.

Dalam postur APBN 2025 sesuai dengan Undang-Undang APBN No.62 Tahun 2024, asumsi dasar akonomi makro pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dipatok pada angka 5,2%. Berdasarkan analisis dari berbagai lembaga, seperti IMF, angka pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi pada angka 4,7%, lebih rendah dari perkiraan yang dibuat oleh *Bloomberg Economics*. Namun, hingga saat ini dari indikator fiskal APBN Tahun 2025 berdasarkan data Kementerian Keuangan, *trend* penerimaan pajak tumbuh positif dengan rata-rata penerimaan Rp179,7 T, belanja negara pada Kementerian/Lembaga dan non KL seperti pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi menunjukkan realisasi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja transfer ke daerah berjalan dengan baik sebagai dukungan APBN untuk penyediaan layanan publik di daerah terutama di desa, serta pembiayaan dari tahun 2022 sampai dengan 2025 periode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

s.d bulan Maret tetap *prudent*, terukur serta akomodatif terhadap efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan sebagai *shock absorber*. Kinerja APBN masih menunjukkan kinerja positif, terkendali dan dalam batas aman defisit di angka 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel Error! No text of specified style in document..**12**
Realisasi APBN 2025

Uraian (triliun rupiah)		2025		
		APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN
A.	**PENDAPATAN NEGARA**	**3.005,1**	**516,1**	**17,2**
a.l.	I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	400,1	16,1
	1. Penerimaan Pajak	2.189,3	322,6	14,7
	2. Kepabeanan & Cukai	301,6	77,5	25,7
	II. PNBP	513,6	115,9	22,6
B.	**BELANJA NEGARA**	**3.621,3**	**620,3**	**17,1**
	I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	413,2	15,3
	1. Belanja K/L	1.160,1	196,1	16,9
	2. Belanja non-K/L	1.541,4	217,1	14,1
	II. Transfer Ke Daerah	919,9	207,1	22,5
C.	**KESEIMBANGAN PRIMER**	**(63,3)**	**17,5**	**(27,7)**
D.	**SURPLUS/ (DEFISIT)**	**(616,2)**	**(104,2)**	**16,9**
	% thd PDB	*(2,53)*	*(0,43)*	
E.	**PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**616,2**	**250,0**	**40,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi APBN sampai dengan Maret 2025

APBN diharapkan dapat menjaga keberlanjutan anggaran prioritas tahun 2025 untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konstruksi APBN dirancang untuk menyukseskan program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan serta percepatan investasi.

Selain itu, untuk menjaga iklim usaha yang kondusif akibat dampak dari tarif Trump tersebut, pemerintah melakukan deregulasi pajak dan kepabeanan untuk memudahkan dunia usaha antara lain; *1) implementasi coretax untuk layanan perpajakan dan restitusi otomatis, percepatan waktu proses pemeriksanaan dan keberatan; 2) percepatan pemeriksaan perpajakan; 3) penyederhanaan proses restitusi pajak 4) penetapan nilai pabean dengan menggunakan sistem price range berbasis bukti valid; 5) fasilitasi aktivitas impor; 6) penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor. 6) implementasi Hico X-Ray berbasis AI; dan 7)*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) yang berbasis digital lintas KL untuk menurunkan biaya logistik dengan memudahkan dan mempercepat layanan secara akuntabel dan transparan.

Untuk menguatkan ketahanan ekonomi Indonesia, praktisi ekonomi memberikan analisis dan rekomendasi yang segera dijalankan pemerintah untuk mengantisipasi merosotnya kinerja ekspor terutama ke AS karena dampak perang dagang. Diantaranya mengeluarkan kebijakan demi menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif agar konsumsi terus terdorong, kebijakan ini diambil karena motor ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Selain itu, perlu ada pelonggaran moneter melalui Bank Indonesia untuk memotong tingkat suku bunga. Diharap bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dan inflasi realisasi inflasi.

Kita harapkan ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat dan stabil, posisi fiskal yang sehat dengan defisit tetap terjaga, serta rasio utang yang masih aman. Pemerintah cukup optimis dengan indikator ekonomi saat ini dengan kebijakan yang responsif melalui kolaborasi semua pihak. Semoga kebijakan Trump ini tidak membuat dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia dengan poin-poin negosiasi yang telah disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dengan terpilihnya Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2030 yang mempunyai 8 Prioritas Pembangunan yaitu Asta Cita adalah delapan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

   Fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan perlindungan serta pemajuan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan. Termasuk memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan fokus pada pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tinggi.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.
8. Memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2.3. Tantangan dan Prospek Regional Jawa Barat

Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan perekonomian nasional serta berbagai indikator perekonomian Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2025 diprakirakan akan berada pada kisaran 4,7% -- 5,5% (yoy). Kinerja perekonomian 2025 diprakirakan terakselerasi sejalan dengan membaiknya permintaan domestik akibat adanya sejumlah insentif dan berlanjutnya investasi. Permintaan domestik yang tetap kuat sebagaimana tercermin dari data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level optimis dan meningkat pada awal triwulan I 2025 sebesar 112,6.

Membaiknya konsumsi RT sejalan dengan membaiknya pendapatan (kenaikan UMP, kenaikan gaji ASN, Guru). Berdasarkan hasil liaison November 2024, mayoritas pelaku usaha optimis akan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 meski tetap perlu waspada akan risiko domestik dan global. Perlambatan daya beli masyarakat menjadi factor utama yang diwaspadai para pelaku usaha tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Sebaliknya, keyakinan dunia usaha terhadap prospek penjualan ke depan lebih dipengaruhi Pemerintahan baru yang diyakini akan memastikan keberlanjutan arah Pembangunan.

Perkembangan lapangan usaha didukung membaiknya kinerja industry pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Meningkatnya kinerja industri pengolahan sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik akibat berlangsungnya berbagai insentif dari Pemerintah. Sementara itu, membaiknya perdagangan sejalan dengan implementasi program Pemerintah dan membaiknya pendapatan masyarakat. Positifnya produksi pertanian sejalan dengan Upaya swasembada pangan yang diusung Pemerintah dan iklim yang lebih kondusif. Beberapa potensi risiko tertahannya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 antara lain keterbatasan ruang fiskal, sehingga perlu untuk memastikan bahwa program yang dijalankan mampu menghasilkan output yang terukur, serta berdampak pada perekonomian daerah. Kinerja sektor konstruksi perlu dicermati akibat penyelesaian proyek multiyears di tahun 2024. Adapun dengan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam berbagai strategic event dengan kolaborasi dan sinergitas antar komponen pentahelix secara konsiten maka kami optimis perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 akan tumbuh meningkat.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi mencakup pesantren percontohan, capacity building, dan pemasaran. Perluasan implementasi green economy di Jabar seperti memberikan insentif industri yang menerapkan ekonomi hijau, optimalisasi pemanfaatan insentif kepada perbankan yang memberikan kredit untuk sektor ekonomi hijau, mengakselerasi konversi produk ramah lingkungan seperti motor listrik, dan mengembangkan industri dan kawasan industri baru berbasis renewable energy.

Optimalisasi kinerja pariwisata, promosi pariwisata seperti desa wisata, pesantren wisata kampung adat/budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial. Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 Jawa Barat berperan penting terhadap pertumbuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% diperlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa 5,3-7,4%. Strategi yang dilakukan berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

a. peningkatan produktivitas (pengembangan Kawasan swasembada pangan, air dan energi a.l Wilayah Sungai (WS) Citarum, WS Cimanuk - Cisanggarung, WS Citanduy serta pengembangan kawasan komoditas unggulan a.l Cirebon – Majalengka (tebu), Priangan Timur (kopi, hortikultura, peternakan))
b. pengembangan industri (kawasan pengembangan industri – Bogor – Bekasi – Karawang – Purwakarta – Subang – Patimban, Cirebon – Kertajati, dan Cekungan Bandung),
c. pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru (pengembangan kawasan perkotaan wilayah metropolitan seperti: WM Jabodetabekjur, WM Cekungan Bandung, pengembangan Kawasan perkotaan non-WM a.l Cirebon, Tasikmalaya),
d. program peningkatan aktivitas wisatawan (pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif a.l. Bogor – Sukabumi – Cianjur, Cekungan Bandung).

Dengan mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian global, Jawa Barat tidak hanya mengandalkan kontribusi sektor utama perekonomian, namun diperlukan extra effort untuk mendorong berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, antara lain melalui:

a. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi mencakup pesantren percontohan, capacity building, dan pemasaran.
b. Perluasan implementasi green economy di Jabar seperti memberikan insentif industri yang menerapkan ekonomi hijau, optimalisasi pemanfaatan insentif kepada perbankan yang memberikan kredit untuk sektor ekonomi hijau, mengakselerasi konversi produk ramah lingkungan seperti motor listrik, dan mengembangkan industri dan kawasan industri baruberbasis renewable energy.
c. Optimalisasi kinerja pariwisata, promosi pariwisata seperti desa wisata, pesantren wisata kampung adat/budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.13**
Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No		Target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi 2024	RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	79,03	78,81	79,03
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,15	5,3	5,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,13	8,11	6,99
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,53	6,05	6,01
5	Indeks Gini (Poin)	0,477	0,43	0,41
6	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	56,616	58,860	58,860

Sumber: BPS dan RKPD Jabar 2025

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024.

Dengan dilantiknya Gubernur Jabar Periode 2025-2030, maka pada tahun 2025, Pemerintah Jawa Barat mempunyai Visi "Jabar Istimewa" dengan 9 langkah ngawangun Jabar yang merupakan prioritas Pembangunan yaitu :

a. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Rumah Rakyat Miskin

- Meningkatkan akses jalan hingga ke pelosok desa dan permukiman perkotaan.
- Membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
- Mewujudkan **Jabar Caang** melalui 100% elektrifikasi listrik masyarakat.
- Penataan sanitasi lingkungan dengan membangun sarana MCK di lingkungan pemukiman sekitar DAS untuk mencapai **Jabar ODF** (Open Defecation Free).

b. Pembangunan Jaringan Irigasi dan Ekosistem Pertanian Organik

- Pembangunan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian.
- Mendorong terciptanya ekosistem ekonomi pertanian organik melalui konektivitas dengan sektor kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- Pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.

c. Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan SMA/SMK Gratis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Pengembangan pendidikan berkarakter dengan didukung ketercukupan ruang kelas untuk menjaga kesetaraan jumlah ruang kelas antar jenjang pendidikan.
- Pembentukan 10 sekolah kejuruan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum yang link and match dengan dunia kerja.
- Pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, dan S3 untuk pelajar berprestasi di perguruan tinggi ternama di Indonesia dengan jurusan sesuai kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.

d. Pengembangan Lapangan Kerja Baru dan Investasi

- Mengembangkan lapangan kerja baru dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten/kota yang memiliki tata ruang industri.
- Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan smart city berbasis kearifan lingkungan.

e. Penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

- Penyempurnaan RSUD kabupaten/kota dengan penambahan layanan khusus seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan stroke dengan sarana bedah syaraf, dan layanan operasi lainnya yang selama ini tersentralisasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
- Pemberian beasiswa dokter spesialis putra daerah sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.

f. Pengembangan Industri Pengobatan Berbasis Kearifan Lingkungan

- Mengembangkan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan untuk mendukung sektor kesehatan yang berkelanjutan.

g. Pendidikan Manajer Putra Daerah

- Mencetak 10.000 manajer putra daerah melalui beasiswa di politeknik berorientasi terapan.

h. Pengelolaan Sampah Mandiri dan Penataan Kampung Nelayan

- Pengembangan pengelolaan sampah mandiri hingga tingkat RT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Penataan kampung nelayan, tempat pelelangan ikan, pelabuhan pendaratan kapal nelayan, serta normalisasi muara di pesisir Jawa Barat.

i. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Transformasi Birokrasi

- Mendorong peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, kader PKK, kader posyandu, guru agama, ajengan, serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan.
- Transformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memberikan dampak terhadap perekonomian di Jawa Barat yaitu:

a. Pemangkasan Dana Infrastruktur Daerah
   - Inpres 1/2025 menyebabkan pemotongan signifikan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, termasuk untuk pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur pendidikan di Jawa Barat.
   - Pemangkasan ini berpotensi menghambat proyek pembangunan daerah yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah di provinsi ini.

b. Tertundanya Proyek Strategis Daerah
   - Proyek-proyek seperti jalan tol baru, revitalisasi transportasi publik, dan pengembangan kawasan industri bisa tertunda karena keterbatasan anggaran.
   - Ini berdampak pada investasi, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas sektor industri yang menjadi andalan Jawa Barat.

c. Risiko PHK dan Penurunan Pendapatan UMKM
   - Pengetatan belanja pemerintah menurunkan aktivitas belanja publik di sektor jasa, katering, logistik, dan event, yang banyak melibatkan UMKM lokal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Sektor hotel dan restoran, terutama di kawasan wisata seperti Bogor dan Bandung, mengalami tekanan, berisiko menyebabkan PHK.

Namun disisi lain adanya efisiensi APBN dan APBD memberikan dampak Positif Potensial:

a. Efisiensi dan Fokus pada Program Prioritas
   - Pemerintah daerah dipaksa untuk menyusun program yang lebih strategis dan berorientasi hasil, menghindari kegiatan seremonial atau perjalanan dinas yang boros.
   - Ini mendorong perbaikan tata kelola anggaran, serta mendukung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.

b. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
   - Pemangkasan anggaran seremonial memicu peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran. Ini bisa membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah.

DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan hati-hati terhadap Inpres ini, namun menegaskan agar efisiensi tidak mengorbankan layanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah provinsi mulai mengidentifikasi program-program yang bisa ditunda atau ditiadakan untuk menyesuaikan postur anggaran yang baru, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.1.3. PROYEKSI DAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KOTA BOGOR

Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025, adalah rencana kerja tahun pertama pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 yaitu “Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan”. RKPD 2025 mengusung tema “Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”. Dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Adapun fokus pembangunan ekonomi tahun 2025 adalah Mendorong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

pengembangan potensi pariwisata heritage dan ilmiah, kampung tematik, ekonomi kreatif, penguatan sumberdaya manusia kreatif dan UMKM, mengakselerasi pelayanan investasi, mengembangkan sarana prasarana perekonomian, serta meningkatkan produktivitas.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor meliputi dari aspek sumberdaya manusia, aktivitas perekonomian dan infrastruktur seperti pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.14**
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan	Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja
		Meningkatkan kompetensi para pencari kerja
	Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda	Meningkatkan kewirausahaan pemuda
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan
		Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan
	Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
		Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata
	Mengurangi kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan dan ketepat sasaran penanggulangan kemiskinan
		Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin
		Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana
		Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial
		Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat
		Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana
Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan		
Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal
		Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi
		Mengembangkan kampung kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal
	Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi	1. Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif
	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM. IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
		fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)
		Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf
		Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis
		Meningkatkan kualitas manajemen koperasi
		Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian
		Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksanaan koperasi
		Meningkatkan koperasi yang sehat
		Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Mengakselerasi pelayanan investasi	Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik
		Meningkatkan pengembangan City Marketing
		Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah
	Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja
		Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM
		Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
		Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja
	Mengembangkan usaha sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan
Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah
		Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau
		Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
		Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen
		Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional
		Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya
		Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan
		Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan
		Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan
		Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan
		Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis
	Menjaga stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan penting	Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting
		Meningkatkan penggunaan produk lokal
	Memperkuat aktivitas perekonomian sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan
		Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan
		Meningkatkan penyuluhan pertanian
		Meningkatkan kualitas irigasi
		Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar	Memperkuat efisiensi dan efektifitas dalam proses pengembangan ekosistem pasar	Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk
		Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk
		Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedangang
	Memperkuat branding produk	Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran
		Meemperluas jangkauan konsumen
Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan,	Mengurangi risiko bencana daerah	Meningkatkan manajemen mitigasi dan adaptasi risiko bencana
		Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mitigasi bencana
	Memperkuat penegakan peraturan daerah serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur penegak perda dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang penegak perda dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kerjasama dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat
Tujuan 3: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung
		Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan
	Mengoptimalkan pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan
		Meningkatkan kualitas sistem drainase
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas
	Terwujudnya kualitas, konektivitas dan infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum
		Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota

Dengan dilantiknya Wali Kota Bogor periode 2025-2030, Kota Bogor memiliki Visi Jangka Menengah yaitu “Bogor Beres, Bogor Maju”, dengan 4 Misi yaitu:

a. Bogor Cerdas
b. Bogor Sehat
c. Bogor Sejahtera
d. Bogor Lancar

Dengan demikian, arah kebijakan perekonomian yang akan ditempuh ada penyesuaian untuk mendukung program prioritas, khususnya pada Misi 3 yang terkait dengan perekonomian yaitu :

- Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.
- Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor
- Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya local
- Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan askes bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)
- Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif
- Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas

Dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD tentunya berdampak kepada perekonomian Kota Bogor, yaitu :

a. Pemangkasan Anggaran Infrastruktur. Inpres 1/2025 mengarahkan pemangkasan anggaran infrastruktur hingga 34,3%. Hal ini berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Di Kota Bogor, proyek infrastruktur yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi yang mendukung konektivitas dan mobilitas warga dapat terhambat, mempengaruhi sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan industri lokal.
b. Pengurangan Dana Transfer ke Daerah. Kebijakan efisiensi juga mencakup pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima daerah. Khususnya, DAK Fisik yang mengalami pemotongan sebesar Rp18,3 triliun secara nasional, berdampak pada proyek-proyek fisik di daerah. Kota Bogor, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, turut merasakan dampak ini, yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.
c. Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Sektor Pariwisata dan UMKM. Sektor pariwisata dan UMKM di Kota Bogor, yang bergantung pada kunjungan wisatawan dan kegiatan ekonomi lokal, menghadapi risiko akibat pemangkasan anggaran pemerintah. PHRI Kabupaten Bogor mengkhawatirkan potensi PHK besar-besaran di sektor hotel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

dan restoran akibat efisiensi anggaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan pedagang dan pelaku UMKM.

d. Alokasi Anggaran yang Lebih Fokus pada Prioritas Dengan pemangkasan belanja seremonial, perjalanan dinas, dan kegiatan non-produktif lainnya, diharapkan anggaran pemerintah daerah dapat lebih difokuskan pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

e. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kebijakan efisiensi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam pengeluaran, mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Berdasarkan realisasi indicator makro Kota Bogor tahun 2024, maka ditetapkan target untuk Perubahan RKPD tahun 2025 sebagai perubahan target pembangunan ekonomi, yaitu:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.15**
Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,03	78,81	79,03
2.	Angka Kemiskinan	%	6,53	6,05	6,01
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,13	8,11	6,99
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,15	5,3	5,5
5.	Gini Ratio	Point	0,477	0,43	0,41
6	PDRB Per Kapita (AdHB) juta	Rp	56,616	58,860	58,860
7	Inflasi	%	1,75	2-4	2-4

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026, Laporan Evaluasi RPJMD 2024, dan Analisis Bapperida 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3.2. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 di tahun terakhir dan RPD Tahun 2025-2026 tahun kesatu, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber - sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). RKPD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Penyusunan perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 mengacu terhadap hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I untuk Target Kinerja yang ditetapkan dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 tetap mengacu pada target yang tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026 dan Berita Acara Penyesuaian Target Perubahan Tahun 2025. Dokumen penetapan perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan KUA-PPAS dan penyusunan Perubahan APBD yang disesuaikan berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk disinergikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, untuk Kota Bogor sudah dilakukan sejak tahun 2020. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang menjamin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor terdiri dari : [1] Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, [2] Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada Tahun 2025 perlu dilakukan Perubahan Arah Kebijakan guna menampung pelaksanaan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang mendahului atau berbeda dengan dokumen perencanaan RKPD Tahun 2025.

Sistematika pencatatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam struktur anggaran mulai tahun angaran 2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

3.2.1. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan indikator dalam pencapaian target sebagai penentuan kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. Sedangkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024.

3.2.1.1. Capaian Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah.

Pendapatan daerah juga berperan dalam perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selama ini dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bogor masih sangat bergantung terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah melalui pendapatan transfer. Berikut unsur-unsur yang tertuang dalam elemen pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut disampaikan progress pendapatan daerah Kota Bogor sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tabel 3.11. berikut di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.16**
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Triwulan I Tahun 2025

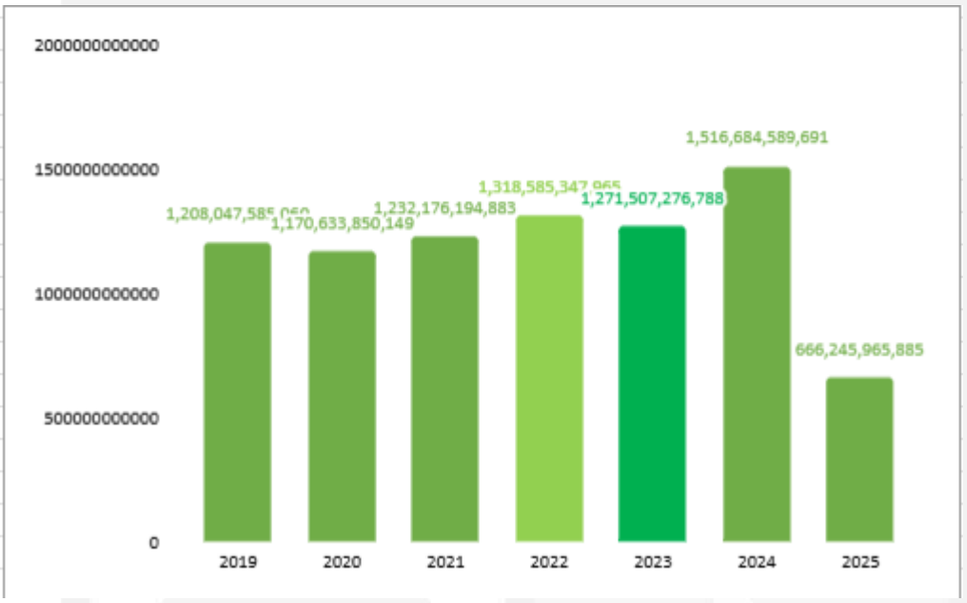
NO	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	TAHUN 2025					
						RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	REALISASI (TW I)	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**PENDAPATAN DAERAH**										
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.075.240.926.213,11**	**1.147.623.045.708,92**	**1.338.618.268.168,80**	**1.458.824.079.309,24**	**1.587.178.793.643,00**	**1.666.675.706.831,00**	**1.666.675.706.831,00**	**377.952.499.748,51**	**1.452.281.571.649,51**	**22,68**
4.1.01	Pajak Daerah	624.784.886.145,00	744.960.592.537,00	897.753.380.910,00	973.768.860.850,00	1.144.382.200.000,00	1.224.732.427.374,00	1.224.732.427.374,00	254.549.518.416,00	904.130.233.966,00	**20,78**
4.1.02	Retribusi Daerah	36.033.010.539,00	23.942.828.414,00	31.081.390.548,00	417.445.452.990,24	392.384.298.949,00	395.084.298.949,00	395.084.298.949,00	107.488.679.693,51	488.474.387.782,51	**27,21**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.420.552.150,00	32.170.048.280,00	33.960.776.435,00	34.287.164.524,00	36.118.899.553,00	36.118.899.553,00	36.118.899.553,00	250.000.000,00	35.868.899.553,00	**0,69**
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	382.002.477.379,11	346.549.576.477,92	375.822.720.275,80	33.322.600.945,00	14.293.395.141,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	15.664.301.639,00	23.808.050.348,00	**145,85**
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.463.000.794.326,00**	**1.639.426.533.844,00**	**1.628.857.302.371,00**	**1.711.878.175.798,00**	**1.178.059.321.684,00**	**1.268.774.129.569,00**	**1.534.844.219.617,00**	**288.293.466.136,00**	**1.231.299.096.481,00**	**18,78**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.127.139.550.566,00	1.249.992.463.277,00	1.249.655.329.523,00	1.369.427.755.442,00	1.050.064.127.000,00	1.138.956.711.000,00	1.402.987.525.000,00	275.649.353.766,00	1.113.398.134.234,00	**19,65**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	335.861.243.760,00	389.434.070.567,00	379.201.972.848,00	342.450.420.356,00	127.995.194.684,00	129.817.418.569,00	131.856.694.617,00	12.644.112.370,00	117.900.962.247,00	**9,59**
4.3	**Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**106.539.215.238,00**	**55.479.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**2.644.780.935.777,11**	**2.787.105.058.802,92**	**2.967.475.570.539,80**	**3.170.702.255.107,24**	**2.765.238.115.327,00**	**2.935.449.836.400,00**	**3.201.519.926.448,00**	**666.245.965.884,51**	**2.683.580.668.130,51**	**20,81**

Sumber : Simral LRA, SIPD RI 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Melihat pada tabel capaian pendapatan daerah Triwulan I (satu) 2025 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Kota Bogor pada Tahun 2025 mencapai 20,81 persen. Pencapaian target Triwulan I (satu) paling signifikan terdapat pada pendapatan asli daerah yang mencapai 22,68 persen.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.19**
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Semester I - 2024 dan Triwulan I Tahun 2025



Sumber: Simral LRA, 2025

A. Capaian Pendapatan Asli Daerah Triwulan I Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari tabel di atas menunjukan bahwa adanya perubahan angka prognosis PAD Kota Bogor Tahun 2025, yakni sebesar Rp 1.452.281.571.649,51. Pada Triwulan I Tahun 2025 baru terealisasi sebesar 22,68%. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah dikeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1. Kebijakan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan;
3. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
4. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan PAD;
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada Tahun 2025 telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:
   a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan menitikberatkan pada pengintegrasian sistem informasi;
   b. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah;
   c. Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
   d. Pembentukan profil potensi Pendapatan Asli Daerah Wajib Pajak Daerah non PBB dan non BPHTB;
   e. Kerjasama antar Perangkat Daerah, dan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi;
   f. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;

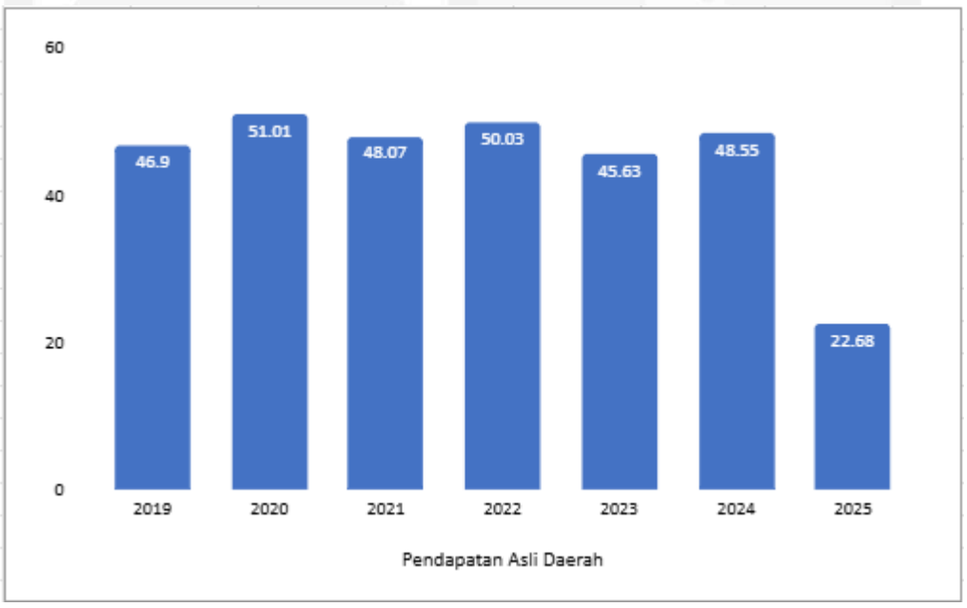
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

g. Meningkatkan peran Perangkat Daerah Penghasil Retribusi Daerah dalam pelayanan dan peningkatan pendapatan.

6. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah;
7. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder sehingga terealisasinya peningkatan PAD.

Apabila disandingkan dengan realisasi Semester I Tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2024 dan Triwulan I (satu) Tahun 2025, rata rata pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2024 mencapai 47.91 persen dimana pada tahun 2019 mencapai 46,90 persen, pada tahun 2020 mencapai 51,01 persen, pada tahun 2021 mencapai 48,07 persen, pada tahun 2022 mencapai 50,03 persen, pada tahun 2023 mencapai 45,63 persen merupakan terendah sejak tahun 2019, pada tahun 2024 mencapai 48,55 persen dan pada Triwulan I (satu) Tahun 2025 mencapai 22,68 persen. Berikut grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun Semester I Tahun 2019-2024 dan Triwulan I (satu) Tahun 2025 pada grafik 3.13.

Grafik Error! No text of specified style in document.**.20**
Persentase Progres Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor 2019 Semester I- 2024 dan Triwulan I Tahun 2025



Sumber : SIPD RI, Simral, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

B. Capaian Pendapatan Transfer Triwulan I Tahun 2025

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Dana perimbangan dari pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal (IF) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keseluruhan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri netto dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, yang artinya besaran Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri netto. Pada saat Pendapatan Dalam Negeri netto naik, maka pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan ikut naik sehingga alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tiap daerah juga akan ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kriteria dan kategori yang diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan meliputi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk usaha mikro kecil menengah, percepatan penyerapan belanja daerah, kemiskinan, serta penurunan inflasi daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer baik Pusat maupun Provinsi, hal tersebut menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah yang akan diterima dapat naik atau turun tergantung pada realisasi penerimaan negara dimana hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam setiap tahunnya.

Tidak berbeda halnya dengan pendapatan transfer Pemerintah Pusat untuk alokasi pendapatan transfer antar daerah pun bersifat dinamis, hal tersebut menuntut daerah untuk terus dapat menetapkan program prioritas agar dinamika alokasi pendapatan transfer dapat segera direspon dengan tetap mengutamakan prioritas pembangunan daerah. Poin penting lainnya tentu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran tetap harus diperhatikan.

Dalam kurun waktu Tahun 2020 - 2024, rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,54%. Pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 sebesar Rp. 838.948.449.000,- terus menurun sebesar -9,11 persen ditahun 2020 dengan pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 762.556.115.000, kemudian -1,40 persen ditahun 2021 dengan pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 751.862.545.000,-, dan -0,83 persen ditahun 2022 dengan pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 745.659.353.200,- meningkat 6,28% di tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

2023 dengan pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 792.504.632.043,- dan meningkat 7,73% di tahun 2024 dengan pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 853.803.503.264,-.

3.2.1.2. Capaian Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025

- Belanja Daerah merupakan kewenangan daerah dalam mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pemerintahan Pilihan, Pendukung Urusan Pemerintahan, Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintahan umum.
- Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, perangkat daerah, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek yang berpedoman pada standar harga satuan barang/jasa, analisis standar biaya, atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun besaran belanja daerah serta realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dalam Upaya mendukung prioritas pembangunan daerah tertuang dalam tabel 3.12.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.17**
Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Triwulan I Tahun 2025

NO	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	TAHUN 2025					%
						RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	REALISASI (TW I)	PROGNOSIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**BELANJA DAERAH**										
5.1	**Belanja Operasi**	**2.195.790.762.074,00**	**2.406.860.416.778,00**	**2.508.123.306.971,00**	**2.774.250.053.629,00**	**2.625.096.020.390,00**	**2.648.220.926.885,00**	**2.829.832.515.885,00**	**585.326.173.491,00**	**2.284.256.759.649,00**	**20,68**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.091.969.595.660,00	1.128.093.224.058,00	1.063.654.426.888,00	1.242.957.964.907,00	1.271.211.993.166,00	1.287.751.556.492,00	1.289.510.106.492,00	275.319.977.264,00	1.039.220.895.630,00	**21,35**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.671.384.413,00	1.066.553.405.102,00	1.236.457.277.949,00	1.304.164.987.240,00	1.246.864.801.391,00	1.242.562.064.430,00	1.343.528.601.430,00	261.347.035.103,00	1.101.835.259.180,00	**19,45**
5.1.03	Belanja Bunga	4.047.853.424,00	4.282.366.790,00	6.191.682.700,00	7.027.746.595,00	221.589.324,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	**0,00**
5.1.05	Belanja Hibah	68.284.278.577,00	146.302.919.328,00	147.381.004.434,00	176.519.335.387,00	78.799.282.670,00	80.285.702.124,00	152.129.962.124,00	48.027.161.124,00	104.102.801.000,00	**31,57**
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	49.817.650.000,00	61.628.501.500,00	54.438.915.000,00	43.580.019.500,00	27.998.353.839,00	30.621.603.839,00	37.663.845.839,00	632.000.000,00	32.097.803.839,00	**1,68**
5.2	**Belanja Modal**	**418.874.649.797,00**	**571.966.552.801,00**	**518.164.968.738,00**	**400.367.986.619,00**	**263.306.071.512,00**	**255.298.196.894,00**	**340.622.616.248,00**	**13.559.000.769,00**	**328.762.782.107,00**	**3,98**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	456.222.600,00	17.328.944.627,00	1.287.152.960,00	2.477.717.100,00	16.603.485.059,00	17.463.744.493,00	17.463.744.493,00	0,00	17.463.744.493,00	**0,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.821.926.424,00	93.283.801.959,00	97.928.993.032,00	133.226.642.367,00	60.051.267.270,00	52.415.147.352,00	100.621.888.902,00	11.891.074.173,00	90.816.394.957,00	**11,82**
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.413.812.539,00	188.457.698.905,00	178.951.840.395,00	141.166.601.172,00	133.663.617.536,00	120.293.527.662,00	121.293.098.662,00	774.792.510,00	121.113.723.152,00	**0,64**
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	206.667.544.227,00	271.189.473.185,00	238.985.747.391,00	112.729.496.656,00	52.727.960.447,00	64.766.232.787,00	93.908.021.787,00	793.330.686,00	92.370.015.101,00	**0,84**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.037.371.248,00	708.136.673,00	911.157.960,00	10.693.173.754,00	259.741.200,00	259.741.200,00	6.899.101.004,00	0,00	6.899.101.004,00	**0,00**
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	477.772.759,00	998.497.452,00	100.077.000,00	74.355.570,00	0,00	99.803.400,00	436.761.400,00	99.803.400,00	99.803.400,00	**22,85**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	TAHUN 2025					%
						RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	REALISASI (TW I)	PROGNOSIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**21.400.409.034,00**	**5.366.713.424,00**	**1.066.654.400,00**	**2.187.943.885,00**	**30.000.000.000,00**	**39.422.223.885,00**	**38.556.305.579,00**	**1.201.000.000,00**	**34.842.595.205,00**	**3,11**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.400.409.034,00	5.366.713.424,00	1.066.654.400,00	2.187.943.885,00	30.000.000.000,00	39.422.223.885,00	38.556.305.579,00	1.201.000.000,00	34.842.595.205,00	**3,11**
5.4	**Belanja Transfer**	**1.660.750.000,00**	**2.160.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**1.665.750.000,00**	**1.711.375.000,00**	**1.711.375.000,00**	**0,00**	**1.711.375.000,00**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	1.665.750.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	**0,00**	**1.711.375.000,00**	**0,00**
TOTAL BELANJA DAERAH		**2.637.726.570.905,00**	**2.986.354.433.003,00**	**3.029.015.680.109,00**	**3.178.466.734.133,00**	**2.920.067.841.902,00**	**2.944.652.722.664,00**	**3.210.722.812.712,00**	**600.086.174.260,00**	**2.649.573.511.961,00**	**18,69**

Sumber: Simral LRA, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

A. Capaian Belanja Operasi Triwulan I Tahun 2025

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:

a. Belanja pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai non ASN yang akan diangkat sebagai pegawai negeri lingkup pemerintahan, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai, barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada calon penerima sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Realisasi belanja operasi yang sudah disesuaikan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan pada tabel di atas.

Melihat pada tabel diatas menunjukan belanja pegawai merupakan belanja kedua terbesar setelah belanja barang dan jasa dalam komponen belanja operasi walaupun secara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa total belanja pegawai pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 30 persen dari total APBD, maksimal diimplementasikan di tahun 2027 atau 5 tahun dari ditetapkannya Undang undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 02 januari 2022. Tentunya hal tersebut harus dijadikan perhatian mengingat persentase belanja pegawai Kota Bogor masih diatas dari yang sudah ditentukan atau dengan rata rata belanja pegawai diluar tunjangan dan tambahan penghasilan guru.

B. Capaian Belanja Modal Triwulan I Tahun 2025

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap untuk digunakan.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Jalan

Belanja Jalan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional.

Adapun realisasi belanja modal Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang dituangkan pada tabel di atas.

Dalam hal belanja modal, secara fungsi hanya dilakukan penyesuaian atau pemetaan fungsi dalam mendukung roda perekonomian Kota Bogor.

C. Capaian Belanja Tidak Terduga Triwulan I Tahun 2025

Belanja tidak terduga adalah belanja pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 9.455.600,- pada tahun 2020 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 126.277.177.930,- pada tahun 2021 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 21.400.409.034,- pada tahun 2022 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.366.713.424,- pada tahun 2023 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.066.654.400,- pada tahun 2024 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.187.943.885,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

dan realisasi belanja tidak terduga sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.201.000.000,-. Adapun gambaran realisasi belanja tidak terduga dituangkan pada tabel di atas.

D. Capaian Belanja Transfer Triwulan I Tahun 2025

Belanja transfer adalah belanja pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor digunakan untuk kepentingan sosial di sekitar wilayah tempat pembuangan akhir galuga. Pada tahun 2019 realisasi belanja tansfer sebesar Rp.1.995.853.019,-, pada tahun 2020 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.134.531.000,- , pada tahun 2021 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- pada tahun 2022 realisasi belanja transfer sebesar Rp.2.160.750.000,- pada tahun 2023 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- pada tahun 2024 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- dan realisasi belanja transfer Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.0,-. Gambaran realisasi belanja transfer dituangkan pada tabel diatas.

Dalam menyusun Belanja Daerah selain mengalokasikan untuk menunjang prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mengharuskan untuk menyusun pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerahnya masing masing. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, maupun penanaman modal. Urusan Pemerintahan Pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Undang-undang pun memperkenalkan terminologi urusan pemerintahan yang baru, yaitu Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada Camat. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3.2.1.3. Capaian Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya. Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.18**
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	TAHUN 2025					%
						RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	REALISASI (TW I)	PROGNOSIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**										
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**493.565.383.802,31**	**370.486.701.874,42**	**192.611.572.644,34**	**224.884.836.888,14**	**5.497.032.260,00**	**35.497.032.260,00**	**35.497.032.260,00**	**57.464.437.720,00**	**147.897.061.666,00**	**161,89**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	327.542.156.075,31	365.001.935.698,42	161.360.978.068,34	54.051.328.112,14	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	84.935.591.686,00	**0,00**
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	160.538.461.551,00	0,00	25.765.828.400,00	38.648.742.600,00	0,00	0,00	0,00	8.464.437.720,00	8.464.437.720,00	**0,00**
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	126.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	**0,00**
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	0,00	5.497.032.260,00	**0,00**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**135.617.812.976,00**	**9.878.849.606,00**	**76.821.017.476,00**	**132.184.766.176,00**	**95.565.145.996,00**	**26.294.145.996,00**	**26.294.145.996,00**	**15.000.000.000,00**	**11.294.145.996,00**	**57,05**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	71.336.251.300,00	0,00	50.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	4.394.083.430,00	0,00	0,00	35.271.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	**100,00**
6.2.03	Pembayaran cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	135.617.812.976,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	132.184.766.176,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	0,00	10.294.145.996,00	**0,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	TAHUN 2025					%
						RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	REALISASI (TW I)	PROGNOSIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMBIAYAAN NETTO	**357.947.570.826,31**	**360.607.852.268,42**	**115.790.555.168,34**	**92.700.070.712,14**	**-90.068.113.736,00**	**9.202.886.264,00**	**9.202.886.264,00**	**42.464.437.720,00**	**136.602.915.670,00**	**461,43**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**365.001.935.698,42**	**161.358.478.068,34**	**54.250.445.599,14**	**84.935.591.686,38**	**-244.897.840.311,00**	**0,00**	**0,00**	**108.624.229.344,51**	**170.610.071.839,51**	**0,00**

Sumber: LRA Simral, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

A. Capaian Penerimaan Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Realisasi penerimaan pembiayaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 262.049.348.881,52 pada tahun 2020 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 302.178.620.943,19 pada tahun 2021 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 493.565.383.802,31 pada tahun 2022 sebesar Rp. 370.486.701.874,42 pada tahun 2023 sebesar Rp. 192.611.572.644,34 pada tahun 2024 sebesar Rp. 224.884.836.888,14 (unaudited) dan APBD Pergeseran Tahun 2025 sebesar Rp. 35.497.032.260,00 dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 57.464.437.720,00.

Untuk SiLPA tahun sebelumnya pada APBD Murni Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 saat dokumen ini disusun belum terdapat LRA yang sudah di audit oleh BPK sehingga target SiLPA yang digunakan masih menggunakan versi yang unaudited sebesar Rp. 84.935.591.686,00.

•

B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada Perumda dan pemberian pinjaman daerah. Tahun 2019 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 155.495.608.833,00,- pada tahun 2020 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 80.545.341.402,00,- pada tahun 2021 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 135.617.812.976,00,- pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 9.878.849.606,- pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 76.821.017.476,- pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 132.184.766.176,- pada APBD Pergeseran Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 26.294.145.996,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Kondisi ini berbeda dengan saat penyusunan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 95.565.145.996,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Perbedaannya adalah bahwa saat penyusunan RKPD Tahun 2025 terdapat alokasi untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp. 35.271.000.000,- pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 10.294.145.996,-.

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Struktur Anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah, dan;
3. Pembiayaan Daerah.

1.2.

3.2.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

A. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berikut disampaikan pendapatan daerah Kota Bogor pada tabel 3.14.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.19**
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.587.178.793.643,00	1.666.675.706.831,00	1.666.675.706.831,00	1.610.609.242.939,00	1.458.824.079.309,24	-56.066.463.892,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.178.059.321.684,00	1.268.774.129.569,00	1.534.844.219.617,00	1.534.844.219.617,00	1.711.878.175.798,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**2.765.238.115.327,00**	**2.935.449.836.400,00**	**3.201.519.926.448,00**	**3.145.453.462.556,00**	**3.170.702.255.107,24**	**-56.066.463.892,00**

Sumber : SIPD-RI, Simral, 2025

Dalam menentukan rencana pendapatan daerah perlu dilakukan analisis agar terukur secara logis, karena hal tersebut akan dijadikan dasar kemampuan keuangan daerah dalam merencanakan belanja daerah untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah. Berikut penjelasan komponen yang tertuang dalam pendapatan daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Melihat pada realisasi rata rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 8,30 persen. Rencana perubahan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah serta proyeksi pendapatan asli daerah diasumsikan naik pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam perubahan pendapatan asli daerah terdapat rencana perubahan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terkait dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

pemanfaatan asset Pemerintah Kota Bogor Berikut rencana perubahan pendapatan asli daerah yang tertuang dalam Tabel 3.15.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.20**
Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor
Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	PERGESERAN APBD	PERUBAHAN RKPD		
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**						
4.1.01	Pajak Daerah	1.144.382.200.000,00	1.224.732.427.374,00	1.224.732.427.374,00	1.159.247.898.075,00	973.768.860.850,00	-65.484.529.299,00
4.1.02	Retribusi Daerah	392.384.298.949,00	395.084.298.949,00	395.084.298.949,00	404.209.048.951,00	417.445.452.990,24	9.124.750.002,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.118.899.553,00	36.118.899.553,00	36.118.899.553,00	36.162.214.958,00	34.287.164.524,00	43.315.405,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.293.395.141,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	10.990.080.955,00	33.322.600.945,00	250.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		**1.587.178.793.643,00**	**1.666.675.706.831,00**	**1.666.675.706.831,00**	**1.610.609.242.939,00**	**1.458.824.079.309,24**	**-56.066.463.892,00**

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

1.3.

b. Pendapatan transfer, yang meliputi transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah serta transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan transfer pada Perubahan RKPD 2025 tetap mengikuti pergeseran APBD yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau dan Bantuan Keuangan Provinsi seperti yang digambarkan pada tabel 3.16 berikut ini:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.21**
Rencana Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	PERGESERAN APBD	PERUBAHAN RKPD		
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	PERGESERAN APBD	PERUBAHAN RKPD		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.064.127.000,00	1.138.956.711.000,00	1.402.987.525.000,00	1.402.987.525.000,00	1.369.427.755.442,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.995.194.684,00	129.817.418.569,00	131.856.694.617,00	131.856.694.617,00	342.450.420.356,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		**1.178.059.321.684,00**	**1.268.774.129.569,00**	**1.534.844.219.617,00**	**1.534.844.219.617,00**	**1.711.878.175.798,00**	**0,00**

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

B. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber -sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam rencana Perubahan APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah di Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;

1.4.

C. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bogor sebagai salah satu sumber dana penopang pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;
3. Menjalin kerjasama dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
4. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah;
5. Meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
6. Kebijakan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Perda tentang PDRD;
7. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
9. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;

10. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan PAD.

1.5.

D. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dari Pendapatan Transfer Tahun 2025

1.6. Arah kebijakan Pendapatan Daerah untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan sumber daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pelaksanaan pendapatan transfer;
4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA. 2025;
5. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT TA. 2025;
6. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2025;
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA. 2025.

E. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dari Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan rencana kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat me-realisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) untuk Tahun Anggaran 2025 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan :

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :
   a. Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, dan sebagainya;
   b. Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
   c. Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
   d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
   e. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolan pendapatan asli daerah;
   f. Melakukan upaya yang dapat mengembalikan peningkatan PAD di sektor pariwisata Kota Bogor dengan melaksanakan:
      - Sosialisasi pariwisata Kota Bogor;
      - Penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
      - Melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun Pariwisata Kota Bogor;
      - Meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
      - Melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman.
   g. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
i. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil pendapatan;
j. Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, melakukan alih tugas fungsional jabatan dan lain sebagainya;
k. Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
l. Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan law enforcement pengelolaan PAD.

2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
   a. Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;
   b. Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
   c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Opsen PKB dan BBNKB);
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.2.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

A. Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bogor. Berikut disampaikan belanja daerah Kota Bogor pada tabel 3.17.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.22**
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025					
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD	Realisasi 2024	+/-
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	Belanja Operasi	2.625.096.020.390,00	2.648.220.926.885,00	2.829.832.515.885,00	2.950.032.594.228,90	2.774.250.053.629,00	120.200.078.343,90
5.2	Belanja Modal	263.306.071.512,00	255.298.196.894,00	340.622.616.248,00	425.216.921.545,00	400.367.986.619,00	84.594.305.297,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	39.422.223.885,00	38.556.305.579,00	38.556.305.579,00	2.187.943.885,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	1.665.750.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.736.125.000,00	1.660.750.000,00	24.750.000,00
TOTAL BELANJA DAERAH		**2.920.067.841.902,00**	**2.944.652.722.664,00**	**3.210.722.812.712,00**	**3.415.541.946.352,90**	**3.178.466.734.133,00**	**204.819.133.640,90**

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

1.7. Dari Tabel 3.17 di atas pada Rencana Perubahan Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 204.819.133.640,90. Komponen penyumbang terbesar dari Penambahan belanja tersebut adalah komponen belanja barang dan jasa untuk pemenuhan Visi, Misi Presiden, Gubernur dan Walikota, yang kedua belanja pegawai dengan adanya PP No. 11 Tahun 2025 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji ke-13) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibayarkan sebesar 100 persen. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sementara, belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Berikut penjelasan komponen yang tertuang dalam belanja daerah yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1.8. Merupakan pengeluaran anggaran dalam mendukung kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya target kinerja. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Pegawai merupakan komponen kedua yang mengalami kenaikan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji ke-13) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 100 persen dan yang pertama adalah Belanja Barang dan Jasa untuk pemenuhan Visi Misi Presiden, Gubernur dan Walikota, selanjutnya Belanja Hibah, Belanja Bunga disesuaikan dengan realisasi pembayaran per tahun. Berikut rencana perubahan belanja operasi Tahun 2025 pada tabel 3.18.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.23**
Rencana Perubahan Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2025

No.	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
5.1	**BELANJA OPERASI**						
5.1.01	Belanja Pegawai	1.271.211.993.166,00	1.287.751.556.492,00	1.289.510.106.492,00	1.308.463.809.030,10	1.242.957.964.907,00	18.953.702.538,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.864.801.391,00	1.242.562.064.430,00	1.343.528.601.430,00	1.430.494.529.378,80	1.304.164.987.240,00	86.965.927.948,80
5.1.03	Belanja Bunga	221.589.324,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.500.000.000,00	7.027.746.595,00	1.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	78.799.282.670,00	80.285.702.124,00	152.129.962.124,00	164.910.409.981,00	176.519.335.387,00	12.780.447.857,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.998.353.839,00	30.621.603.839,00	37.663.845.839,00	37.663.845.839,00	43.580.019.500,00	0,00
TOTAL BELANJA OPERASI		**2.625.096.020.390,00**	**2.648.220.926.885,00**	**2.829.832.515.885,00**	**2.950.032.594.228,90**	**2.774.250.053.629,00**	**120.200.078.343,90**

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

b. Belanja Modal

1.9. Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan asset lainnya. Berikut rencana perubahan belanja modal Tahun 2025 pada tabel 3.19.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.24**
Rencana Perubahan Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2025

No.	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
5.2	**BELANJA MODAL**						
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.603.485.059,00	17.463.744.493,00	17.463.744.493,00	62.066.565.493,00	2.477.717.100,00	44.602.821.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.051.267.270,00	52.415.147.352,00	100.621.888.902,00	127.405.460.973,00	133.226.642.367,00	26.783.572.071,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.663.617.536,00	120.293.527.662,00	121.293.098.662,00	123.367.993.462,00	141.166.601.172,00	2.074.894.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.727.960.447,00	64.766.232.787,00	93.908.021.787,00	105.002.189.213,00	112.729.496.656,00	11.094.167.426,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	259.741.200,00	259.741.200,00	6.899.101.004,00	6.899.101.004,00	10.693.173.754,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	99.803.400,00	436.761.400,00	475.611.400,00	74.355.570,00	38.850.000,00
TOTAL BELANJA MODAL		**263.306.071.512,00**	**255.298.196.894,00**	**340.622.616.248,00**	**425.216.921.545,00**	**400.367.986.619,00**	**84.594.305.297,00**

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

1.10. Jika melihat Tabel di atas, bahwa pada Perubahan RKPD 2025 yang mengalami kenaikan adalah belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal gedung dan bangunan, dan yang terakhir belanja modal aset lainnya.

1.11.

c. Belanja Tidak Terduga

1.12. Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

1.13. Berikut rencana perubahan belanja tidak terduga Tahun 2025 pada tabel 3.20:

1.14.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.25**
Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	39.422.223.885,00	38.556.305.579,00	38.556.305.579,00	2.187.943.885,00	0,00
TOTAL BELANJA TAK TERDUGA		**30.000.000.000,00**	**39.422.223.885,00**	**38.556.305.579,00**	**38.556.305.579,00**	**2.187.943.885,00**	0,00

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

1.15.

d. Belanja Transfer

1.16. Merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, pemanfaatan belanja transfer Kota Bogor Tahun 2025 untuk kepentingan sosial disekitar wilayah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di galuga dan mengalami penambahan sebesar Rp. 24.750.000,00 Berikut rencana belanja transfer Tahun 2025 pada tabel 3.21:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.26**
Rencana Perubahan Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
5.4	**BELANJA TRANSFER**						
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.665.750.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.736.125.000,00	1.660.750.000,00	24.750.000,00
TOTAL BELANJA TRANSFER		**1.665.750.000,00**	**1.711.375.000,00**	**1.711.375.000,00**	**1.736.125.000,00**	**1.660.750.000,00**	**24.750.000,00**

Sumber: SIPD-RI, Simral, 2025

B. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Ketentuan umum alokasi belanja daerah anggaran Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja pegawai dengan nilai proporsi secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan Tahun 2025 dengan alokasi 14 kali per tahun (termasuk alokasi gaji dan tunjangan ke-14 dan ke-13);
3. Belanja TPP dialokasikan sampai dengan Desember dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
4. Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN tahun 2024;
5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk didalamnya belanja penanganan yang bersifat darurat dan mendesak;
7. Mendukung program strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
8. Belanja Daerah Perangkat Daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 4 (empat) Tujuan dan 12 (dua belas) Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025, dengan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian: Urusan pemerintahan wajib yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan, unsur pemerintahan pilihan sejumlah 5 (lima) urusan, Unsur pendukung urusan pemerintahan sejumlah 2 (dua) urusan, unsur penunjang urusan pemerintahan sejumlah 5 (lima) urusan, unsur pengawasan urusan pemerintahan sejumlah 1 (satu) urusan, unsur Kewilayahan sejumlah 1 (satu) urusan dan Unsur Pemerintahan Umum sejumlah 1 (satu) urusan, serta untuk mendukung program/kegiatan prioritas dan janji politis Wali Kota/Wakil Wali Kota yang terdiri dari :

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
	MISI 1				
1	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru	DISDIK	56.667.099.012	602.130.000	Penambahan anggaran
2	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu	DISDIK	2.893.927.000	250.000.000	Penambahan anggaran
		BAG KESRA	3.119.000.000		Penambahan anggaran
3	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur	BAG KESRA	5.760.000.000	800.000.000	Penambahan anggaran
4	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	DISDIK	1.115.500.000		Penambahan anggaran
5	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal	BAG KESRA	4.130.265.000	392.177.000	Penambahan anggaran
6	Mengembangkan command center	DISKOMINFO		100.000.000	Penambahan anggaran
7	Pengembangan CCTV di lokasi strategis	DISKOMINFO		2.578.256.757	Penambahan anggaran
8	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik	DISKOMINFO		167.500.000	Penambahan anggaran
9	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparatur penegak hukum dan wilayah	DISKOMINFO		54.950.000	Penambahan anggaran
10	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan			2.998.466.400	Penambahan anggaran
11	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Kecamatan Bogor Selatan	7.973.410.000	243.250.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Bogor Utara	1.378.553.000	313.000.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Bogor Tengah	3.085.331.000	136.250.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Tanah Sareal	3.787.420.000	212.000.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Bogor Barat	6.910.180.000	264.250.000	Penambahan anggaran
	TOTAL		**96.820.685.012**	**9.112.230.157**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1.17.

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
	MISI 2				
1	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	DINKES	125.830.000	360.000.000	Penambahan anggaran
		DP3A	90.301.000	159.095.000	Penambahan anggaran
		DINKES	13.428.000.000		Penambahan anggaran
2	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas	DINKES	987.789.800	2.843.227.806	Penambahan anggaran
3	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam	DINKES	7.000.000.000	354.000.000	Penambahan anggaran
4	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	DINKES	69.039.756.102		Penambahan anggaran
5	Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling	DINKES		320.000.000	Penambahan anggaran
6	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	DINKES		579.561.300	Penambahan anggaran
7	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	DPPKB	489.877.446	94.344.846	Penambahan anggaran
		DINKES	701.817.600		Penambahan anggaran
		DKPP	4.084.486.700		Penambahan anggaran
8	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	DKPP	160.935.600	4.248.784.000	Penambahan anggaran
9	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	DLH	545.998.500	1.550.000.000	Penambahan anggaran
10	Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai	DLH	7.085.230.400	2.250.000.000	Penambahan anggaran
11	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	PUPR	6.116.010.200	199.617.700	Penambahan anggaran
12	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	DISPERUMKIM	22.160.468.139		Penambahan anggaran
	TOTAL		**132.016.501.487**	**12.958.630.652**	

1.18.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1.19.

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
	MISI 3				
1	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	DISPARBUD		789.385.200	Penambahan anggaran
2	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan askes bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	DKUMKMDAGIN	727.600.000	318.520.000	Penambahan anggaran
3	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	DISPARBUD	401.571.800	7.772.000	Penambahan anggaran
	TOTAL		**1.129.171.800**	**1.115.677.200**	
	MISI 4				
1	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik	DISHUB	10.452.612.300	16.191.460.321	Penambahan anggaran
2	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda	DISHUB	381.109.300		Penambahan anggaran
3	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	DISHUB	12.295.398.280	391.089.500	Penambahan anggaran
4	Pembangunan lanjutan R3, R2, Inner Ringroad	DPUPR	11.534.010.723	1.500.000.000	Penambahan anggaran
	TOTAL		**34.663.130.603**	**18.082.549.821**	

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

9. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan pendanaan untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen secara akumulatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan;
10. Perencanaan pengadaan barang/jasa di Kota Bogor untuk Tahun 2025 Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Dalam upaya percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) perlu dilakukan sinergitas antar Perangkat Daerah, maka dari itu untuk Tahun 2025 Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam percepatan penanganan tersebut agar mengalokasikan kegiatan pembinaan maupun pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF), sedangkan bagi Kelurahan alokasi sarana dan prasarana diutamakan untuk mendukung percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) baik sifatnya pembinaan secara langsung maupun pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Kelurahan;
12. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat, oleh karenanya belanja daerah dialokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah baik melalui hasil Musrenbang dan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Provinsi;
14. Insentif Fiskal yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Insentif Fiskal tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam hal peningkatan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Alokasi Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu:
    a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
    b. Dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah;
    c. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
    d. Dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

e. Dalam pendanaan yang direncanakan menganut prinsip *"money follow program"* dengan memperhatikan permasalahan serta isu prioritas pembangunan dan Visi Misi Wali Kota Wakil Walikota di Tahun 2025 sebagai dasar pengalokasian pendanaan prioritas.

16. Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diutamakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022;
17. Perencanaan belanja daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan harus melalui analisis kewajaran biaya mengingat waktu yang terbatas dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, BA Kesepakatan Penyesuaian Target Tahun 2025 dan Ranwal RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
18. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada Tahun 2025 harus mempertimbangkan prioritas pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan di tahun 2024;
19. Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan apabila sudah dilengkapi dokumen syarat dasar pembangunan seperti perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, terkecuali untuk pembangunan/ peningkatan/ perbaikan infrastruktur/ bangunan gedung dibawah Rp 200 juta maka DED dapat disusun pada tahun yang sama;
20. Belanja barang dan jasa :
    a. Untuk data masyarakat miskin dan penerima hibah/bantuan sosial harus terdaftar dalam database aplikasi SOLID;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

b. Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi;
c. Penganggaran belanja BLUD alokasi sesuai dengan target penerimaan Tahun 2025;
d. Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor sebagaimana surat usulan penganggaran yang diajukan ke Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2025;
e. Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa pada dapodik tahun 2024;
f. Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan :
    i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
    ii. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
    iii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Pemeliharaan barang milik daerah dialokasi di sub kegiatan Pemeliharaan BMD;
h. Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada dokumen RKBMD.

21. Belanja bunga :
    a. Pembayaran bunga atas pinjaman Perumda Tirta Pakuan kepada World Bank;
    b. Pembayaran bunga atas pinjaman Pemulihan Ekoomi Nasional.
22. Belanja Hibah :
    a. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
    b. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
    c. Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah selaku verifikator.

3.2.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

A. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut disampaikan pembiayaan Kota Bogor pada tabel 3.22:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.27**
Rencana Perubahan Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.497.032.260,00	35.497.032.260,00	35.497.032.260,00	90.432.623.946,00	224.884.836.888,14	54.935.591.686,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	95.565.145.996,00	26.294.145.996,00	26.294.145.996,00	51.294.145.996,00	132.184.766.176,00	25.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**-90.068.113.736,00**	**9.202.886.264,00**	**9.202.886.264,00**	**39.138.477.950,00**	**92.700.070.712,14**	**79.935.591.686,00**

Sumber : SIPD RI, Simral LRA, 2025

1.24. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan, yaitu berupa SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun 2025 yang tertuang dalam tabel 3.23:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.28**
Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	84.935.591.686,00	54.051.328.112,14	54.935.591.686,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	38.648.742.600,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700.000.000,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	URAIAN	TAHUN 2025				Realisasi 2024	+/-
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD		
	Pinjaman Daerah						
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**5.497.032.260,00**	**35.497.032.260,00**	**35.497.032.260,00**	**90.432.623.946,00**	**224.884.836.888,14**	**54.935.591.686,00**

Sumber : SIPD RI, Simral LRA, 2025

b. Pengeluaran pembiayaan, yaitu pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bogor melakukan penyesuaian pembayaran cicilan pokok PEN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut rencana perubahan pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 yang tertuang dalam tabel 3.24.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.29**
Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025					
		RKPD	APBD	APBD PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD	Realisasi 2024	+/-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.271.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	0,00
TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**95.565.145.996,00**	**26.294.145.996,00**	**26.294.145.996,00**	**51.294.145.996,00**	**132.184.766.176,00**	**25.000.000.000,00**

1.25. *Sumber : SIPD RI, Simral LRA, 2025*

1.26.

B. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pembiayaan daerah di Kota Bogor diarahkan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu dan mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan - kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan - kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga didapatkan perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Sebagaimana Peraturan Walikota (Perwali) nomor 6 Tahun 2024 tentang RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, Rencana Struktur Anggaran Tahun 2025 yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut rencana struktur pendanaan Perubahan RKPD untuk Tahun 2025 yang disajikan pada tabel 3.25 berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.30**
Rencana Perubahan Struktur Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD	APBD	PERGESERAN APBD	PERUBAHAN RKPD	REALISASI 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.765.238.115.327,00**	**2.935.449.836.400,00**	**3.201.519.926.448,00**	**3.145.453.462.556,00**	**3.170.702.255.107,24**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.587.178.793.643,00**	**1.666.675.706.831,00**	**1.666.675.706.831,00**	**1.610.609.242.939,00**	**1.458.824.079.309,24**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.144.382.200.000,00	1.224.732.427.374,00	1.224.732.427.374,00	1.159.247.898.075,00	973.768.860.850,00
4.1.02	Retribusi Daerah	392.384.298.949,00	395.084.298.949,00	395.084.298.949,00	404.209.048.951,00	417.445.452.990,24
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36.118.899.553,00	36.118.899.553,00	36.118.899.553,00	36.162.214.958,00	34.287.164.524,00
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.293.395.141,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	10.990.080.955,00	33.322.600.945,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.178.059.321.684,00**	**1.268.774.129.569,00**	**1.534.844.219.617,00**	**1.534.844.219.617,00**	**1.711.878.175.798,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.505.064.127.000,00	1.138.956.711.000,00	1.402.987.525.000,00	1.402.987.525.000,00	1.369.427.755.442,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.995.195.684,00	129.817.418.569,00	131.856.694.617,00	131.856.694.617,00	342.450.420.356,00
5	**BELANJA DAERAH**	**2.920.067.841.902,00**	**2.944.652.722.664,00**	**3.210.722.812.712,00**	**3.415.541.946.352,90**	**3.178.466.734.133,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.625.096.020.390,00**	**2.648.220.926.885,00**	**2.829.832.515.885,00**	**2.950.032.594.228,90**	**2.774.250.053.629,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.271.211.993.166,00	1.287.751.556.492,00	1.289.510.106.492,00	1.308.463.809.030,10	1.242.957.964.907,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.864.801.391,00	1.242.562.064.430,00	1.343.528.601.430,00	1.430.494.529.378,80	1.304.164.987.240,00
5.1.03	Belanja Bunga	221.589.324,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.500.000.000,00	7.027.746.595,00
5.1.05	Belanja Hibah	78.799.282.670,00	80.285.702.124,00	152.129.962.124,00	164.910.409.981,00	176.519.335.387,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.998.353.839,00	30.621.603.839,00	37.663.845.839,00	37.663.845.839,00	43.580.019.500,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**263.306.071.512,00**	**255.298.196.894,00**	**340.622.616.248,00**	**425.216.921.545,00**	**400.367.986.619,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.603.485.059,00	17.463.744.493,00	17.463.744.493,00	62.066.565.493,00	2.477.717.100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.051.267.270,00	52.415.147.352,00	100.621.888.902,00	127.405.460.973,00	133.226.642.367,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.663.617.536,00	120.293.527.662,00	121.293.098.662,00	123.367.993.462,00	141.166.601.172,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.727.960.447,00	64.766.232.787,00	93.908.021.787,00	105.002.189.213,00	112.729.496.656,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	259.741.200,00	259.741.200,00	6.899.101.004,00	6.899.101.004,00	10.693.173.754,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

KODE	URAIAN	RKPD	APBD	PERGESERAN APBD	PERUBAHAN RKPD	REALISASI 2024
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	99.803.400,00	436.761.400,00	475.611.400,00	74.355.570,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30.000.000.000,00**	**39.422.223.885,00**	**38.556.305.579,00**	**38.556.305.579,00**	**2.187.943.885,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	39.422.223.885,00	38.556.305.579,00	38.556.305.579,00	2.187.943.885,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.665.750.000,00**	**1.711.375.000,00**	**1.711.375.000,00**	**1.736.125.000,00**	**1.660.750.000,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.665.750.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.736.125.000,00	1.660.750.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-154.829.726.575,00**	**-9.202.886.264,00**	**-9.202.886.264,00**	**-270.088.483.796,90**	**-7.764.479.025,76**
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.497.032.260,00**	**35.497.032.260,00**	**35.497.032.260,00**	**90.432.623.946,00**	**224.884.836.888,14**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	84.935.591.686,00	54.051.328.112,14
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	38.648.742.600,00
6.1.04	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**95.565.145.996,00**	**26.294.145.996,00**	**26.294.145.996,00**	**51.294.145.996,00**	**132.184.766.176,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.271.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**-90.068.113.736,00**	**9.202.886.264,00**	**9.202.886.264,00**	**39.138.477.950,00**	**92.700.070.712,14**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**-244.897.840.311,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.950.005.846,90**	**84.935.591.686,38**
	TOTAL APBD	**2.770.735.147.587,00**	**2.970.946.868.660,00**	**3.237.016.958.708,00**	**3.235.886.086.502,00**	**3.395.587.091.995,38**

1.27. *Sumber : Simral LRA, SIPD-RI, 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1.28.

Dari tabel 3.25 di atas, masih terdapat defisit anggaran sebesar Rp.230.950.005.846,90 artinya bahwa alokasi anggaran di Perubahan RKPD 2025 masih melebihi total APBD yang direncanakan yakni Rp.3.235.886.086.502,-. Konsekuensinya adalah diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi defisit ini baik dari pendapatan maupun pengetatan belanja.

3.2.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah 2025

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber – sumber penerimaan konvesional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternative pembiayaan, Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN & Obligasi).

3.2.3.1. APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah)

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah Daerah berupa Transfer ke Daerah yang terdiri dari dana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal (IF).

Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya :

1. Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah;
2. DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas;

3. Pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan publik dan lain sebagainya.

3.2.3.2. Peran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSLP) Dalam Pembangunan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2025 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, kesehatan keagamaan dan lingkungan, Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dengan koridor skala prioritas Kota Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Peran perusahaan/sektor swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada Tahun 2025 akan diarahkan untuk:

a. Pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
g. Sarana dan prasarana keagamaan;
h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang prioritas pembangunan Kota Bogor yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor;
2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP;
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP;
5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP, dengan upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR/TJSLP Provinsi Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Jawa Barat;
6. Peningkatan sistem pelaporan CSR/TJSLP, sehingga peran Perusahaan tercatat dan dapat menjadi dasar untuk penghargaan terhadap Perusahaan;
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Kota Bogor, agar seluruh pelaksanaan kegiatan CSR/TJSLP di Perangkat Daerah terkait dapat tercatat dan terlaporkan kepada tim fasilitasi;
8. Pembaruan terhadap peraturan yang mengatur tentang CSR/TJSLP untuk memberikan batasan yang jelas menganai pengertian CSR/TJSLP, bidang-bidang yang dapat didanai dengan CSR/TJSLP, Pembaruan format laporan CSR/TJSLP, dan lain-lain;
9. Pembentukan dan aktivasi kembali Forum CSR/TJSLP Kota Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari proses transisi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang berisi arah kebijakan, strategi, serta penetapan ukuran keberhasilan Pembangunan daerah kemudian nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Bogor. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas Pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tetap disandingkan Bersama program unggulan kepala daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

7.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam proses penyusunan P-RKPD Kota Bogor Tahun 2025, prosesnya memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bogor.

7.1.1. Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakan dasar-dasar transformasi menjadi basis Tingkat pertumbuhan pada tahap berikuitnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu Pendapatan perkapita setara negara maju, Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Tema besar pembangunan tahun 2025-2029 yaitu: penguatan fondasi transformasi dilaksanakan melalui penguatan 5 transformasi yaitu:

1. Transformasi sosial

   meliputi Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi ekonomi

   Meliputi Industri, pariwisata, ekonomi biru, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, BUMN, percepatan transisi energi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

ekonomi sirkular industri, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, digital, integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

   Meliputi transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, dan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Meliputi stabilitas makro, politik luar negeri, pertahanan, hukum, keamanan, dan demokrasi

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

   Meliputi: isu agama, isu budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pangan, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dan energi

Selanjutnya, pada RPJMN Tahun 2025-2029 telah dimuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Ke-delapan Prioritas Nasional tersebut yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

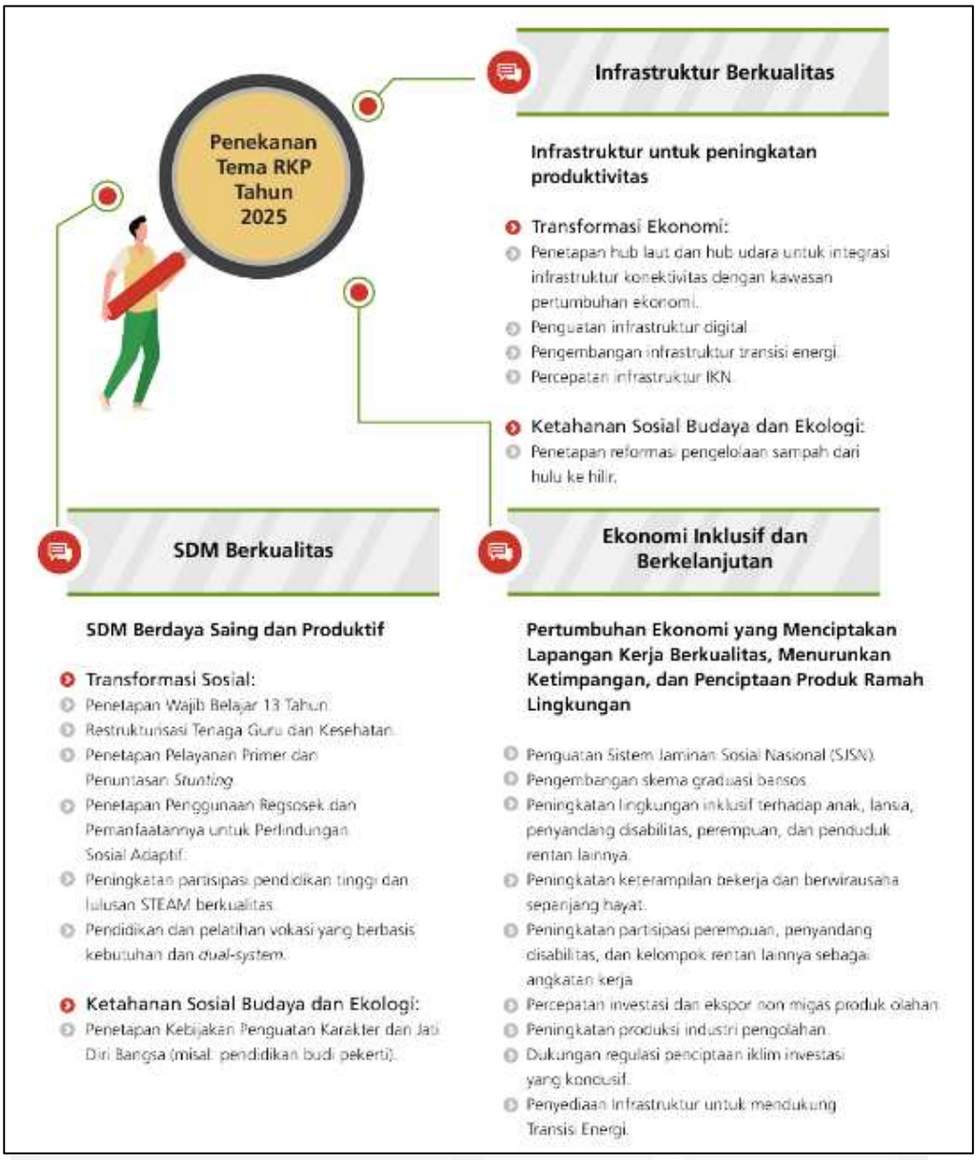
Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

Tema RKP Tahun 2025 yaitu *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada grafik 4.1 dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Gambar Error! No text of specified style in document.**.3**

Fokus Penekanan Tema RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Berikut adalah tabel 4.1 target indikator sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.31**

Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Nasional Tahun 2025

Uraian	Capaian		*Target*
	2022	2023	2025
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,05	5,3-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	5,32	4,5-5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	9,36	7,0-8,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,388	0,379-0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,77	74,39	-
Indeks Modal Manusia	-	0,53	0,56
Penurunan Emisi GRK (%)	28,49	34,09	38,6
Nilai Tukar Petani (NTP)	109	105,21	113-115
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,51	-	104-105

Sumber : BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

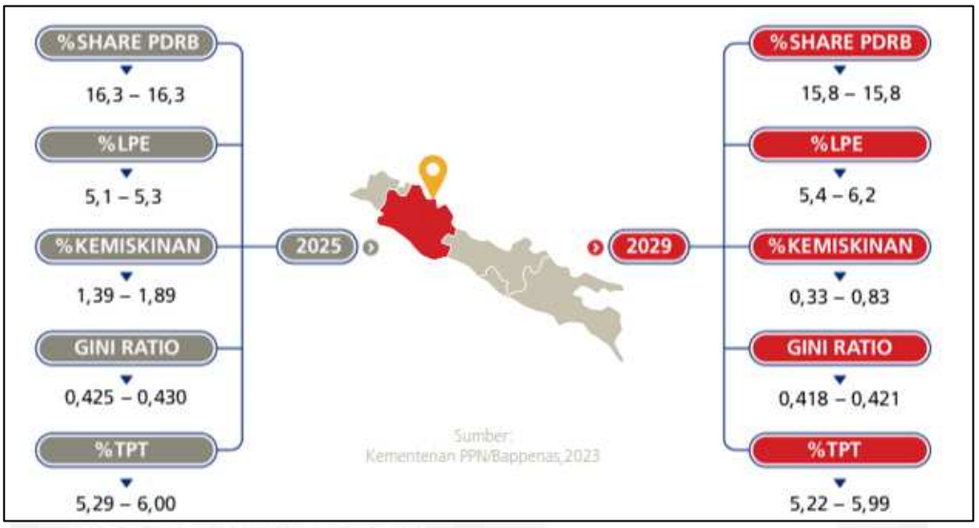
7.1.2. Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Arah pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dibagi berdasarkan wilayah, untuk wilayah pulau Jawa tema pembangunan dikhususkan menjadi "Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan". Provinsi Jawa Barat (Jabar) difokuskan menjadi "Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional" dengan indikator makro seperti gambar 4.2 dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Gambar Error! No text of specified style in document..**4**

Target Makro.Provinsi Jabar 2025-2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran Pembangunan jawa Barat sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta Pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas Lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam Pembangunan.

Provinsi Jawa Barat, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 telah menetapkan 6 (enam) Prioritas Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar, serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada tema RPJPD I (2025-2029), yaitu penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu "meningkatkan kemandirian Masyarakat Jawa Barat" maka tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah :

"**Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat".**

Memasuki masa transisi pemerintahan Gubernur terpilih Tahun 2025-2029, Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan Visi-Misi dan 9 *lengkah ngawangun* (langkah membangun) Jawa Barat sebagai berikut :

- Visi : Istimewa
- Misi :
  1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusaia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan professional pada bidang tugasnya masing-masing
  2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
  3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional;
  4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan public yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan *clear governance*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- 9 *lengkah ngawangun* Jawa Barat
  1. Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).
  2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.
  3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat
  4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan;
  5. Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat;
  6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
  7. Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah

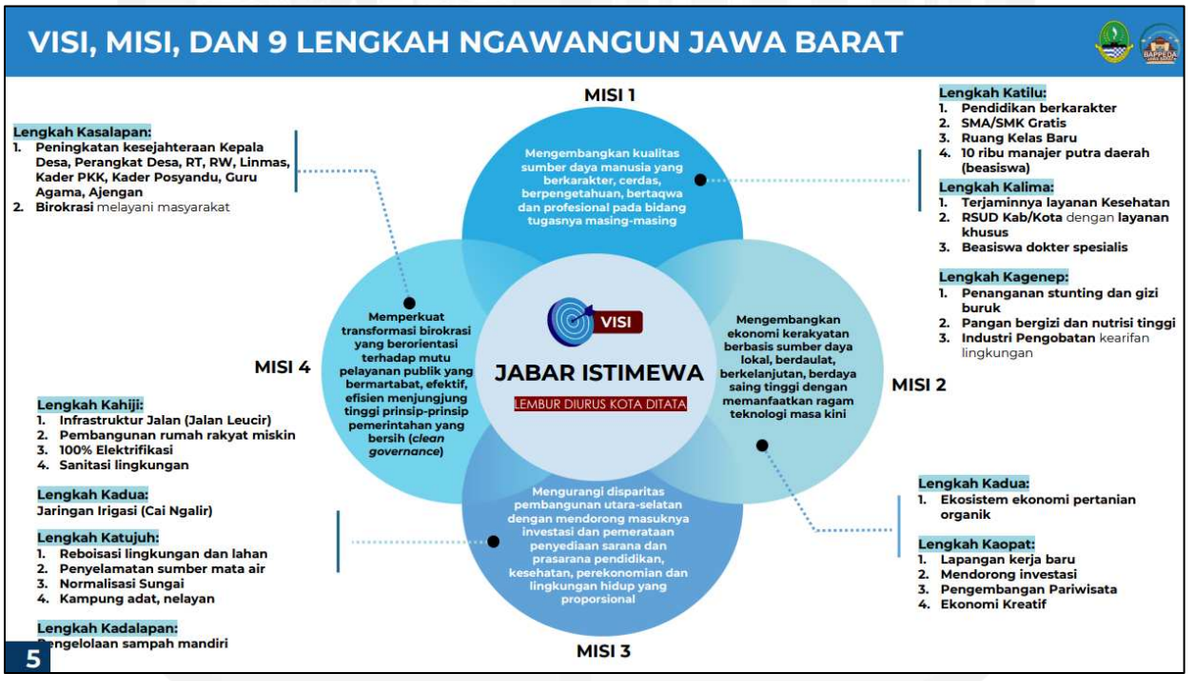
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.

8. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).
9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak. Berikut adalah gambar infografis dari visi, misi dan 9 lengkah ngawangun Jawa Barat.

Gambar 4.3

Visi, Misi dan 9 Lengkah Ngawangun Jawa Barat



Sumber : *Bappeda-Jabarprov.go.idwp content/uploads/2025/03/02.-17032025-FKP-RPJMD-Sekda-edit.pdf*

Selanjutnya telah ditetapkan pemutakhiran target Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.32**
Target Indikator Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	
			2024	RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Agustus)	Persen	6,75	7,88	**6,42 - 6,99**
2	Tingkat Kemiskinan (%) (Maret)	Persen	7,46	7,49	**5,85 - 6,46**
3	Rasio Gini (nilai)	Poin	0,421	0,406	**0,383 - 0,390**
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,92	73,78	73,78
5	Penurunan Emisi GRK (%)	Persen	N/A	7,72	7,72
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	N/A	4,54	4,54
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	111,71	N/A	N/A

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Bappeda-Jabarprov.go.idwp content/uploads/2025/03/02.-17032025-FKP-RPJMD-Sekda-edit.pdf

7.1.3. Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bogor sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup Masyarakat;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif.

Tujuan 2 Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, dengan sasaran:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
3. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar;
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar;
5. Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif;
2. Terciptanya budaya birokrasi Ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional.

Pada masa transisi, Walikota Kota Bogor Terpilih Tahun 2025-2029 telah mencanangkan visi, misi dan Program Prioritas/Unggulan Kota Bogor pada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Visi, misi dan Program Prioritas/Unggulan adalah sebagai berikut :

- Visi:

  Bogor Beres-Bogor Maju
- Misi:
  1. Bogor Pintar:

     Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

untuk seluruh lapisan masyarakat serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.

2. Bogor Sehat:

   Memastikan setiap warga kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

3. Bogor Sejahtera:

   Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Bogor Lancar:

   Menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

- Program Prioritas/Unggulan

1. Bogor Pintar
   a. Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru.
   b. Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu.
   c. Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur.
   d. Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer.
   e. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.
   f. Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.
   g. Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai lembaga.
2. Bogor Sehat
   a. Pemeriksaan kesehatan gratis
   b. Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas
   c. Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan subspesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.
   d. Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

e. Membuat sistem pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi ke seluruh Rumah sakit di dalam dan diluar Kota Bogor
f. Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin
g. Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling
h. Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling
i. Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur
j. Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai
k. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
l. Peningkatan kualitas sanitasi ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan
m. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekses perubahan iklim dan resiko bencana.

3. Bogor Sejahtera
   a. Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.
   b. Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor
   c. Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan
   d. Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya local
   e. Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)

f. Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif
g. Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas
h. Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu
i. Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin
j. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
k. Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparatur penegak hukum dan wilayah
l. Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Yang Berhadapan dengan Hukum.

4. Bogor Lancar
   a. Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik
   b. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda
   c. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
   d. Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja
   e. Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan pemantauan arus lalu lintas.
   f. Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

g. Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan
h. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes
i. Pembangunan gedung pemerintahan terpadu
j. Revitalisasi GOR Padjadjaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu
k. Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi

7.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor

Tujuan dan sasaran pembangunan dicapai melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah pemahaman yang diperlukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor untuk mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun metode, tahapan, atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan salah satu referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.33**
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kota Bogor Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
1.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	
			Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik	Dinas Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada setiap jenjang	Dinas Pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa kepada siswa miskin	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial
			Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan pengembangan inovasi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja	Dinas Pendidikan	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Meningkatkan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan sekolah	Dinas Pendidikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Mengembangkan sekolah negeri baru sesuai dengan Standar Pendidikan Pelayanan Minimal khususnya SMP sederajat dan SMA sederajat yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Dinas Pendidikan	
			Meningkatkan pendidikan inklusif yang berkualitas	Dinas Pendidikan	
			Meningkatkan asupan makanan bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatkan akses terhadap siswa putus sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial
			Mengembangkan PKBM yang mampu menumbuhkan minat dan bakat siswa	Dinas Pendidikan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		Memperkuat literasi masyarakat	Meningkatkan kualitas perpustakaan berstandar nasional	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan pembinaan perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Mendorong minat baca masyarakat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses kesehatan	Penguatan pencegahan, deteksi dini wabah, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pelayanan prima	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang terintegrasi	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security)	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatkan kesadaran PHBS masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah,
			Menurunkan angka perilaku ODF masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah,
			Penegakan hukum kawasan tanpa rokok	Satpol PP	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan pelayanan kuratif bagi masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan puskesmas dan posyandu	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
		Memperkuat pembudayaan olahraga pada masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Meningkatkan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		3. Menurunkan angka kelahiran	Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Optimalisasi pembentukan kelompok bina keluarga seperti BKP dan BKR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pemantapan kualitas keluarga dan penurunan angka kematian bayi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Menurunkan angka stunting pada balita	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Sosial
			Meningkatkan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Sosial
			Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		5. Mengurangi kawasan kumuh dan lingkungan sehat	Meningkatkan hunian layak huni	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			Meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatkan waktu tanggap terhadap kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan	Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja	
			Meningkatkan kompetensi para pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda	Meningkatkan kewirausahaan pemuda	Dinas Pemuda dan Olahranga	
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan
			Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan
		Mengurangi kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan dan ketepat sasaran penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah
			Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin	Dinas Sosial	
			Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana	Dinas Sosial	
			Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat	Dinas Sosial	
			Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana	Dinas Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman
	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga baik ketahanan struktur fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Meingkatkan pembinaan dan pendampingan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

					Perlindungan Anak
			Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Meningkatkan pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Menurunkan jumlah anak terlantar	Dinas Sosial	
			Meningkatkan pelayanan lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan	Dinas Sosial	
		Memperkuat legalitas kependudukan	Meningkatkan layanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda	1. Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			2. Meningkatkan pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			3. Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4. Meningkatkan program pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti, dan upaya untuk mengedepankan wawasan kebangsaan	Dinas Pendidikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat	Meningkatkan penggalian kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya	Badan Perencaanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan
			Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya)	Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan masyarakat dan toleransi	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan peran partai politik dan peran perempuan dalam politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatkan pemberdayaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan penghargaan terhadap pahlawan	Dinas Sosial	
			Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		Penguatan kemajuan kebudayaan bangsa	Memperkuat lembaga kesenian tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Memperkuat pelestarian dan pengelolaan cagar badaya sebagai potensi ekonomi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan pembinaan sejarah dan kualitas museum	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan				
	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pemuda, dan Olahraga
			Mengembangkan kampung kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi	Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM. IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatkan kualitas manajemen koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksanaan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan koperasi yang sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Mengakselerasi pelayanan investasi	Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatkan pengembangan City Marketing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
			Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
			Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Komunikasi dan Informasi
			Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

					Perdagangan, dan Perindustrian
		Mengembangkan usaha sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		2. Menjaga stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan penting		Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan penggunaan produk lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
		Memperkuat aktivitas perekonomian sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan kualitas irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar	Memperkuat efisiensi dan efektifitas dalam proses pengembangan ekosistem pasar	Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedangang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Memperkuat branding produk	Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meemperluas jangkauan konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban	Mengurangi risiko bencana daerah	Meningkatkan manajemen mitigasi dan adaptasi risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

	umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mitigasi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Memperkuat penegakan peraturan daerah serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur penegak perda dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang penegak perda dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatkan kerjasama dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		Mengoptimalkan pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas sistem drainase	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
		Terwujudnya kualitas, konektivitas dan infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum	Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas	Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota	Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau publik budidaya yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau publik kawasan lindung	Dinas Lingkungan Hidup	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan sampah di sumber	Dinas Lingkungan Hidup	
			Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung spbe daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif, dan berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas data dan informasi serta alternatif sumber pendanaan dalam	Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan kematangan organisasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan	Sekretariat Daerah	
		Memperkuat akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	
			Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Inspektorat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

			Optimalisasi capaian kinerja pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah	Inspektorat	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan PD yg sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Inspektorat	
			Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap peraturan yang berlaku	Inspektorat	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
			Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan	
			Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kecamatan	Kecamatan	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas	Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan di wilayah	Sekretariat Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Kecamatan	
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan	Inspektorat	
			Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbang	Seluruh Perangkat Daerah	
		Meningkatkan pengelolaan arsip yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan kualitas pemanfaatan arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Memperkuat administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatkan Penataan organisasi, penataan per-UU, penataan tatalaksana,	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem informasi PBJ, kualitas layanan, PBJ dan Penguatan SDM PBJ	Sekretariat Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

		akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas	Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
		Memperkuat pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi yang memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan pembangunan Kota Bogor	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan penerapan invensi dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan	Sekretariat Daerah	
		Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam rangka menunjang fungsi DPRD Kota Bogor	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	
	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi	Meningkatkan kualitas pengadaan, pemberhentian, sistem informasi dan penatausahaan kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Mengoptimalkan proses mutasi dan promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

				Sumber Daya Manusia	
			Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatkan kinerja organisasi yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani	Meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBN	Inspektorat	

Sumber: Analisis Bapperida, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

7.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran Pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas Pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

7.2.1. Isu strategis dan Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Bogor Tahun 2025 diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2024;
2. Kondisi terkini Tahun 2025;
3. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026;
4. Arah kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Ditetapkan isu strategis Pembangunan Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi
3. Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditetapkan tema Pembangunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 adalah “Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”.

7.2.2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan

Hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka keterkaitan isu strategis dengan permasalahan Pembangunan dituangkan pada tabel dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.34**
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025

Arah Kebijakan Nasional	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Isu Strategis RPD Kota Bogor Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025
1. Sumber Daya Manusia berkualitas 2. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan 3. Infrastruktur berkualitas	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Belum meratanya akses dan mutu kesehatan 2. Belum meratanya akses dan mutu pendidikan 3. Belum optimal layanan pendidikan Inklusif 4. Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia 5. Belum tercapainya pengentasan kemiskinan 6. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi	1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah 2. Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif 3. Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM 5. Belum optimalnya peran BUMD 6. Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 7. Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Arah Kebijakan Nasional	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Isu Strategis RPD Kota Bogor Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025
			8. Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	
	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal 2. Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan 3. Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman 4. Belum optimalnya kualitas penataan ruang 5. Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel 2. Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Analisis Bapperida, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

7.2.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pemerintah kota Bogor melakukan penjaringan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diinput ke dalam aplikasi SIPD RI, kemudian hasil pokir yang telah diakomodir di-*import* ke aplikasi internal Pemerintah Kota Bogor yaitu SIAPMANG (Sistem informasi Aspirasi Perencanaan dan Monitoring Pembangunan). Hal ini dilakukan untuk memastikan supaya tidak adanya tumpang tindih antara usulan pokir dengan usulan pokir lainnya maupun usulan pokir dengan usulan musrenbang. Pokir yang diakomodir dan yang telah dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, berikut adalah keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokir DPRD Tahun 2025

Tabel Error! No text of specified style in document.**.35**
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Kota Bogor
Permasalahan Bidang Pendidikan Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Kesehatan a. Penyediaan alat kesehatan; b. Sarana dan Prasarana Posyandu.	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Penanganan infrastruktur ruas jalan skala kota; b. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan skala kota; c. Pembangunan/Rehabilitasi septictank komunal; d. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase skala Kota; e. Pembangunan/Rehabilitasi TPT dasar Sungai.	P3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan sarana dan prasarana persampahan	P3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman	P3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Kota Bogor
a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan; b. Pembangunan TPT skala pemukiman.	
Permasalahan Bidang Sosial Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Lansia dan Anak	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Tenaga Kerja Pelatihan Kompetensi dan Kewirausahaan	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Permasalahan Bidang Perhubungan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, meliputi Ruas Jalan Kota dan jalan lingkungan;	P2 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Permasalahan Bidang Pertanian a. Pemberian prasarana bibit hewan dan tanaman; b. Pelatihan budidaya ikan, pembibitan hewan dan tanaman.	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Peningkatan SDM para pelaku UMKM; b. Peningkatan SDM para pelaku koperasi;	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Permasalahan Bidang Kepemudaan dan olahraga Sarana dan prasarana olah raga	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Pariwisata a. Sarana dan prasarana kesenian; b. Peningkatan SDM pengelola Pariwisata;	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi

7.3. Program Prioritas Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Berdasarkan dokumen RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 Kota Bogor telah ditetapkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kota Bogor, yaitu:

1. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi
3. Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

7.3.1. Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat

Pada RPJMN Tahun 2025-2029 telah memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden RI. Untuk mendukung hal tersebut, kemudian telah dipetakan dukungan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan prioritas Kota Bogor, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.36**
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
PN.01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia					
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	Penguatan kebebasan masyarkat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
PN.02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru					
1	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Fasilitasi digital technopreneur	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Dinas KUKM Dagin
					Program pengembangan UMKM	Dinas KUKM Dagin
					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
			Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengendalian kesehatan hewan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
					kesehatan masyarakat veteriner	
					Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		N/A	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan dan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
			dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
					Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
					Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Dinas PUPR
PN.03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan nasional di kota Bogor	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas PUPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
		N/A	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program penataan bangunan gedung	Dinas PUPR
					Program pengembangan jasa konstruksi	Dinas PUPR
					Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					Program pengelolaan perkeretaapian	Dinas Perhubungan
					Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan kesenian tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
			Kerja Seluas-luasnya		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan ekspor	Dinas KUKM Dagin
		N/A	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis		Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Dinas KUKM Dagin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
			Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas KUKM Dagin
					Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas KUKM Dagin
					Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas KUKM Dagin
					Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Tenaga Kerja
				(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Program hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja
					Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas KUKM Dagin
					Program perekonomian dan pembangunan	Bag Perekonomian - Setda
					Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas KUKM Dagin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
PN.04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas					
1	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	(P3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
		Pembangunan kualitas keluarga	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
					Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
					Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DPPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
					Program pengelolaan sistem data gender dan anak	DPPPA
					Program perlindungan perempuan	DPPPA
					Program pemenuhan hak anak (PHA)	DPPPA
					Program peningkatan kualitas keluarga	DPPPA
		N/A	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
2	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pelaksanaaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	(P3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemenuhan upaya kesehatan	RSUD
		Fasilitasi literasi digital	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan,	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar	Program pembinaan perpustakaan Program	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
			Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	pengelolaan permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PN.05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri					
-	-	-	-	-	-	-
PN.06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan					
1	Pemerataan ekonomi	Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
		N/A	(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program Pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
PN.07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					
1	Membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
	pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu				Program pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP
					Program promosi penanaman modal	DPMPTSP
					Program pelayanan penanaman modal	DPMPTSP
					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	DPMPTSP
					Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	N/A	N/A	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
					Program penyelenggaraan pengawasan	Itda
					Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Itda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
					Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan
					Program kepegawaian daerah	BKPSDM
					Program pengembangan sumber daya manusia	BKPSDM
					Program administrasi pemerintahan desa	
					Program pengelolaan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bapperida
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bapperida
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Seluruh Perangkat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
					Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program pengelolaan keuangan daerah	BKAD
					Program pengelolaan barang milik daerah	BKAD
					Program penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Kecamatan
					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan
					Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bag Kesra, Bag Hukum, Bag Pemerintahan - Setda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
					Program pengelolaan pendapatan daerah	Bapenda
					Program penelitian dan pengembangan daerah	Bapperida
PN.08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					
1	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program penanganan bencana	Dinas Sosial
					Program penanggulangan bencana	BPBD
					Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
		N/A	(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	BPBD, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8
			Penanggulangan Risiko Bencana			
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

7.3.2. Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan arah kebijakan pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2025

Program dan kegiatan tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan disesuaikan dengan hasil analisis rancangan perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021. Dari hasil analisis arah program dan kegiatan Kota Bogor disesuaikan 10 (sepuluh) tujuan pembangunan berkelanjutan dari 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.37**
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1: TANPA KEMISKINAN	
• Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2: TANPA KELAPARAN	
• Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi • kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil • dan menyusui, serta manula	
Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	
• Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 4. Program Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS	
• Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global • Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Tujuan 5: KESETARAAN GENDER	
• Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. • Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut. • Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
• Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJAGKAU	
• Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	-
Tujuan 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	
• Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. • Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	-
Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR	
• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai masingmasing. • Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN	
• Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya • Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	-
Tujuan 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	
• Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	
• Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia lingkungan.	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. • Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. • Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentukbentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 16: PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
• Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
Tujuan 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	
• Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. • Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RPD Kota Bogor 2025-2026 dan turut menjadi pedoman penyusunan prioritas pembangunan tahun 2025.

7.3.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka rencana dan target kinerja untuk penerapan SPM pada 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.38**
Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2025-2026

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dam numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebeluymnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa	Meningkat dari hasil	Setiap tahun				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		berdasarkan nilai Asesmen Nasional	dua tahun sebelumnya					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					manusia dan tata cara pemenuhan			yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlahi bayi baru dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6			100%					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan yang mendapatakan pelayan kesehatan		Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendpatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendpatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang akan dipenuhi	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Failitasi penyerdiaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memeperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memeperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandng disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
2	Pelayan Informasi rewan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

7.4. Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD 2025

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah Kota Bogor pada P-RKPD Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap:

1. Visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, serta keselarasannya dengan permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang di tingkat Propinsi Jawa Barat dan di tingkat Nasional;
2. Kesesuaian dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi;
3. Kesesuaian dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RKP Tahun 2025;
5. Arah Kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2025-2029;
6. Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024;
7. Hasil reses/penjaringan aspirasi Masyarakat;
8. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan Kota Bogor Tahun 2025.

Seiring dengan dinamika yang terjadi karena perkembangan kondisi global, nasional dan regional serta perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kota Bogor pada tahun 2025, maka dianggap perlu untuk dilakukan *refocusing* dan realokasi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut maka berikut ini telah dirumuskan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Prioritas 1. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan dengan adanya arah kebijakan prioritas pembangunan yang lebih difokuskan pada Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Kesehatan dan Perlindungan Sosial di atas, maka pada tahun 2025 ini prioritas pembangunan lebih diarahkan pada:

1. Penguatan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan;
2. Penguatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Mengurangi Siswa Putus Sekolah;
4. Memperkuat Jaminan Kesehatan;
5. Penurunan Stunting dan *Open Defecation Free* (ODF);
6. Penguatan Intervensi Penangulangan Kemiskinan;
7. Penguatan Sistem Perlindungan Anak, Disabilitas, Lansia dan Anak.

Prioritas 2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan dengan adanya arah kebijakan prioritas pembangunan yang lebih difokuskan pada Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tahun 2025 ini prioritas pembangunan lebih diarahkan pada:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. Penguatan Sumber Daya Manusia Kreatif dan UMKM;
3. Pengembangan Potensi Pariwisata *Heritage*, ilmiah dan Kampung Tematik;
4. Akselerasi investasi Daerah;
5. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
6. Pengembangan Sistem Keuangan Digital.

Prioritas 3. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan dengan adanya arah kebijakan prioritas pembangunan yang lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud di atas maka pada tahun 2025 ini, prioritas pembangunan lebih diarahkan pada:

1. Akselerasi Penataan angkutan Umum;
2. Lanjutan Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Drainase;
3. Akselerasi Pengelolaan Sampah di Sumber Timbulan;
4. Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu;
5. Penuntasan Jalur Pedestrian di Pusat-Pusat Kegiatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

6. Memperkuat Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
7. Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu.

Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik

Dalam rangka menyikapi perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah maka arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan
2. Penanganan bencana;
3. Peningkatan pelayanan kependudukan;
4. Peningkatan kualitas layanan publik
5. Penguatan sistem SPBE melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi;

Selain itu, pada RKPD Perubahan 2025 ini telah dilakukan upaya penyelarasan antara kegiatan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dengan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2025-2029 sebagai percepatan atas janji-janji kampanye yang harus dilaksanakan. Program unggulan ini merupakan salah satu pilar pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029. Berikut secara berurutan, dijabarkan tabel penjabaran prioritas pembangunan daerah dalam program dan kegiatan unggulan Perangkat Daerah dan tabel perubahan target indikator Tujuan, Sasaran dan Program:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.39**
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
1	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	1	Program pengelolaan pendidikan	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru	Dinas Pendidikan						Rehabilitasi 15 SD dan 4 SMP, Pembangunan 6 Ruang Kelas Baru SD, Pembangunan SMP 22 dan SMP 23 (lanjutan)
				Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu	Dinas Pendidikan						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
				Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan, Bagian Kesra						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
				Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer	Dinas Pendidikan						
				Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Dinas Pendidikan						Kolaborasi dengan Program Pemerintah Pusat
		2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	DKPP						Pengadaan cadangan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
			Masyarakat								
		3	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	DPPKB, Dinkes, DKPP						Edukasi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) 68 Kelurahan, Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Lokal (96% dari Balita Gizi Kurang) dan Pemberian PMT untuk Ibu Hamil KEK (100%), Gemar Ikan
		3	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis	Dinas Kesehatan						Kolaborasi dengan Program Pemerintah Pusat
				Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas	Dinas Kesehatan						Penguatan layanan 24 Puskesmas untuk rawat inap khusus persalinan
				Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan subspesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	Dinas Kesehatan						Pengembangan Fasilitas Kesehatan RSUD
				Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat	Dinas Kesehatan						Pembangunan Gedung PSC 119 dan Penguatan 6 Puskesmas untuk IGD
				Membuat sistem pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi ke seluruh Rumah	Dinas Kesehatan						Penguatan Electronic – Sistem Informasi Rujukan (E-SIR) telah tersedia dan terintegrasi dengan PSC 119

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
				sakit di dalam dan diluar Kota Bogor							
				Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	Dinas Kesehatan, Dinsos						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling	Dinas Kesehatan						Penguatan 6 Puskesmas untuk IGD
				Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling	Dinas Kesehatan						
		4	Program Rehabilitasi Sosial	Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin	Dinas Sosial						
		5	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	Dispora						
		6	Program pengembangan	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan	Dispora, Disparbud						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
			kapasitas daya saing keolahragaan	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	Dispora, Disparbud						
2	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	Disnaker						
		2	Program pengembangan UMKM	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	DinKUKM Dagin, Disparbud, DisKominfo						
				Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional	DinKUKM Dagin						
				Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan	DinKUKM Dagin						
				Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang	DinKUKM Dagin						Peningkatan Kapasitas bagi pelaku UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
				mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)							
		3	Program pemasaran pariwisata	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	Disparbud						
		4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan jemput bola perizinan	DPMPTSP						
3	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai	DPUPR						Revitalisasi IPLT (Penambahan Kapasitas IPLT), Pembangunan dan Rehabilitasi SPALDT, akses IPAL Kayumanis
		2	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Dinas Lingkungan Hidup						Pembangunan dan Perbaikan Prasarana TPA/TPS3R/TPST/TPS, Optimalisasi TPS3R,
		3	Program pengelolaan persampahan	Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai	DPUPR						Pengadaan dan Pemeliharaan sarana penunjang TPA/TPS3R/TPST/TPS
		4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi,	Dinas Perhubungan						Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal (BisKita), Angkutan Umum Listrik dan Angkutan Feeder

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
				AC, dan sistem pembayaran elektronik							
				Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda	Dinas Perhubungan						Kajian kelembagaan pengelola perkeretaapian perkotaan, Penyusunan Rinduk Jaringan LLAJ, Rerouting angkutan umum penumpang
				Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Dinas Perhubungan						Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap 1
		4	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes	Dinas PUPR						
				Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi	Dinas PUPR						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
				Pembangunan lanjutan R3, R2, Inner Ringroad	Dinas PUPR						Pembangunan Jalan R3 Lanjutan
		5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekses perubahan iklim dan resiko bencana	Dinas PUPR						
		6	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	Dinas PUPR						Penyusunan DED dan Konstruksi secara bertahap
		10	Program Pengembangan Perumahan	pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	Disperumkim						
		11	Program Kawasan Permukiman	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta	Disperumkim						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Mengembangkan command center	Diskominfo						
				Pengembangan CCTV di lokasi strategis	Diskominfo						
				Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik	Diskominfo						
				Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan	Diskominfo						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
				aparatur penegak hukum dan wilayah							
				Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja	Diskominfo, DISHUB					
		2	Program Penanggulangan Bencana	Bogor Quick Respon dalam penanganan Bencana	Diskominfo, BPBD						
		3	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan	Disdukcapil						
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Kecamatan & Kelurahan						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk sejumlah kelurahan/kecamatan
		5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Yang Berhadapan dengan Hukum	Sekretariat Daerah						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
				Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur	Sekretariat Daerah						Program Kesejahteraan Masyarakat
				Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	Sekretariat Daerah						
				Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai lembaga	Sekretariat Daerah						

Sumber: Analisis Bapperida 2025

Selanjutnya, dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2025 telah ditetapkan perubahan target pembangunan kota Bogor. Berikut, dijabarkan tabel perubahan target indikator Tujuan, Sasaran dan Program:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Error! No text of specified style in document.**.40**
Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	79,03	78,7	79,03						
	Indeks Pembangunan Keluarga	61,81	61,98	62,08						
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	72,74	76,17	77,19	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks SPM (Pendidikan)	N/A	67,2	68	Dinas Pendidikan
					Program Pembinaan Perpustakaan	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	0,466	0,7933	1	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2)	0,0892	0,0914	0,0922	
						Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	0,9497	1	1	
						Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4)	0,00102	0,1143	0,1166	
						Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5)	1	1	1	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6)	0,1252	1	1	
						Anggota perpustakaan (UPLM 7)	1	1	1	
					Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi	N/A	50	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	83,28	83,35	83,28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup/Angka Kematian Ibu	92,02	54,5	92,02	Dinas Kesehatan
	Predikat Kota Sehat	- (tidak ada nilai)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	6,99	2,7	6,9	
						Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	7,73	2,9	7,6	
						Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	92	100	100	
						Prevalensi Hipertensi	10,27	8,4	8,4	
						Prevalensi Diabetes Melitus	2,5	2,05	2,05	
						Prevalensi ODGJ	0,14	0,14	0,14	
						Angka Keberhasilan Pengobatan TB	78,76	90	90	
						Insiden Rate HIV	0,17	0,18	0,18	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Predikat STBM	Pratama	Paripurna	Madya	
						Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	100	100	
						Persentase Balita Berstatus gizi Normal	87,01	87,1	87,1	
						Ratio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673	0,673	0,673	
						Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	79	92	80	
						Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	53	55	55	
						Persentase keluarga yang diintervensi melalui pendekatan keluarga	N/A	94	94	
						Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,3	93,1	93,1	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	N/A	96	85	Dinas Kesehatan
						Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	N/A	96	88	
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	100	96	40	Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Makanan Minuman	Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	N/A	65	65	
						Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan	100	90	60	
						Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	N/A	70	70	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	73,11	72,2	73,61	Dinas Kesehatan
						Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri	14,71	11	16,18	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional atau Internasional	N/A	50	50	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	N/A	80	80	
						Persentase Atlet Berprestasi Dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	N/A	50	50	
						Persentase Perolehan medali dengan jumlah Atlet yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	N/A	50	50	
					Program Pembinaan	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang	20,01	20,45	20,45	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Keluarga Berencana	(MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)				Keluarga Berencana
					Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang disusun	N/A	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	83,1	84,7	85,7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Ketersediaan Energi	2318 kkal/kap/hari	2400 kkal/kap/hari	2400 kkal/kap/hari	
						Ketersediaan protein	76,4 gram/kap/hari	63 gram/kap/hari	63 gram/kap/hari	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	92,96	95,5	95,8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	79,75	47,62	54,55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	82,63	83,25	83,5	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	N/A	100	100	50,97
						Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni	N/A	100	100	
						Persentase tingkat hunian rusunawa/rumahsusun	90	90	90	
						Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin	N/A	100	100	
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase Panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	N/A	54,13	54,13	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana	N/A	100	100	
						Persentase pengelolaan makam yang dikelola pemerintah	N/A	21,03	21,03	
					Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Persentase kelurahan tanggap kebakaran	50	64,7	64,7	Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan
						Persentase SDM aparatur damkar dan penyelamatan yang ditingkatkan kompetensinya	20	30	30	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Penyelamatan Non Kebakaran	Rata Rata respontime penanganan kebakaran	10,75	10,75	10,75	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	76,57	78,37	84,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	91,91	93,68	100	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	73,46	74,99	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	5,49	6,1	6,6	
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Pelanggar Perda KTR Yang di Tertibkan	100	100	100	Satpol PP
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	12.656	12.700	12.750	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourished (PoU)	4,86	4,77	4,68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Angka Kemiskinan	6,67	6,12	6,01	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,94	91,94	92	Dinas Tenaga Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,13	8,11	6,99	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
	Gini Ratio	0,464	0,43	0,41		Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha	N/A	30	30	
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang ditindaklanjuti	87	87	87	Sekretariat Daerah
						Jumlah penduduk miskin ekstrim yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar data P3KE desil1)	N/A	1000 Orang	1000 Orang	
						Jumlah penduduk miskin yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar Data DTKS)	N/A	3000 Orang	3000 Orang	
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,86	3,62	3,62	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	N/A	10	9	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausaaan	N/A	2,175	2,175	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	N/A	21,18	21,18	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	N/A	4	4	
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2	2	2	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi	87	88,5	90	Dinas Sosial
						Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	19,57	18	17,5	
						Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	87	90	100	
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100	100	100	Dinas Sosial
						Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	84	85	86	
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	N/A	5,53	20	Dinas Perumahan dan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	N/A	39,79	12,5	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	N/A	33,67	7,13	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan, Perorangan, dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100,97	100	100	Dinas Kesehatan
Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga	N/A	61,98	61,98	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Indeks Ketimpangan Gender	N/A	0,419	0,419	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	N/A	87	87	Sekretariat Daerah
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Pemeliharaan Anak Terlantar Yang Tertangani	N/A	100	100	Dinas Sosial
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda pelopor yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	N/A	30	30	Dinas Pemuda dan Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai dimensi kualitas legalitas struktur	N/A	79,9	79,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Nilai dimensi kualitas ketahanan fisik	N/A	7,27	7,27	
						Nilai dimensi kualitas ketahanan ekonomi	N/A	68,35	68,35	
						Nilai dimensi kualitas Ketahanan Sosial Psikologi	N/A	62,91	62,91	
						Nilai Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya	N/A	66,61	66,61	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	60,5	60,75	60,75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	N/A	100	100	Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil
						Persentase cakupan perekaman E-KTP	N/A	100	100	
					Program Pencatatan Sipil	Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 tahun	N/A	99,2	99,2	Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	N/A	65	65	
					Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang di perlukan OPD sesuai dengan SOP kerjasama pemanfaatan data	N/A	60,87	60,87	Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor pada klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA	N/A	101	101	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Skor pada klaster 2 (perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif) KLA	N/A	130	130	
						Skor pada kluster 3 (Kesehatan dasar dan kesejahteraan) KLA	N/A	144	144	
						Skor pada klaster IV (Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) KLA	N/A	102	102	
					Program Perlindungan Khusus Anak	Skor pada klaster V (perlindungan khusus anak)	N/A	156	156	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	100	100	100	Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase layanan rehabilitasi bagi masyarakat lanjut usia terlantar	100	100	100	
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100	100	100	Dinas Sosial
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	13	13	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan	Persentase partisipasi partai politik dalam pendidikan politik	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peran masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase partisipasi perempuan perempuan sebagai anggota legislatif	26	26	26	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah kebijakan dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	52,51	52,6	52,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kontribusi event seni budaya dalam CoE	N/A	3 Event	3 Event	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	N/A	15	25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah SDM pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	N/A	5	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	N/A	10	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	8,21	55,71	8,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	N/A	5	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,15	5,3	5,5						
	Indeks Daya Saing Daerah	3,42 (Tinggi)	3,55 (Tinggi)	3,75 (Tinggi)						
Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	7,43	15,64	15,64	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi	N/A	1 Destinasi	1 Destinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	8.093.203	7.742.899	9.711.844	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	N/A	23,44	23,44	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	N/A	25	9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,86	3,62	3,62	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	N/A	10	9	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	N/A	16	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	N/A	3	4,4	
					Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	N/A	3	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya	N/A	3	4,4	
						Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	N/A	3	7	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	N/A	73	73	Sekretariat Daerah
						Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	N/A	18,01	18,01	
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan koperasi berizin	60	70	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	47,2	50	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	11,32	11,37	11,21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	17,05	15,6	15,6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi Aktif	18,74	32,11	6,24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
										Perdagangan dan Perindustrian
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan perekonomian dan SDA	77,08	80,6	83,87	BAPPERIDA
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	NA	21,25	1 (1,998 T)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	100	89	89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	N/A	12,33	10,23	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	1.975 Triliun	1.940 Triliun	1.998 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD	N/A	0,5	0,5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim Penanaman Modal yang terimplementasi	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Incremental Capital	6	6	5,9	Program Perekonomian	Rata Rata nilai capaian kinerja BUMD	N/A	67,5	67,5	Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	Output Ratio (ICOR)				dan Pembangunan					
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	98,4	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Target penerimaan Pajak Daerah	N/A	1.067.401.480.950	1.158.315.472.852	Badan Pendapatan Daerah
						Persentase peningkatan pajak daerah	N/A	18,9	18,95	
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	8,08	30	30	Dinas Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Penetapan Besaran UMK	1 Keputusan	1 Keputusan	1 Keputusan	Dinas Tenaga Kerja
						Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang Ditindaklanjuti	100	100	100	
						Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	N/A	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	2,45	6,37	6,37	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang Difasilitasi Pemasarannya dari data UMKM yang Terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	N/A	5	19,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	3,13	5,71	5,71	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	21,81	14,3	24,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan IKM yang Produktif	25,6	22,89	22,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Pengembangan Ekspor	Nilai Realisasi Ekspor	USD 87.178.132,53	USD 139.025.307,45	USD 139.025.307,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar	N/A	29,19	7,14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	79,78	indikator ini tidak dipakai lagi di 2025	indikator ini tidak dipakai lagi di 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	N/A	11,87	67,12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	N/A	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah	N/A	75,86	75,86	Sekretariat Daerah
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (ikan konsumsi)	-32,44	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Persentase peningkatan produksi perikan (ikan hias)	-12,13	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Pengolahan dan	Persentase Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	1	1	1	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Pemasaran Hasil Perikanan					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item)	65,67	32,68	67,22	
						Persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)	34,12	48,72	51,28	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor	63,1	63,1	63,1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Persentase peningkatan jumlah potong hewan yang dilayani RPH	1,03	1,54	1,52	
						Persentase peningkatan retribusi RPH	13,39	1,54	1,52	
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	30,7	18,42	27,63	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	93,08	93,41	93,57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming	1,87	1,81	1,77	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,66	62,21	66,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	82,46	87,97	93,64	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase Lokasi rawan banjir yang ditangani	2,38	3,57	4,76	
Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,98	80	80,9	Program Penanggulangan Bencana	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	N/A	20	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Risiko Bencana	63,49	65	65	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	-	100	100	
						Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	100	100	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningakatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik SARA yang tertangani	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan	Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	2,15	2,25	2,35						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah										
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Volume to Capacity Ratio	N/A	0,63	0,63	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	60	65	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	N/A	30	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRW/RDTRK)	N/A	50	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	88,95	89	89,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penurunan lokasi genangan	0,89	0,8	0,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal	62	75	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik	8,2	14,22	22,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan jalan	N/A	92,5	92,5	Dinas Perhubungan
						Persentase fasilitas terminal yang terpelihara	N/A	77,78	77,78	
						Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	N/A	98,1	98,1	
						Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	N/A	100	100	
						Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	N/A	88	88	
						Load Factor Angkutan Perkotaan	N/A	59	59	
						Load Factor Angkutan Umum Massal	N/A	79	79	
					Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian	N/A	30	30	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	57,84	57,84	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas penambahan RTH Publik Budidaya yang dibangun	472,56	472,91	472,91	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	48,97	49,77	50,57	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
pembangunan daerah yang berkelanjutan					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5 Ha	0,5 Ha	0,5 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	7,98	8	8	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase Volume Sampah tertangani	81,4	79,25	81,4	
						Persentase jalur wilayah penyapuan	73,75	94,97	94,97	
						Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,96	2,9	2,96	
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,01	4,17	8	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	0,02	2,13	2,13	
						Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	100	98,16	98,16	
						Persentase sarana persampahan yang terpenuhi	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat/lembaga/kegiatan usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	N/A	15	15	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Adiwiyata	N/A	35,6	35,6	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	22,18	19	22,18	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	58	56,32	58	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	N/A	20	20	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	N/A	8	8	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	70	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase sungai yang berkondisi baik	82,46	87,97	93,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase jumlah sungai rawan banjir yang ditangani	2,38	3,57	4,76	
						Persentase irigasi yang berkondisi baik	53,66	62,21	66,49	
						Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air berkondisi baik	68,06	75,09	80,07	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A						
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	4,08	3,75	4,08	Program Pengelolaan Aplikasi dan informatika	Nilai Aspek Teknologi informasi dan komunikasi pada penilaian SPBE	3,75	3,5	3,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Nilai Aspek Kebijakan internal tata Kelola SPBE	4,1	3,7	4,1	
	Nilai AKIP Tingkat Kota	BB (76,23)	A	A		Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	4	3	4	
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP		Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3,88	2,88	3,88	
	Tingkat Maturitas SPIP	N/A	Level 3 (3,326)	Level 3 (3,356)		Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	3,57	3,46	3,57	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	N/A	98	98	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2	Level 2	Level 2	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Kualitas Kebijakan	65	70	70						
	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	N/A	Level 3 (3,055)	Level 3 (3,055)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks prinsip satu data indonesia	2,75	2,75	2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks kualitas data	2,66	2,66	2,66	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Indeks Proses Bisnis Statistik	3	3	3	
						Indeks Kelembagaan	2,83	2,85	2,85	
						Indeks Statistik Nasional	2,01	2,22	2,22	
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10000 penduduk)	25,7	27,5	30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	95	100	100	
						Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	36,5	37,5	38	
						Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	70,97	75	80	
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia	26,61	26,88	27,14	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia	25,95	26,21	26,47	
						Persentase ketercapaian target program perencanaan Pembangunan daerah urusan	71,72	80,6	83,87	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						pemerintahan dan pembangunan manusia				
						Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan perekonomian dan SDA	28,06	28,34	28,62	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan perekonomian dan SDA	27,2	27,47	27,75	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan insfrastruktur dan kewilayahan	28,2	28,48	28,77	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan insfrastruktur dan kewilayahan	26,54	26,8	26,8	
						Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan insfrastruktur dan kewilayahan	71,15	80,6	83,87	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang mendapat nilai pelaporan kinerja perangkat daerah minimal 12,2	N/A	50	50	Sekretariat Daerah
						Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi	N/A	80,55	80,55	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif	N/A	83,33	83,33	
						Presentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	100	100	
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	N/A	100	100	Sekretariat Daerah
						Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	N/A	65	65	
						Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	97,44	98	98,5	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	23,7	25,8	25,9	Seluruh Perangkat Daerah
						Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	25	26,55	26,82	
						Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	12	12,48	13	
						Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	21	21,97	21,98	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	100	100	
						Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	100	
						Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	93	94	94	
						Persentase Kepatuhan Anggaran	100	100	100	
						Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	94	95	95	
						Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	93	94	94	
						Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	87	87,11	87,87	
						Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88	88,75	89,25	
						Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,2	88,38	89,39	
						Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,1	88,38	89,39	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	48	80	80	Sekretariat Daerah
						Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	90	90	
					Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP	100	100	100	Sekretariat Daerah
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang berpredikat swasembada	N/A	4,4	4,4	Sekretariat Daerah
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara aktif	N/A	70	70	Sekretariat Daerah
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	90	95,1	95,1	Kecamatan Bogor Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100	100	100	Kecamatan Bogor Utara
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100	100	100	Kecamatan Bogor Timur
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Utara
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	1	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Timur
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	N/A	88,1	88,1	Kecamatan Bogor Timur
					Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Timur
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	96,3	88,1	88,1	Kecamatan Bogor Selatan
					Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Selatan
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	100	100	Kecamatan Bogor Selatan
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	N/A	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Selatan
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	90	95,1	95,1	Kecamatan Tanah Sereal
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	N/A	100	100	Kecamatan Tanah Sereal
						Persentase keterwakilann perempuan dalam musrenbang kecamatan	N/A	20	20	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase keterwakilan anak dalam musrebang kecamatan	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	100	100	Kecamatan Tanah Sereal
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang aktif	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	N/A	100	100	Kecamatan Tanah Sereal
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	N/A	1	1	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Barat
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	N/A	100	100	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	N/A	88,1	91	Kecamatan Bogor Barat
					Program Pemberdayaan Lembaga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	100	100	Kecamatan Bogor Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Barat
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	N/A	20	20	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Tengah
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	20	20	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	1	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	N/A	2	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	N/A	100	100	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	90	95,1	95,1	Kecamatan Bogor Tengah
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	100	100	Kecamatan Bogor Tengah
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	N/A	100	100	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	N/A	100	100	Kecamatan Bogor Tengah
						Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	N/A	20	20	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	N/A	2	2	
						Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	N/A	1	1	
						Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	N/A	100	100	
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	41,17	51.42	57.14	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yag diselamatkan, dielstarikan dan dimanfaatkan	49,38	52	53	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip tertutup yang dibuatkan sarana temu baliknya	100	100	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal “20”	N/A	70,63	70,63	Inspektorat
						Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	N/A	90,2	90,2	
						Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	N/A	90	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPIP pada level 3	N/A	90	90	Inspektorat
						Nilai Capaian MCP KPK diatas rata-rata nasional	N/A	87	87	
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran	N/A	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	100	100	
						Transparansi Perencanaan Penganggaran	N/A	100	100	
						Transparansi Pelaksanaan APBD	N/A	100	100	
						Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD	N/A	93	93	
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan	N/A	7	7	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Kepatuhan Pensertifikatan Tanah	N/A	34	34	
						Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik	N/A	83	83	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
						Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon	N/A	100	100	
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25 poin	N/A	75	75	Sekretariat Daerah
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	92,27	93	93	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase terselenggaranya penyebarluasan informasi	80	80	90	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35	N/A	88,89	88,89	Sekretariat Daerah
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan	N/A	100	100	Sekretariat Daerah
						Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	N/A	100	100	
						Persentase penanganan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan	N/A	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n	33	36,11	41,66	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	100	100	
						Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	N/A	10	10	
						Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	N/A	30	50	
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	N/A	100	100	Sekretariat DPRD
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	73,1	62,5	74,6	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	44 poin	56,5 poin	44 poin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat	N/A	72	72		Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	150 poin	170 poin	165 poin	
						Indeks Sistem Merit Aspek perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan	112 poin	114 poin	114 poin	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi (2024)	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RKPD 2025	P-RKPD 2025				RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	38 poin	43 poin	38 poin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	4,8	10	10	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

12.1. REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 secara pendanaan dilakukan beberapa penyesuaian baik pengurangan dan/atau penambahan program dan/atau Sub kegiatan baru. Adapun perubahan yang dilakukan berupa penambahan/pengurangan anggaran dan keluaran (output) sub kegiatan serta penyesuaian target indikator program. Beberapa hal penting yang menjadi alasan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan reformulasi terhadap tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta revisi target indikator program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026. Hal ini disebabkan karena hasil capaian indikator pada tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan untuk tahun 2025, sehingga diperlukan penyesuaian.
2. Penting untuk memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan tambahan yang sebelumnya belum tercantum dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2025, seperti yang dibiayai oleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik, Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dalam perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2025 terdapat perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan dari RKPD Tahun 2025 ke Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel** Error! No text of specified style in document.**.41** (terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

12.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan realokasi rencana kerja dalam perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025, serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah Triwulan I RKPD Kota Bogor tahun 2025, terjadi perubahan pagu indikatif dalam rencana kerja Perangkat Daerah dalam mendukung capaian pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam tabel 5.2 berikut ini:

Tabel Error! No text of specified style in document..**42**
Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2025	P-RKPD 2025	SELISIH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.412.853.840	25.549.916.377	-1.862.937.463
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.544.182.076	56.405.088.979	8.860.906.903
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	83.022.164.350	83.608.707.057	586.542.707
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.720.132.310	9.349.468.009	-370.664.301
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	51.573.857.351	50.948.713.612	-625.143.739
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	24.342.615.199	24.049.374.609	-293.240.590
7	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	11.701.931.427	11.684.804.531	-17.126.896
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.930.103.872	20.764.475.223	3.834.371.351
9	DINAS KESEHATAN	619.756.627.468	695.284.757.015	75.528.129.547
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	28.765.461.299	35.015.601.658	6.250.140.359
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.774.571.988	34.843.686.402	10.069.114.414
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	17.654.718.680	17.478.757.368	-175.961.312
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	129.372.896.549	134.188.715.539	4.815.818.990
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15.159.637.219	15.697.274.473	537.637.254
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	152.052.093.171	245.504.569.981	93.452.476.810
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	20.292.874.133	20.146.163.399	-146.710.734

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2025	P-RKPD 2025	SELISIH
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.968.956.821	13.013.855.345	-955.101.476
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	75.972.458.191	83.064.842.964	7.092.384.773
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.131.717.191	19.124.257.879	1.992.540.688
20	DINAS PENDIDIKAN	601.185.186.712	792.046.658.398	190.861.471.686
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.404.995.381	20.004.993.960	6.599.998.579
22	DINAS PERHUBUNGAN	142.232.344.377	163.720.778.843	21.488.434.466
23	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	171.761.025.947	186.709.320.385	14.948.294.438
24	DINAS SOSIAL	18.248.461.784	20.948.228.775	2.699.766.991
25	DINAS TENAGA KERJA	17.626.214.913	22.097.285.370	4.471.070.457
26	INSPEKTORAT	26.602.770.936	27.804.830.333	1.202.059.397
27	KECAMATAN BOGOR BARAT	51.639.193.827	51.756.127.106	116.933.279
28	KECAMATAN BOGOR SELATAN	54.120.033.897	53.986.569.240	-133.464.657
29	KECAMATAN BOGOR TENGAH	35.321.105.620	35.402.508.630	81.403.010
30	KECAMATAN BOGOR TIMUR	25.559.068.168	25.024.389.395	-534.678.773
31	KECAMATAN BOGOR UTARA	29.916.540.054	29.986.936.438	70.396.384
32	KECAMATAN TANAH SAREAL	39.985.990.950	39.667.077.855	-318.913.095
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.153.334.534	48.629.569.506	1.476.234.972
34	SEKRETARIAT DAERAH	124.640.421.504	139.611.381.773	14.970.960.269
35	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	158.106.180.925	162.422.259.926	4.316.079.001
	TOTAL	**2.944.652.722.664**	**3.415.541.946.353**	**470.889.223.689**

Dengan adanya perubahan pagu indikatif terhadap APBD Kota Bogor Tahun 2025, maka berdampak terhadap pagu indikatif berdasarkan urusan dimana pemerintahan berkewajiban dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan kewenangannya yang dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.43**
Pagu Berdasarkan Bidang Urusan

NO	BIDANG	APBD 2025	P-RKPD 2025	SELISIH
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	601.185.186.712	792.046.658.398	190.861.471.686
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	619.756.627.468	695.284.757.015	75.528.129.547

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	BIDANG	APBD 2025	P-RKPD 2025	SELISIH
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160.979.726.078	259.804.774.563	98.825.048.485
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	155.062.836.746	164.308.620.384	9.245.783.638
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	77.166.340.977	78.125.200.914	958.859.937
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.248.461.784	20.948.228.775	2.699.766.991
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.626.214.913	22.097.285.370	4.471.070.457
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.968.956.821	13.013.855.345	-955.101.476
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	19.888.846.043	25.412.028.202	5.523.182.159
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	81.060.100	66.180.100	-14.880.000
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	137.143.452.843	142.289.210.958	5.145.758.115
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.930.103.872	20.764.475.223	3.834.371.351
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67.610.484.395	68.449.582.738	839.098.343
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.404.995.381	20.004.993.960	6.599.998.579
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	142.232.344.377	163.720.778.843	21.488.434.466
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.932.726.288	34.090.653.102	10.157.926.814
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	932.576.000	576.303.000	-356.273.000
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.131.717.191	19.124.257.879	1.992.540.688
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	75.972.458.191	83.064.842.964	7.092.384.773
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	216.874.500	130.150.900	-86.723.600
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	624.971.200	622.882.400	-2.088.800
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.618.012.689	12.424.107.695	-193.904.994
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.366.295.224	2.247.731.724	-118.563.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	BIDANG	APBD 2025	P-RKPD 2025	SELISIH
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.335.636.203	9.437.072.807	101.436.604
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.799.429.256	4.771.384.156	-28.045.100
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.541.624.530	3.273.166.778	731.542.248
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.077.186.000	4.832.189.300	755.003.300
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	492.588.308	785.752.452	293.164.144
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	16.229.554.372	16.116.701.916	-112.852.456
30	SEKRETARIAT DAERAH	124.288.035.301	139.332.419.570	15.044.384.269
31	SEKRETARIAT DPRD	158.106.180.925	162.422.259.926	4.316.079.001
32	PERENCANAAN	22.906.179.599	22.938.753.509	32.573.910
33	KEUANGAN	134.596.021.701	134.557.420.669	-38.601.032
34	KEPEGAWAIAN	23.282.520.440	23.091.972.437	-190.548.003
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.130.333.400	2.457.943.940	-1.672.389.460
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.436.435.600	1.110.621.100	-325.814.500
37	INSPEKTORAT DAERAH	26.602.770.936	27.804.830.333	1.202.059.397
38	KECAMATAN	169.202.774.224	167.586.808.029	-1.615.966.195
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.544.182.076	56.405.088.979	8.860.906.903
	TOTAL	**2.944.652.722.664**	**3.415.541.946.353**	**470.889.223.689**

Perubahan pagu indikatif yang diukur berdasarkan urusan bidang sebagai bentuk peningkatan dalam upaya melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Selain pagu indikatif berdasarkan urusan terdapat pula pagu indikatif berdasarkan program dalam mendukung terwujudnya capaian target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Berikut pagu indikatif berdasarkan program yang tertuang dalam table 5.4 dibawah ini:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.44**
Perubahan Pagu Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	271.326.103	212.782.103	-58.544.000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	72.458.299.306	67.384.520.218	-5.073.779.088

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	141.250.600	104.159.100	-37.091.500
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	29.373.891.604	31.626.248.604	2.252.357.000
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.207.049.965	1.695.047.065	-512.002.900
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.373.720.500	1.854.997.200	-518.723.300
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	641.940.500	584.363.500	-57.577.000
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.734.256.800	5.111.531.700	1.377.274.900
9	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17.500.000	255.500.000	238.000.000
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.164.044	3.019.677.744	1.024.513.700
11	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	479.910.000	479.700.000	-210.000
12	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	335.108.000	325.608.800	-9.499.200
13	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.157.489.700	1.315.465.450	157.975.750
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.462.421.600	1.361.790.800	-100.630.800
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.052.984.800	5.856.607.000	4.803.622.200
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	95.280.000	66.570.000	-28.710.000
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.250.655.600	21.383.780.600	1.133.125.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.245.274.179	17.260.804.012	15.529.833
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.659.398.485	22.379.152.530	-280.245.955
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	366.678.400	326.958.400	-39.720.000
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	569.712.000	177.880.000	-391.832.000
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	169.869.100	169.869.100	0
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	352.296.800	280.537.600	-71.759.200
24	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.352.340.572	4.230.925.444	1.878.584.872
25	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	702.289.900	593.225.600	-109.064.300
26	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.126.380.142	1.066.101.342	-60.278.800
27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	395.315.873.204	465.207.675.767	69.891.802.563
28	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.194.983.504	37.259.273.571	4.064.290.067
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.029.725.500	954.275.500	-75.450.000
30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	84.268.800	3.230.850.000	3.146.581.200
31	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	29.878.200	29.878.200	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
32	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.912.346.450	1.962.228.870	49.882.420
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.547.555.300	4.747.555.300	200.000.000
34	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	154.735.300	140.889.600	-13.845.700
35	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.980.136.400	2.899.060.680	-81.075.720
36	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.720.044.000	3.271.011.900	550.967.900
37	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	39.040.000	39.040.000	0
38	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.436.435.600	1.110.621.100	-325.814.500
39	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.061.017.197	6.284.722.197	3.223.705.000
40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	805.259.611	741.182.463	-64.077.148
41	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	53.156.000	28.893.000	-24.263.000
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	18.139.200	17.939.200	-200.000
43	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.188.539.020	11.356.090.210	7.167.551.190
44	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	427.158.200	443.383.900	16.225.700
45	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.615.556.400	9.441.444.400	-174.112.000
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.785.448.686	20.436.000.486	9.650.551.800
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.211.214.800	17.509.944.800	5.298.730.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		778.917.700	778.917.700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
49	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.764.600	184.764.600	0
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	272.425.642	761632942	489.207.300
51	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.570.557.180	4.492.923.316	922.366.136
52	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.848.105.801	22.457.727.101	5.609.621.300
53	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50.008.191.167	48.907.602.661	-1.100.588.506
54	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.313.894.958	4.991.153.449	-322.741.509
55	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.840.918.802	323.944.131.850	186.103.213.048
56	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	646.096.800	639.768.400	-6.328.400
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	136.366.900	136.366.900	0
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	494.666.000	494.666.000	0
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.176.272.280	10541272080	364.999.800
60	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	115.119.800	107.784.500	-7.335.300
61	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.094.782.452	28.094.782.452	4.000.000.000
62	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	49.420.500	49.420.500	0
63	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	46.003.900	33.313.100	-12.690.800
64	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	54.616.000	32.126.000	-22.490.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
65	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	512.042.800	434.357.550	-77.685.250
66	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167.992.500	167.992.500	0
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	58.624.363.104	65.354.225.564	6.729.862.460
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.251.950.900	1109478030	-142.472.870
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.200.000.000	1.200.000.000	0
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	782.281.865	871.667.065	89.385.200
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	51.348.591	43.555.391	-7.793.200
72	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.220.228.658	5.094.524.918	874.296.260
73	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.927.632.907	14.300.204.582	5.372.571.675
74	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.130.333.400	2.457.943.940	-1.672.389.460
75	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	568.337.100	1.119.958.300	551.621.200
76	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	157.888.000	8.420.000	-149.468.000
77	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	153.354.100	153.354.100	0
78	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	7.526.200	7.417.800	-108.400
79	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	498.102.600	467.915.200	-30.187.400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
	MASYARAKAT VETERINER			
80	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		98.000.000	98.000.000
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.146.880.146	1.138.400.146	-8.480.000
82	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.295.421.380	1.207.741.400	-87.679.980
83	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	294.825.500	275.325.500	-19.500.000
84	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	494.366.900	494.366.900	0
85	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.153.332.456	4.131.615.756	-21.716.700
86	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	783.260.200	1.108.317.000	325.056.800
87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	769.793.830	804.429.928	34.636.098
88	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	270.620.600	1.188.689.400	918.068.800
89	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.209.689.280	2.884.315.080	674.625.800
90	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.276.558.829	2.868.760.929	592.202.100
91	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	29.261.634.200	39.162.763.257	9.901.129.057
92	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	777.574.366	711075866	-66.498.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
93	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.653.923.868	1.380.141.868	-273.782.000
94	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.681.392.800	5.574.871.200	-106.521.600
95	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	79.484.955.987	86.959.987.981	7.475.031.994
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.679.883.555.532	1.720.561.499.681	40.677.944.149
97	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.210.324.800	2.385.431.800	175.107.000
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.172.729.300	1.757.376.400	584.647.100
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.792.302.752	138.632.035.752	74.839.733.000
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	54.100.143.514	73.639.057.678	19.538.914.164
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.084.760.535	849.477.535	-235.283.000
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	782.865.000	782.865.000	0
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648.957.700	411.936.700	-237.021.000
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	624.971.200	622.882.400	-2.088.800
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	216.874.500	130.150.900	-86.723.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	PROGRAM	APBD 2025	P-RKPD 2025	+/-
106	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	81.060.100	66.180.100	-14.880.000
107	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	188.503.100	214.048.100	25.545.000
108	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.606.426.389	1.297.178.468	-309.247.921
109	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	166.598.100	143.188.100	-23.410.000
110	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	248.076.024	216.214.400	-31.861.624
111	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.825.824.800	1.346.983.300	-1.478.841.500
112	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.013.774.200	1.126.592.200	112.818.000
113	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	361.693.500	286.951.200	-74.742.300
114	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	736.560.600	508.014.600	-228.546.000
115	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	230.153.089	205.568.429	-24.584.660
116	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.462.475.400	3.445.871.300	983.395.900
117	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	208.129.800	770.205.600	562.075.800
118	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	91.953.608	427.107.752	335.154.144
119	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.193.200	51.193.200	0
	TOTAL	**2.944.652.722.664**	**3.415.541.946.353**	**470.889.223.689**

Dari tabel di atas dijelaskan kondisi perubahan pagu anggaran di masing-masing program, ada yang tetap, Efisiensi dan penambahan. Efisiensi anggaran berdasarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Adapun penambahan yang paling besar adalah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN serta belanja wajib dan mengikat lainnya.

TABEL Error! No text of specified style in document.**.45**
PERANGKAT DAERAH YANG TERKENA EFISIENSI

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	650.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.888.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.934.100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.947.700
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.918.000
			Belanja Perjalanan Dinas	199.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Paket Meeting Dalam Kota	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.650.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.170.216
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	496.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.900.000
		Pengelolaan Mutasi ASN	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	966.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.774.400
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.308.700
			Belanja Modal Mebel	27.371.600
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	767.600
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.613.100
			Belanja Modal Alat Pendingin	5.860.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.353.500
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.000
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.248.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.988.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.350.000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.196.000
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.394.000
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	892.800
			Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.725.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	1.600.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Pelaksana Kegiatan	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	275.600
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.186.000
			Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	243.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.750.000
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.776.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.400.000
		Pembinaan Disiplin ASN	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.868.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.300.000
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	756.000
			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.533.900
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.200.000
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.370.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.094.800
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	835.960
			Belanja Diklat Kepemimpinan	895.347.500
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	249.490.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
			JUMLAH EFISIENSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.513.329.476
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	105.015.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.281.200
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.499.600
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.620.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	684.705.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.664.100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.618.800
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.344.000
		Pembentukan Paskibraka	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.599.200
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.059.200
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.700.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.320.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.700.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.531.600
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.490.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000
			JUMLAH EFISIENSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.312.258.500
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	736.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.770.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.920.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.825.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.102.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.534.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.401.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	230.965.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.612.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.703.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56.336.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000
			Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	10.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.051.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.350.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	508.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.006.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.760.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.620.800
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.828.800
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.691.200
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.620.800
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.994.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	93.896.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	606.256.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	253.535.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	163.504.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.608.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.301.700
			JUMLAH EFISIENSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.920.247.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	247.289.000
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.890.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.553.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	902.640
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.817.210

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.467.700
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.755.664
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.746.500
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	601.920
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.844.160
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	46.994.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.992.500
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	125.164.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.844.645
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.204.857
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	12.780
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.987.220
			JUMLAH EFISIENSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	636.667.796
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	663.300
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	663.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.459.600
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.510.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	447.573.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.382.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.248.400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.229.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.758.400
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.994.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	794.000
		Penagihan Pajak Daerah	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000
			Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	63.916.200
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.863.600
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.580.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.290.900

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.621.200
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	174.647.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	96.768.640
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	142.539.165
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	22.599.078
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	63.916.200
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.440.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.798.900
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.250.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	97.900.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	69.840.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	304.300
		Pengadaan Mebel	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	381.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	932.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.843.200
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	663.300
			JUMLAH EFISIENSI BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.450.031.483
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	114.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.984.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.966.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.644.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.542.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.521.600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.315.400
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.573.900
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	389.220.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	39.600.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.931.300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	107.575.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.786.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.890.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.895.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	353.699.900
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.585.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.428.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.706.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	413.200
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	579.200
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.783.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.650.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.470.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.620.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.585.300
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.438.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	738.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	dan Pengkajian Peraturan			
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.557.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.050.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.011.800
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.776.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.315.800
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	98.400.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.874.000
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.273.100
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.180.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	18.394.200
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.332.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.126.300
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.653.600
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.710.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.800.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	232.800
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.944.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.526.000
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.396.700
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.711.200
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	294.520.000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.279.800
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.856.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	299.694.000
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	454.800
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	201.122.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.550.000
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	189.842.700
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158.880.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.170.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.418.200
			JUMLAH EFISIENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.909.108.500
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.842.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.407.800
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.435.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.235.000
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	299.200
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.456.800
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	380.000
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	537.600
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.840.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.380.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.840.000
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.743.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.678.800
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	98.008.300
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.300.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.334.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.019.300
			JUMLAH EFISIENSI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	285.773.800
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.633.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.920.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.581.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.254.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	92.648.600
DINAS KESEHATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	824.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	649.600
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	47.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.174.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.830.400
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	369.698.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.675.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.344.490
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.040.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	71.550.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.470.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	20.451.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	324.800
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.113.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.155.000
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.267.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	105.057.643
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.920.566
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.938.070
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.960.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	30.015.000
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.400.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.755.600
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	124.000
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	99.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	67.967.200
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.501.200
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	60.885.400
		Pengadaan Mebel	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	35.097.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	104.324.000
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.371.800
			Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.410.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.100.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	549.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	501.600
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.812.400
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.511.200
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	570.000
			Belanja Perjalanan Dinas	30.646.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Paket Meeting Dalam Kota	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	98.227.200
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	324.800
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51.740.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.914.800
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.875.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	162.400
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.987.200
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	649.600
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.725.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.257.400
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.239.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	418.000
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.995.200
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	459.984.800
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.840.000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	21.297.600
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	529.200
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.427.200
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.750.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55.720.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS KESEHATAN	2.589.769.669
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	980.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.500.800
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.521.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.767.500
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.275.700
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	112.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	105.600
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.818.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.285.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.550.000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.293.200
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	148.800
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	177.200
			Belanja Modal Alat Pembersih	15.107.600
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	501.600
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.419.200
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.350.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.948.800
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.672.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.425.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pembersih	15.107.600
			Belanja Modal Alat Pendingin	52.162.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	19.895.400
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	851.600
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.575.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.950.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.040.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	789.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	226.800
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.606.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	836.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.280.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.763.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.575.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.350.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	108.400
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.301.400
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.200
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	342.700
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.100.000
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.100.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	451.019.500
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.084.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	301.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.689.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.428.600
			Belanja Natura dan Pakan-Natura	792.300
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.105.000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.451.100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.657.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	65.000.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.334.100
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.300.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	234.500
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.650.000
		Penyusunan Konten	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	252.700
		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.500
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	288.800
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	731.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.695.700
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.690.000
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.600.000
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.782.400
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.800.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.424.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	794.200
			JUMLAH EFISIENSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	383.898.400
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	33.870.018
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.970.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.048.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.409.600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	12.376.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.174.500
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.426.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	209.658.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.725.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.500.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.910.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149.250.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.152.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.350.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	173.130.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.450.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.370.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32.850.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.560.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	85.761.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.625.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.338.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.300.000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	308.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137.310.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.850.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	182.800
			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.661.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000
			Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.980.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.910.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.147.715.918
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.800.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.894.110
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.436.100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.681.300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	345.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.288.700
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	333.304.000
			Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.881.500
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.084.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.773.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.990.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.295.000
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	9.055.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	54.232.397
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.382.070
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.968.020
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.537.914
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.757.994
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.434.150
			Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.739.099
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.440.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	2.879.340

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Peralatan Komputer Lainnya	
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.780.000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.700.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.090.000
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31.290.100
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.384.600
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer	70.355.800
			Belanja Modal Personal Computer	139.859.500
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	92.889.500
	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.955.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.830.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.930.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.600.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.803.360
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.452.265
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.680.000
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	82.472.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.340.000
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.140.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.650.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	31.861.624
			JUMLAH EFISIENSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.480.892.443
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	275.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.149.300
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.542.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.250.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109.975.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	12.336.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.320.800
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	74.977.950
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.900.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.825.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.563.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.750.000
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.849.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	505.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.930.000
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	396.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.575.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.364.800
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	325.200
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.135.000
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.832.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.404.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.757.600
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	46.058.500
			Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	22.581.900
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.310.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.143.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.717.677
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.435.812
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Personal Computer	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	422.400
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.517.360
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.837.500
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.297.500
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	20.709.300
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.205.800
			Belanja Modal Mebel	46.823.100
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.187.600
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.600.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.450.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.550.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	38.924.145
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.200
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	490.800
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.800.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	396.200
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	733.424.344
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.283.600
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	16.863.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.783.100
		Penyediaan Komponen Instalasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.378.400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	44.814.700
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.862.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.989.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.500.000
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	50.427.900
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	120.251.600
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.833.100
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	46.412.100
			Belanja Modal System/Power Supply	32.345.500
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.469.600
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.035.600
			Belanja Modal Mebel	54.351.100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.010.000
			Belanja Pakaian Adat Daerah	8.476.780
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.591.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	33.150.000
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	49.140.000
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	453.263.733
			Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	28.695.495
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.150.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	44.764.140
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.400.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.550.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.250.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.515.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.771.200
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.522.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.488.150.148
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.295.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.481.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.134.400
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	370.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	248.322.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.384.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.871.720
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.025.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.755.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178.320
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.200
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.240
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	317.137.080

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.555.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.427.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.632.300
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.602.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.070.000
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.897.400
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.960.000
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.743.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.323.600
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.710.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.747.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.300.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.942.791
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	111.072.000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	760.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.360.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.937.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	221.933.100
			Belanja Modal Alat Pendingin	20.709.300
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	20.242.400
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.732.300
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.150.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	470.800
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.421.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.810.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	554.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Kabupaten/Kota			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.455.000
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.732.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.980.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	966.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.910.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.285.300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.126.700
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.800.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.930.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.678.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.415.000
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.715.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.219.600
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.054.727.591
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.864.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	779.220
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.207.500
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.758.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.548.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.475.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.425.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	546.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.150.000
		Seleksi Atlet Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	818.800
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.217.600
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.770.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.070.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.851.000
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.516.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000
		Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.365.120
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	169.338.100
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	149.084.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.623.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	14.991.500
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.692.060
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.447.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.097.320
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.734.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.437.090
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.812.500
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.030.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	362.400
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.380.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.209.575.710
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.893.600
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.790.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	779.520
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.160.220
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.936.890
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.343.800
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.466.530
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.212.500
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.163.800
			Belanja Modal Personal Computer	55.943.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	590.600
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.088.000
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	28.143.900
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.679.400
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.620.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	183.200
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.795.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.935.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.439.670
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.970.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.293.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.342.800
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.803.150
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.261.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.472.500
			Belanja Modal Alat Pendingin	7.668.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.409.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	482.880
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	982.280
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.011.500
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.108.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.104.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.960.000
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	335.597.740
DINAS PENDIDIKAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	71.362.600
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97.009.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.155.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.347.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.682.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	18.108.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.180.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	358.735.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	107.460.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	886.947
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	19.062.000
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	32.598.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	91.650.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	73.076.000
		Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	61.477.200
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.195.200
			Belanja Modal Alat Pembersih	6.798.400
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.113.700
			Belanja Modal Personal Computer	89.744.000
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.205.600
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	122.470.000
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	970.800
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.340.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	266.660.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.767.600
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.515.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	185.340.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.492.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.893.600
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.080.400
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.995.000
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.089.600
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.340.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.880.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.720.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.845.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	111.440.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.720.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.520.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79.600.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	660.500
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	792.200
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.160.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000
			Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	95.216.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79.440.000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.120.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.528.400
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	254.322.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.400.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	412.188.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	181.200
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.880.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.849.800
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.730.000
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.168.800
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	877.700
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.860.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.488.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.785.500
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.900.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.738.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71.640.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.951.500
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.100.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	316.800
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.850.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.461.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PENDIDIKAN	3.642.532.647
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	21.297.600
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	991.200
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.250.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.100.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34.875.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.152.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.806.000
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.400
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.438.000
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	333.200
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.499.500
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	108.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000
		Pengendalian Program KKBPK	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.175.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	12.381.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	189.600
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.400
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	40.674.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.888.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.450.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.680.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.300.000
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22.500.000
			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.515.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.450.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.675.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52.906.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.205.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	138.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.990.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.888.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	555.580
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.585.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000
		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400.000
		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	410.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.685.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.756.800
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.526.400
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.624.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.900.000
		Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.344.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.310.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.875.000
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.255.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.502.000
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.000
			Belanja Sewa Photo and Film Equipment	1.508.774
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.900.000
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.114.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.020.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.375.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.450.000
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.749.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.140.000
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.303.500
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.265.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.666.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.056.000
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	180.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.520.000
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	388.800
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.311.700
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	386.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.070.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	836.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.255.000
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.501.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.350.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.850.000
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	758.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.920.000
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.180.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.141.800
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.800.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.182.450.554
DINAS PERHUBUNGAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	924.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.972.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.046.520
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.635.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.400.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.325.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	649.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.035.100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.355.700
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.958.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	588.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.220.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.751.000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000
		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	212.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	748.000
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	486.600
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.600
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.209.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.703.045
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.170.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.080.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	852.507
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.100.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.082.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.122.500
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.870.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.300.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	962.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.318.800
			Belanja Modal Alat Pendingin	13.730.700
			Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.363.100
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.937.900
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	669.300
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	708.000
		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.320.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.932.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	708.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	478.400
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.880.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	960.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.110.400
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.503.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.377.600
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PERHUBUNGAN	459.255.472
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.128.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.285.700

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.725.700
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.057.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.436.900
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.006.700
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.799.400
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.841.000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.138.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.575.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.330.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.766.513
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	836.000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.160.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.890.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.100.000
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.558.400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.606.400
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	47.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.205.000
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.436.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.800.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.050.000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.716.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	101.989.886
		Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.910.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	569.654.399
DINAS SOSIAL	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205.885.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.980.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.656.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.665.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.890.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.480.000
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.240.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.758.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.092.800
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.750.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.700.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.780.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			JUMLAH EFISIENSI DINAS SOSIAL	496.376.800
DINAS TENAGA KERJA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.786.000
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.542.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	158.287.500
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.557.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.850.000
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.690.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.675.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.080.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.050.000
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.410.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.540.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.348.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.550.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.965.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.426.500
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000
			JUMLAH EFISIENSI DINAS TENAGA KERJA	455.057.000
INSPEKTORAT DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.420.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137.310.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	303.585.000
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.196.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.546.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.086.000
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.280.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79.600.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.376.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.298.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.752.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.375.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95.520.000
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.930.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.192.000
		Reviu Laporan Kinerja	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.550.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.328.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.870.000
			JUMLAH EFISIENSI INSPEKTORAT DAERAH	967.214.000
KECAMATAN BOGOR BARAT	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	548.200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.142.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.435.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.086.100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	27.087.600
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.121.900
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	28.936.600
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.121.600
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.819.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.541.400
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.699.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.960.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	730.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.648.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.018.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.725.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	836.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.697.400
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.045.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.191.300
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.850.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	487.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.625.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24.820.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	21.390.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.076.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.365.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.953.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.575.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.241.400
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.079.200
			JUMLAH EFISIENSI KECAMATAN BOGOR BARAT	475.533.900
KECAMATAN BOGOR SELATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	728.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.450.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.015.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.626.400
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.540.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.372.600
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.090.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	199.938.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	930.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.350.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.340.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.086.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	930.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.896.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.773.894

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.630.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.560.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	194.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	775.000
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.050.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	65.274.900
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.160.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.700.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.112.800
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.768.700
			JUMLAH EFISIENSI KECAMATAN BOGOR SELATAN	759.912.894
KECAMATAN BOGOR TENGAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.326.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	51.750.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.915.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.691.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.318.600
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.772.800
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	45.131.900
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.959.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56.100.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.621.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.302.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.684.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.273.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.507.500
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.920.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.864.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.339.300
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.582.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.228.880

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.761.812
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.280.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	48.084.400
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.357.800
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.340.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.323.200
			JUMLAH EFISIENSI KECAMATAN BOGOR TENGAH	503.945.192

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
KECAMATAN BOGOR TIMUR	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.749.200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.776.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.390.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	44.677.800
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.615.200
			Belanja Modal Alat Pendingin	58.257.600
			Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	79.581.600
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	188.265.600
			Belanja Pakaian Adat Daerah	1.695.356
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	245.598.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.840.000
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.580.066
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.893.400
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.725.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.018.400
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.670.400
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.050.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.387.300
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.900.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.825.700
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	843.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.377.400
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.360.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	221.100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.046.600
			JUMLAH EFISIENSI KECAMATAN BOGOR TIMUR	848.205.722
KECAMATAN BOGOR UTARA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.750.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.005.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.654.400
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.976.800
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.692.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	779.200
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.652.200
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.410.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.524.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.264.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.560.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	718.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.118.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.566.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.615.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.827.200
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.084.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.971.400
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.120.700
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.516.600
			JUMLAH EFISIENSI KECAMATAN BOGOR UTARA	309.345.300
KECAMATAN TANAH SAREAL	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.177.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.466.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.350.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.759.900
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.352.346
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.740.000
			Belanja Pakaian Adat Daerah	19.058.800
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.964.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.812.800
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.975.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.825.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.300.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.721.600
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.050.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.524.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.900.000
			Belanja Sewa Taman	5.434.455
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.912.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.913.987

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.533.026
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	83.807.800
			Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	99.477.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.605.200
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.250.000
			JUMLAH EFISIENSI KECAMATAN TANAH SAREAL	646.280.914
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.734.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.960.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.830.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.408.000
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.771.800
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.104.000
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.440.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.024.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.392.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.495.900
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.299.900
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.540.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.700.000
			JUMLAH EFISIENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	351.749.600
SEKRETARIAT DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000
	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.419.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	101.060.000
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.076.000
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.887.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	335.060.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	56.616.700
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	16.025.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.364.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	43.671.700
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.463.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.125.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.465.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	372.384.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	270.640.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	79.600.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.028.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74.996.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.538.400
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.853.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59.700.000
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.286.800
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	615.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.933.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.140.000
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.650.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.900.000
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.780.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.700.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.300.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.240.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	214.524.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	232.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.414.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	214.524.000
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.895.000
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.081.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.860.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.259.400
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.500.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.194.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	381.120.000
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.648.200
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.655.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.070.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	155.635.000
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.097.600
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.706.092

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.597.400
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.375.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.010.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.545.000
			Belanja Sewa Mebel	1.842.800
			Belanja Sewa Taman	5.434.455
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.360.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.780.000
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.352.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.206.000
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.140.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.557.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.675.000
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	99.985.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.075.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.440.000
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.609.600
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.829.300
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.526.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.644.000
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.900.000
	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.411.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.645.400
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	64.945.500
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.573.000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	752.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.238.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.570.000
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	470.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.800.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.266.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.611
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.660.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.375.000
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	774.000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.146.810
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.545.000
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.592.000
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.032.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.234.500
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.730.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.768.400
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.880.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.022.500
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.585.000
			JUMLAH EFISIENSI SEKRETARIAT DAERAH	5.484.310.268
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.360.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.659.921.000
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.605.294.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	9.723.240.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	405.074.000
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.770.000
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	595.815.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	EFISIENSI BELANJA (Rp)
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.555.448.000
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	298.126.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.063.190.000
			JUMLAH EFISIENSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	30.118.238.000
			TOTAL JUMLAH EFISIENSI SELURUH PERANGKAT DAERAH	69.582.036.360

Sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan efisiensi anggaran pada sejumlah perangkat daerah. Kebijakan efisiensi ini merujuk pada arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya optimalisasi belanja untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap rencana belanja masing-masing perangkat daerah, dilakukan rasionalisasi anggaran melalui pengurangan komponen belanja yang dinilai dapat ditunda, disederhanakan, atau disesuaikan kembali skalanya tanpa mengurangi pencapaian target output yang telah ditetapkan.

Sebagai ilustrasi, **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** mengalami penyesuaian dari anggaran murni sebesar Rp27,41 miliar, dengan efisiensi sebesar Rp2,51 miliar, sehingga menjadi Rp24,89 miliar pada RKPD Perubahan. Penyesuaian serupa juga dilakukan pada perangkat daerah lainnya, dengan total nilai efisiensi yang signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam menjaga efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal

Tabel Error! No text of specified style in document.**.46**
PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN EFISIENSI BELANJA APBD TA. 2025

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan trotoar seputar GOR Pajajaran (segmen Jl. Ahmad Yani)	Infrastruktur dan sanitasi	3.400.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan trotoar seputar GOR Pajajaran (Segmen Jl. Kesehatan)	Infrastruktur dan sanitasi	1.290.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan reviu Perencanaan Perbaikan Trotoar Jl, A. Yani (Segmen Jl. Kesehatan-Air Mancur)	Infrastruktur dan sanitasi	100.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Perbaikan Trotoar seputar GOR Pajajaran (Segmen Jl. Ahmad Yani)	Infrastruktur dan sanitasi	100.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Perbaikan Trotoar Seputar GOR Pajajaran (Segmen Jl. Kesehatan)	Infrastruktur dan sanitasi	100.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasn Perbaikan Trotoar Seputar GOR Pajajaran (Segmen Jl. Kesehatan)	Infrastruktur dan sanitasi	100.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Kolonel Ahmad Syam	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemelihara	5.2.04.01.01.0004 Belanja	Pemasangan Kanstin Jalan	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		an Berkala Jalan	Modal Jalan Kota	Tumenggung Wiradiredja		
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Mandala Raya	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Pangeran Ashogiri	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Kayumanis	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Dadali	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Raya Cilebut	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Aria Surialaga	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Brigjen Saptadji	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan RE. Abdullah	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Raya Ciomas	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Letjen Ibrahim Ajie	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Bubulak - Loji	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Cifor	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Mayjen Ishak Djuarsa	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemelihara	5.2.04.01.01.0004 Belanja	Pemasangan Kanstin Jalan KH. TB. M. Falak	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		an Berkala Jalan	Modal Jalan Kota			
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Dr. Semeru	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Bina Marga	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Padi	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Siliwangi	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Sukasari	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Veteran	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Sempur	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Salak	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Perintis Kemerdekaan	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Kanstin Jalan Paledang	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Bogor Baru	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Sawojajar	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Pengadilan	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Kapten Yusuf	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan Aria Wiranata	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemasangan Kanstin Jalan BNR	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Babadak	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Jalan Kec. Utara Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	60.046.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Tanah Sareal Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Barat Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	60.046.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Barat Paket 2	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Barat Paket 3	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Timur Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	60.046.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Perbaikan Kanstin Kec. Bogor Tengah Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	60.046.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Tengah Paket 2	Infrastruktur dan sanitasi	60.046.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Selatan Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Utara Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Tanah Sareal Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Barat Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Barat Paket 2	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Barat Paket 3	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Timur Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Perbaikan Kanstin Kec. Bogor Tengah Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Tengah Paket 2	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemasangan Kanstin Kec. Bogor Selatan Paket 1	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemelihara	5.2.04.01.01.0004 Belanja	Pemeliharaan Berkala Jalan Raya Kertamaya	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		an Berkala Jalan	Modal Jalan Kota			
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan BNR	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Dreded	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Kp. Buntar	Infrastruktur dan sanitasi	150.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Cipaku	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Cipinang gading	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Bogor Selatan	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Bogor Selatan	Infrastruktur dan sanitasi	64.817.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.05 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.19 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	Rehabilitasi TPT di RW.06 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
			Penanggulangan Bencana Alam			
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.09 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Perencanaan	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Pengawasan	Infrastruktur dan sanitasi	64.817.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.01 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.05 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.12 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.01 Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Perencanaan	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Pengawasan	Infrastruktur dan sanitasi	64.817.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.18 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.05 Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan	Infrastruktur dan sanitasi	174.460.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.09 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan	Infrastruktur dan sanitasi	175.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman	Rehabilitasi TPT di belakang Puskesmas Kelurahan Mekarwangi	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Kecamatan Tanah Sareal		
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.08 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Perencanaan	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Pengawasan	Infrastruktur dan sanitasi	64.817.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.10 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.08 Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.03 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi TPT di RW.09 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Perencanaan	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsultan Pengawasan	Infrastruktur dan sanitasi	64.817.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Airlangga	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Brawijaya	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Gunung Gede	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Bangau	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Cifor	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Taman Cimanggu Tengah	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Kp. Sukawarna Cipaku	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja	Perbaikan Jalan R.M. Tirto Adhi	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
			Modal Jalan Kota	Soerjo (Jl. Kesehatan)		
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Pelita Jaya II	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Perbaikan Jalan Pelita Jaya III	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 8	Infrastruktur dan sanitasi	99.688.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 9	Infrastruktur dan sanitasi	99.688.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Paket 8	Infrastruktur dan sanitasi	97.110.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota	Konsultan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Paket 9	Infrastruktur dan sanitasi	97.110.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Ahmad Yani	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase RW. 16 Kel. Katulampa	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Penghulu Jaya	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Guru Muhtar (Lanjutan)	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Gunung Gede 2	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Gunung Gede (Lanjutan)	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Perdana Raya (Lanjutan)	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Abesin	Infrastruktur dan sanitasi	184.372.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Kertamaya	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Cimanggu Barata	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Bina Bhakti	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Pabuaran Cimanggis Simpang BCC	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Saluran Jl. Ahmad Syahyani	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Mayor oking	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. RE. Abduillah Simpang Gunung Batu	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Perbaikan Drainase Jl. Aria Surialaga	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Konsultan Perencanaan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Paket 3	Infrastruktur dan sanitasi	95.216.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Konsultan Perencanaan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Paket 4	Infrastruktur dan sanitasi	95.216.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Konsultan Pengawasan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Paket 4	Infrastruktur dan sanitasi	77.200.000
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Konsultan Pengawasan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Paket 5	Infrastruktur dan sanitasi	77.200.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Konsultan Pengawasan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Paket 6	Infrastruktur dan sanitasi	77.200.000
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Belanja material untuk pemeliharaan rutin jalan, darainase, dan trotoar	Infrastruktur dan sanitasi	2.387.870.000
					JUMLAH	**26.940.609.000**
DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	Pengadaan Cermin Tikungan (sebanyak 38 Unit)	Infrastruktur dan sanitasi	154.066.668
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	Pengadaan Rambu Standar Uk.75 (sebanyak 48 Unit)	Infrastruktur dan sanitasi	146.999.520
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Pemisah Lajur (sebanyak 1.065 m2)	Infrastruktur dan sanitasi	630.204.165
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	Pengadaan dan Pengecatan Marka Zebra Cross (sebanyak 115 m2)	Infrastruktur dan sanitasi	68.050.215

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		Rekayasa Lalu Lintas				
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Pengadaan Lampu LED 120 Watt Spek Medium sebanyak 180 unit @ Rp. 5.345.800	Infrastruktur dan sanitasi	962.244.000
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Pengadaan Lampu LED 120 Watt Spek Biasa sebanyak 200 unit @ Rp. 3,137,800	Infrastruktur dan sanitasi	627.560.000
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Pengadaan Lampu Pedestrian Jalur pejalan kaki SSA sebanyak 58 unit lampu @ Rp. 4,689,900	Infrastruktur dan sanitasi	272.014.200
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Pengadaan Peralatan Keselamatan Teknisi APJ (Celana Lapangan Tactical (37 pcs); Helm Safety Topi Pelindung (37 pcs); Sepatu Lapangan (Sepatu Keselamatan) (37 pasang); Tas Peralatan (37 pcs); Kaos Lapangan Lengan Panjang (74 pcs).	Infrastruktur dan sanitasi	83.997.400
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.1.02.01.01	Tang Jepit dan Tang Potong Taspen, Obeng Plus, Obeng Minus Sarung Tangan Karet Digital Clamp Meter Dcm400Ad (6)	Infrastruktur dan sanitasi	28.625.400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
			.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			
					JUMLAH	**2.973.761.568**
DINAS SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Paket Nutrisi untuk PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Disabilitas dan Lanjut Usia) 1. Susu Tinggi Kalsium : 100 Dus x 139.500 = Rp. 13.950.000,00 2. Makanan/Sembako : Kacang Hijau 100 Kg x 27.500 = Rp. 2.750.000 3. Kantong Reusable Bag (Goodie Bag) : 100 Buah x 9.800 = Rp. 980.000 4. Makanan/Sembako : Sarden 425 Gr 100 Buah x 52.500 = Rp.5.250.000,00 5. Makanan/Sembako : Biskuit 100/Bungkus x 53.200 = Rp. 5.320.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	56.500.000
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pemberian Alat Bantu Dengar	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan	377.977.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	Pengemis di Luar Panti Sosial				pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	rencana pengembangan keterampilan dan wirausaha masyarakat	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	46.920.000
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Pengganti Transportasi Spesifikasi : Masyarakat) 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan)	Bimtek Sentra Cipta Mandiri	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	30.600.000
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Prioritas I)(Kemiskinan)	Pengurangan Beban Masyarakat	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	110.622.600
					JUMLAH	**622.620.200**
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Peningkatan Kualitas Taman Depan Terminal Baranangsiang	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	Konsultan Perencanaan Peningkatan Kualitas Taman Depan Terminal Baranangsiang	Infrastruktur dan sanitasi	34.409.000
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Konsultan Pengawas Peningkatan Kualitas Taman Depan Terminal Baranangsiang	Infrastruktur dan sanitasi	20.121.000
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Peningkatan Kualitas Taman dan Dekorasi Taman Seputar Jalur SSA	Infrastruktur dan sanitasi	1.628.136.400
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	Konsultan Perencanaan Peningkatan Kualitas Taman dan Dekorasi Taman Seputar Jalur SSA	Infrastruktur dan sanitasi	97.818.000
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Konsultan Pengawasan Peningkatan Kualitas Taman dan Dekorasi Taman Seputar Jalur SSA	Infrastruktur dan sanitasi	97.110.000
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Pengadaan Tanaman Vertikal Garden Jalan Pajajaran	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaa	5.1.02.01.01.0024 Belanja	Pengadaan Cetak Banner,	Infrastruktur dan sanitasi	500.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	Hayati Kabupaten/Kota	n Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bendera dan Bendera Kecil dalam Rangka Penerimaan Tamu Negara		
	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 124 Unit	Infrastruktur dan sanitasi	2.108.200.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan jalan lingkungan RT 06 RW 03 Cimahpar Bogor Utara	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan jalan lingkungan RW 12 Sindangsari Bogor Timur	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan jalan lingkungan Babakan sari Bogor Tengah	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Perencanaan 1	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan	Konsultan Pengawasan 1	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		untuk Menunjang Fungsi Hunian	kepada Masyarakat			
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan Kp Caradamai RW 06 Kel Mekarwangi	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan Perumahan Dharmais RW 13 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan JSA (Jaringan Selera Asia) RW 01 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Perencanaan 2	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Pengawasan 2	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan	Pengaspalan Jalan RW 01 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	kepada Masyarakat			
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan RW 07 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan RW 05 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Perencanaan 3	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Pengawasan 3	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan RW 12 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan	Drainase RW 13 Kel Kencana	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	kepada Masyarakat			
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengaspalan Jalan Pinang Merah Raya dan Pinang Merah 2 RT 4 RW 9 Yasmin Sektor 6 Curug Mekar	Infrastruktur dan sanitasi	200.000.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Perencanaan 4	Infrastruktur dan sanitasi	87.012.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Konsultan Pengawasan 4	Infrastruktur dan sanitasi	53.184.000
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Perbaikan saluran Air RT 02 RW 11 Pasir Jaya	Infrastruktur dan sanitasi	100.000.000
					JUMLAH	**7.946.578.400**
BAG UMUM SETDA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	- Belanja Jamuan Makan dan Minum Tamu Kegiatan SKRT (penyambutan tamu negara di Kota Bogor) Snack Box 5.100 x 15 ribu = 76,5 juta/bulan. Ini dianggarkan selama 8 bulan (April	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	900.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
				s.d Des) sehingga totalnya 612 juta. - Belanja Jamuan Makan dan Minum Tamu Kegiatan SKRT (monitoring inflasi) Snack VIP 200 x 30 ribu = 6 juta/bulan. Ini dianggarkan selama 8 bulan (April s.d Des) sehingga totalnya 48 juta. - Belanja Jamuan Makan dan Minum Pengamanan (penyambutan tamu negara di Kota Bogor) Nasi Box 1.000 x 30 ribu = 30 juta/bulan. Ini dianggarkan selama 8 bulan (April s.d Des) sehingga totalnya 240 juta.		
BAGIAN KEMASYARAKATAN SETDA	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Bansos Pelunasan Ijazah P.Ijazah SMA - 10 Sekolah - 78 Anak P.Ijazah SMK - 73 Sekolah - 1.402 Anak P.Ijazah MA - 4 Sekolah - 37 Anak	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	4.414.234.000
					JUMLAH	**5.314.234.000**
DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan	10.347.470.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
					pertumbuhan ekonomi	
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	1.160.538.400
					JUMLAH	**11.508.008.400**
DINAS PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 15 (PRIORITAS 1) (INFRASTRUKTUR)(PENDIDIKAN)	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	100.000.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan TPT SMPN 21	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	838.609.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Konsultan Pengawasan Pembangunan TPT SMPN 21 (PRIORITAS 1) (INFRASTRUKTUR) (PENDIDIKAN)	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	55.846.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Konsultan Perencanaan Pembangunan TPT SMPN 21 (PRIORITAS 1) (INFRASTRUKTUR) (PENDIDIKAN)	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	63.409.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Perbaikan Ruang Kelas Belajar SDN Cilendek 1 Bogor	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	200.000.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi SMPN 18	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	100.000.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Konsultan Perencanaan SMPN 18 Bogor	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	16.299.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Konsultan Pengawasan SMPN 18 Bogor	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	9.531.000
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,	Bantuan biaya pendidikan (tebus ijazah) SMP dan MTs	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	392.177.000
					JUMLAH	**1.775.871.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Penyediaan Cadangan Pangan	950.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
		Pemerintah Kabupaten /Kota	Pakan-Natura	Daerah 50 ton		
	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Tambahan Bantuan pangan (beras, minyak goreng, gula konsumsi dan telur) untuk masyarakat rawan pangan (1.371KK dari data P3KE)	Penyediaan Cadangan Pangan	3.158.784.000
	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Penambahan Pengadaan sarana produksi Nursery mendukung Ketahanan Pangan	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000
	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	Penambahan Pengadaan bibit dan pupuk	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000
	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	Pemeliharaan dan pengadaan bibit tanaman holtikultura	Penyediaan Cadangan Pangan	100.000.000
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	Rehab lanjutan Green House	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	Pemerintah Daerah	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab lanjutan Puskeswan	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan jalan penghubung nursery dan aula	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan	Penyediaan Cadangan Pangan	50.000.000
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengawasan	Penyediaan Cadangan Pangan	40.000.000
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab Kantor	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab RPH	Penyediaan Cadangan Pangan	200.000.000
					JUMLAH	**5.698.784.000**
DINAS TENAGA KERJA	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC 15 Unit x Rp. 690.453 = Rp. 10.356.795	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	49.636.704
				Pemeliharaan Lemari Es 2 Unit x Rp. 1.558.957 = Rp. 3.117.914	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Pemeliharaan Komputer 30 Unit x Rp. 730.000 = Rp. 21.900.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Pemeliharaan Printer 14 Unit x Rp. 690.000 = Rp. 9.660.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan Projector 4 Unit x Rp. 722.032 = Rp. 2.888.128	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
					pertumbuhan ekonomi	
	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pemeliharaan Sound System 1 Unit x Rp. 1.713.867 = Rp 1.713.867	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penambahan Daya Listrik 25.000 Kwh x Rp. ..... = Rp. 22.450.000 Pemeliharaan Gedung 550 m2 x Rp. 141.000 = Rp. 77.550.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	100.000.000
	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Padat Karya Rincian Belanja Foto Copy Rp. 7.013.600, Penjilidan Rp. 216.600 dan Spanduk Rp. 1.504.800 Jadi Total Rp. 8.735.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	3.200.000.000
	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Kertas A4 Rp. 697.000,- dan Kertas Folio Rp. 758.000 Jadi Total Rp.1.455.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Tinta Printer Color Rp. 1.070.000 Tinta Printer Black Rp. 1.192.000 Jadi Total Rp. 2.262.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Satu Paket Peralatan Padat Karya utk 68 Kelurahan Rp. 359.448.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rp. 514.200.000, Snak Rp. 257.100.000, Total Rp. 771.300.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Upah Pekerja Rp. 2.040.000.000 Upah Pengawas Rp. 16,800.000 Total Rp. 2.056.800.000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	
	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa kerja	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Spanduk-6 Meterx83.600 = Rp. 501.600, Foto Copy-7.500 lbr x 400 = Rp. 3.000.000, Penjilidan-36.100 x 10 Buku = Rp. 361.000 Nasi Box-30.000x15 Orgx4 hari = Rp. 1.800.000, Snack Box-15.000x15 Orgx4 hari = Rp. 900.000, Sewa Gedung-4 hari x 17.109.350 = 68.437.400	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	75.000.000
					JUMLAH	**3.424.636.704**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel	Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok dan Rumah Tangga1. Sewa kursi untuk Operasi Pasar Murah Idul Adha/Nataru : 160 buah x Rp. 27.493 = Rp. 4.398.8802. Sewa kursi untuk Pasar Murah : 720 buah x Rp. 27.493 = Rp. 19.794.9603. Sewa meja untuk Pasar Murah : 288 buah x Rp. 84.491 = Rp. 24.333.408	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi	48.527.248
	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok dan Rumah Tangga 1. Sewa sound system untuk Operasi Pasar Murah Idul Adha/Nataru : 2 set x Rp. 2.825.352 = Rp. 5.650.704 2. Sewa sound system untuk Pasar Murah : 72 set x Rp. 2.166.703 = Rp. 156.002.616 3. Sewa tenda VIP untuk Operasi Pasar Murah Idul Adha/Nataru : 486 meter x Rp 90.500 = Rp. 43.983.000 4. Sewa tenda kerucut 5x5 untuk Pasar Murah : 72 unit x Rp. 1.331.033 =	Stabilitas harga makanan dan minuman	301.470.696

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
				Rp. 95.834.376		
	2.17.3.30.3.31.37.0000 Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.3.30.3.31.37.0000 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pemukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Konsultasi Manajemen	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Konsultasi Manajemen Fasilitasi Badan Hukum Koperasi ke Notaris Rp. 3.500.000 x 68 kelurahan = Rp. 238.000.000 untuk menunjang pembentukan Koperasi Merah Putih		238.000.000
	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.0004 Penyediaan Bahan Logostik Kantor	5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	Belanja makanan dan minuman rapat untuk pertemuan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah Rp. 600.000 x 68 kelurahan untuk difasilitasi badan hukumnya ke notaris		40.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	2.17.3.30.3.31.18.0000 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.3.30.3.31.18.0000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	Honorarium narasumber non ASN dalam kegiatan sosialisasi perkoperasian Koperasi Merah Putih di Wilayah		12.000.000
	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.0004 Penyediaan Bahan Logostik Kantor	5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	Belanja makanan dan minuman rapat peserta sosialisasi perkoperasian Koperasi Merah Putih di Wilayah di 6 kecamatan		27.720.000
	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Penggandaan /fotocopy ukuran A4/F4 untuk kegiatan sosialisasi perkoperasian Koperasi Merah Putih di Wilayah		7.772.000
	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Belanja cetak spanduk untuk kegiatan sosialisasi perkoperasian Koperasi Merah Putih di Wilayah		2.508.000
					JUMLAH	**678.797.944**
BAPENDA	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.1.02.05.02.0001 / Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pembongkaran Reklame Melalui Pihak Ketiga (Luas 40 m2 s/d 50 m2)	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	87.158.400
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.1.02.05.02.0001 / Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pembongkaran Reklame Melalui Pihak Ketiga (Luas Lebih Dari 50 m2)	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	244.043.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.1.02.05.02.0001 / Lain-Lain Alat Kantor Lainnya	Pembelian 1 Roll Tali Karmantel Statis	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	8.774.000
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0020 / Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Pembelian Mata Gurinda / Gerinda Potong Besi 16 Inch	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	12.412.800
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.2.02.05.01.0005 / Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pembelian Tang Potong	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	256.000
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.2.02.05.01.0005 / Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pembelian Palu 1kg	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	480.000
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.2.02.05.01.0005 / Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pemebelian sarung tangan karet heavy duty	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	402.400
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.2.02.05.01.0005 / Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pembelian Head lamp Rescue	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	2.837.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA REKENING	URAIAN AKTIFITAS	LABEL PENGALIHAN EFISIENSI	JUMLAH PENGALIHAN (Rp)
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	5.2.02.05.01.0005 / Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pembelian Topi Pelindung (Safety Helmet)	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	2.325.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.01.01.0058 / Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Pembelian Nasi Box	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	30.600.000
					JUMLAH	**389.289.600**
BKAD	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.3.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga	Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.		2.308.845.544
					JUMLAH	**2.308.845.544**
					JUMLAH TOTAL	**69.582.036.360**

HASIL EFIENSINSI		**69.582.036.360**
PENGALIHAN EFISIENSI		**67.273.190.816**
BELANJA TIDAK TERDUGA		**2.308.845.544**

Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

efisiensi belanja sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas fiskal dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah

Efisiensi anggaran dilakukan melalui penyesuaian dan optimalisasi belanja pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sehingga tercipta ruang fiskal yang dapat dialokasikan ulang untuk mendukung program dan kegiatan prioritas, khususnya di sektor yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Pengalihan anggaran hasil efisiensi diarahkan pada kegiatan-kegiatan strategis, salah satunya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Rekonstruksi Jalan. Dana hasil efisiensi digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seperti perbaikan trotoar di sekitar GOR Pajajaran, serta pengadaan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan teknis.

Langkah ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung penyesuaian target indikator program sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja, mempercepat realisasi program strategis, serta memperkuat kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.47**
Perubahan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*21*
1	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	10	10	10	29	29	29	INSPEKTORAT
2	KECAMATAN	5	5	5	12	12	12	487	487	488	KECAMATAN
3	KEPEGAWAIAN	1	2	2	4	10	10	12	27	27	BKPSDM
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	11	11	11	22	22	22	KESBANGPOL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*21*
5	KEUANGAN	4	4	4	12	12	12	71	71	71	BKAD, BAPENDA
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	4	4	4	BKPSDM
7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	3	3	3	7	7	7	BAPPERIDA
8	PERENCANAAN	3	3	3	13	13	13	42	41	42	BAPPERIDA
9	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	18	18	18	57	57	57	SEKRETARIAT DAERAH
10	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	16	16	16	60	59	61	SET. DPRD
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	2	12	12	12	22	23	23	DISDUKCAPIL
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	4	7	7	7	19	19	19	DIARPUS
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	5	5	12	12	12	19	19	19	DISPARBUD
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	2	2	3	3	3	4	4	4	DKPP
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	8	13	13	16	32	35	DISPORA
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	23	23	23	140	140	569	DINKES

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*21*
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4	16	16	16	72	74	75	SATPOL.PP ,BPBD, DPKP
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	8	8	9	21	21	23	DISKOMINFO
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	6	6	6	6	6	10	10	10	DKUKMDAGIN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	10	16	16	16	34	34	34	DLH
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	4	12	12	12	26	26	26	DKPP
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	4	5	5	5	10	10	10	DISPARBUD
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	9	10	17	17	18	49	49	51	PUPR
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	3	8	8	8	274	274	274	KECAMATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*21*
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	6	17	17	17	28	30	30	DPPPA
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	6	11	11	12	20	20	22	DMPTSP
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	2	2	10	10	10	64	64	70	DISDIK
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	13	13	13	55	56	60	DPPKB
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DIKUKMDAGIN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	17	17	18	40	40	42	DISHUB
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	2	5	5	5	17	17	17	DKUKMDAGIN
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	3	3	3	5	5	5	DIARPUS
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DISKOMINFO
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*21*
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	5	5	9	9	9	13	13	14	DKPP
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	4	15	15	15	38	38	38	DISPERUMKIM
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	6	15	15	15	46	46	46	DINSOS
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	DISKOMINFO
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	13	13	13	27	27	27	DISNAKER
40	NON URUSAN	1	0	0	6	0	0	39	0		
JUMLAH TOTAL		146	146	148	395	400	404	1909	1905	2361	

Tabel ini memuat perbandingan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, yaitu RKPD Tahun 2025, Penjabaran APBD Tahun 2025, serta RKPD Perubahan Tahun 2025.

Sebagai contoh, pada urusan tertentu terjadi penambahan jumlah sub kegiatan dalam RKPD Perubahan 2025 dibandingkan dengan dokumen RKPD murni dan Penjabaran APBD. Hal ini menunjukkan respons pemerintah daerah terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan aktual masyarakat serta arahan kebijakan terbaru, termasuk adanya sumber pembiayaan tambahan seperti bantuan keuangan provinsi atau dana alokasi khusus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan proses evaluasi dan penyusunan perencanaan ke depan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.

Tabel Error! No text of specified style in document.**.48**
Rekapitulasi Janji Politik Walikota Tahun 2025

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
	MISI 1				
1	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru	DISDIK	56.667.099.012	602.130.000	Penambahan anggaran
2	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu	DISDIK	2.893.927.000	250.000.000	Penambahan anggaran
		BAG KESRA	3.119.000.000		Penambahan anggaran
3	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur	BAG KESRA	5.760.000.000	800.000.000	Penambahan anggaran
4	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	DISDIK	1.115.500.000		Penambahan anggaran
5	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal	BAG KESRA	4.130.265.000	392.177.000	Penambahan anggaran
6	Mengembangkan command center	DISKOMINFO		100.000.000	Penambahan anggaran
7	Pengembangan CCTV di lokasi strategis	DISKOMINFO		2.578.256.757	Penambahan anggaran
8	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik	DISKOMINFO		167.500.000	Penambahan anggaran
9	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparatur penegak hukum dan wilayah	DISKOMINFO		54.950.000	Penambahan anggaran
10	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan			2.998.466.400	Penambahan anggaran
11	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Kecamatan Bogor Selatan	7.973.410.000	243.250.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Bogor Utara	1.378.553.000	313.000.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Bogor Tengah	3.085.331.000	136.250.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Tanah Sareal	3.787.420.000	212.000.000	Penambahan anggaran
		Kecamatan Bogor Barat	6.910.180.000	264.250.000	Penambahan anggaran
	TOTAL		**96.820.685.012**	**9.112.230.157**	
	MISI 2				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
1	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	DINKES	125.830.000	360.000.000	Penambahan anggaran
		DP3A	90.301.000	159.095.000	Penambahan anggaran
		DINKES	13.428.000.000		Penambahan anggaran
2	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas	DINKES	987.789.800	2.843.227.806	Penambahan anggaran
3	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam	DINKES	7.000.000.000	354.000.000	Penambahan anggaran
4	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	DINKES	69.039.756.102		Penambahan anggaran
5	Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling	DINKES		320.000.000	Penambahan anggaran
6	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	DINKES		579.561.300	Penambahan anggaran
7	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	DPPKB	489.877.446	94.344.846	Penambahan anggaran
		DINKES	701.817.600		Penambahan anggaran
		DKPP	4.084.486.700		Penambahan anggaran
9	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	DKPP	160.935.600	4.248.784.000	Penambahan anggaran
10	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	DLH	545.998.500	1.550.000.000	Penambahan anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
11	Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai	DLH	7.085.230.400	2.250.000.000	Penambahan anggaran
12	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	PUPR	6.116.010.200	199.617.700	Penambahan anggaran
13	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	DISPERUMKIM	22.160.468.139		Penambahan anggaran
	TOTAL		**132.016.501.487**	**12.958.630.652**	
	MISI 3				
1	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	DISPARBUD		789.385.200	Penambahan anggaran
2	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan askes bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	DKUMKMDAGIN	727.600.000	318.520.000	Penambahan anggaran
3	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	DISPARBUD	401.571.800	7.772.000	Penambahan anggaran
	TOTAL		**1.129.171.800**	**1.115.677.200**	
	MISI 4				
1	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik	DISHUB	10.452.612.300	16.191.460.321	Penambahan anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

NO	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
2	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda	DISHUB	381.109.300		Penambahan anggaran
3	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	DISHUB	12.295.398.280	391.089.500	Penambahan anggaran
4	Pembangunan lanjutan R3, R2, Inner Ringroad	DPUPR	11.534.010.723	1.500.000.000	Penambahan anggaran
	TOTAL		**34.663.130.603**	**18.082.549.821**	

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan Kota Bogor, Wali Kota menetapkan berbagai janji politik yang diimplementasikan melalui alokasi anggaran pada **APBD Tahun 2025** dan disesuaikan kembali dalam **Perubahan RKPD 2025**. Janji-janji ini terbagi dalam empat misi utama pembangunan kota:

MISI 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Publik

Fokus utama diarahkan pada perluasan akses pendidikan dan penguatan pelayanan publik. Beberapa program prioritas antara lain:

- Pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran lebih dari **Rp56 miliar**.
- Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu.
- Insentif bagi guru ngaji dan jaminan setiap siswa memperoleh ijazah.
- Penguatan infrastruktur digital seperti **Command Center**, pemasangan **CCTV**, dan **Wi-Fi gratis**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Layanan administrasi kependudukan jemput bola serta peningkatan sarana pelayanan publik di tiap kecamatan.

MISI 2: Penguatan Layanan Kesehatan, Sosial, dan Lingkungan

Misi ini menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat:

- Penambahan ICU dan alat kesehatan, serta peningkatan layanan rawat inap di puskesmas.
- Dukungan terhadap penanganan stunting, BPJS PBI, dan layanan ambulan 24 jam.
- Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R, sanitasi, serta pembangunan rumah layak huni.

MISI 3: Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM

Janji ini diarahkan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui:

- Penguatan kampung tematik berbasis budaya dan pariwisata.
- Akses bantuan permodalan serta pemasaran produk UMKM.
- Pemanfaatan ASN untuk mendukung belanja produk lokal.

MISI 4: Modernisasi Transportasi dan Infrastruktur

Untuk mewujudkan kota yang ramah mobilitas dan inklusif:

- Penambahan armada transportasi publik modern dilengkapi Wi-Fi dan sistem pembayaran elektronik.
- Pembangunan halte, terminal, serta sistem informasi digital.
- Percepatan pembangunan **Inner Ringroad** dan integrasi moda transportasi.

12.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBN

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Bogor melakukan sinkronisasi dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, adapun pengajuan usulan tersebut dilakukan sesuai dengan lokasi prioritas setiap Kabupaten/Kota di tahun 2025 yang kemudian dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2024 perihal penyampaian rincian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Adapun besaran yang diterima oleh Pemerintah Kota Bogor yang bersumber dari APBN tertuang dalam tabel 5.9 berikut ini:

Tabel Error! No text of specified style in document..**49**
Bantuan Keuangan APBN Tahun 2025

BIDANG	SUB BIDANG	SUB KEGIATAN	NILAI	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	SD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	200.000.000	DAK	DINAS PENDIDIKAN
	SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	216.600.000	DAK	DINAS PENDIDIKAN
Air Minum	Air Minum	Perluasan Sistem J Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	579.300.000	DAK	DINAS PUPR
Sanitasi	Sanitasi	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	9.693.660.000	DAK	DINAS PUPR
Kesehatan	Penguatan Sistem dan kapasitas pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.000.000.000	DAK	RSUD
Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.850.000.000	DBHCHT	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	244.000.000	DBHCHT	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.764.692.000	DBHCHT	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	738.365.900	DBHCHT	
Kesejahteraan Masyarakat		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.599.159.400	DBHCHT	DINAS TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BIDANG	SUB BIDANG	SUB KEGIATAN	NILAI	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
Penegakan Hukum		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	319.831.880	DBHCHT	SATPOL.PP
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	135.876.820	DBHCHT	
Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.100.000.000	DIF	DINAS KESEHATAN
Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	334.950.000	DIF	DINAS PERHUBUNGAN
Lingkungan Hidup		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.272.635.200	DIF	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.169.000	DIF	DISDUKCAPIL
		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	278.923.100	DIF	
Penanaman Modal		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.053.786.300	DIF	DPMPTSP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337.525.000	DIF	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.868.000	DIF	
Pendidikan		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	360.242.000	DIF	
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.098.787.500	DIF	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	694.147.000	DIF	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BIDANG	SUB BIDANG	SUB KEGIATAN	NILAI	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
Perencanaan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	474.099.400	DIF	BAPPERIDA
Perumahan dan Permukiman		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	276.293.000	DIF	DISPERUMKIM
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.069.329.900	DIF	
Pekerjaan Umum		Rekonstruksi Jalan	1.393.398.000	DIF	DINAS PUPR
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.692.326.000	DIF	
Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah Daerah	285.582.600	DIF	DISKOMINFO

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2025

Tabel Error! No text of specified style in document.**.50**
Rekapitulasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

SUMBER DANA	PAGU	%
DAK FISIK	25.689.560.000	51
DBHCHT	7.995.797.000	16
DIF	16.327.907.000	33
TOTAL	**50.013.264.000**	**100**

Sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan layanan dasar masyarakat, Pemerintah Kota Bogor menerima alokasi Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dalam bentuk Dana Transfer (DAK, DBHCHT, DANA INSENTIF FISKAL). Dana ini ditujukan untuk mendukung pencapaian target nasional di bidang pendidikan dan infrastruktur dasar melalui intervensi langsung terhadap kebutuhan spesifik daerah.

Dengan demikian, total bantuan keuangan yang bersumber dari APBN Tahun 2025 melalui mekanisme Dana Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Bogor adalah sebesar **Rp.50.013.264.000**,-. Dana ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, mendukung prioritas nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung melalui intervensi layanan Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dasar.

12.4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER APBD PROVINSI JAWA BARAT

Sama halnya dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor melakukan sinkronisasi dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, adapun pengajuan usulan tersebut dilakukan sesuai dengan kamus usulan yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk penganggaran tahun 2025 yang kemudian dikeluarkan melalui surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 1060/KU.01.03.07/BPKAD tanggal 6 Februari 2025 perihal penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana bagi hasil pajak daerah Provinsi pada APBD tahun 2025. Adapun besaran yang diterima oleh Pemerintah Kota Bogor yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tertuang dalam tabel 5.11 berikut ini:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.51**
Rekapitulasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	JENIS USULAN	NILAI	SUMBER DANA
1	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan PB yang didaftarkan oleh Pemda	727.656.048	APBD Provinsi Jawa Barat
2	Peningkatan Akses Masyarakat Disabilitas dan terlantar terhadap pelayanan dasar	1.311.620.000	APBD Provinsi Jawa Barat
	TOTAL	**2.039.276.048**	

Adapun dua jenis usulan kegiatan yang mendapatkan alokasi pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan PB yang didaftarkan oleh Pemda
   - Nilai Alokasi: Rp.727.656.048,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Peruntukan: Pembayaran premi jaminan kesehatan bagi segmen peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Bukan (PB) lainnya yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar dalam skema jaminan kesehatan nasional.

2. Peningkatan Akses Masyarakat Disabilitas dan Terlantar terhadap Pelayanan Dasar
   - Nilai Alokasi: Rp.1.311.620.000,-
   - Peruntukan: Mendukung program pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas dan masyarakat terlantar, termasuk aksesibilitas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2025 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2025 disusun karena adanya Permendagri nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD tahun 2025 dipercepat menjadi akhir bulan Mei atau awal bulan Juni tahun 2025 direncanakan sudah ditetapkan, serta penguatan implementasi Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta prioritas pembangunan daerah yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan rencana program kegiatan pada tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2025, ditujukan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi bersama sama dengan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha;
2. Pemerintah Kota Bogor berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Bogor Tahun 2025, Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan &

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;

3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Perubahan, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap PD harus menyusun dan membuat Perubahan Renja PD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025;
4. Pemerintah Kota Bogor berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025;
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bapperida;
6. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi hasil Perubahan Renja Perangkat Daerah setiap triwulan di Tahun 2025, sesuai dengan amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id